

SISKAMLING Jaga Sula:

Pilar Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Kepulauan Sula

Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas keamanan kampung kita? Aparat? Atau kita sendiri? Buku ini mengajak pembaca menyelami kembali sebuah nilai yang mulai memudar: kesadaran kolektif untuk saling menjaga. Di tengah tantangan geografis Kepulauan Sula yang luas, terpencar, dan tidak selalu mudah dijangkau aparat, lahirlah gerakan besar bernama Siskamling Jaga Sula sebuah kebangkitan sosial yang menghidupkan kembali kekuatan solidaritas warga.

Melalui analisis yang tajam, data kriminalitas terbaru, dan kisah lapangan yang apa adanya, penulis membongkar bagaimana Siskamling bukan hanya menjawab persoalan keamanan, tetapi juga memperbaiki kepercayaan, menguatkan jaringan sosial, serta mengembalikan budaya jaga kampung yang menjadi identitas orang Sula sejak dulu.

Di bawah kepemimpinan visioner Kapolres AKBP Kodrat Muh Hartanto, S.I.K, program ini berkembang menjadi model keamanan modern yang humanis, partisipatif, dan berakar kuat pada kearifan lokal. Desa-desa seperti Fagudu, Waibau, Ona, Waibau, Fukweu, Keramat Titdoi hingga Falabisahaya kini berdiri sebagai contoh nyata bahwa keamanan yang berhasil selalu bermula dari rakyat.

Buku ini akan menggugah kesadaran kita bahwa: keamanan bukan hanya tentang ronda, tetapi tentang rasa memiliki, aparat bukan satu-satunya penjaga, kita pun adalah pelindung kampung kita, dan Siskamling bukan program melainkan gerakan moral. Setelah membaca buku ini, Anda tidak lagi melihat pos ronda sebagai bangunan kecil di sudut kampung, tetapi sebagai simbol kebangkitan sosial Kepulauan Sula.

Inilah buku yang bukan hanya bercerita tentang Sula, tetapi menggerakkan Orang Sula untuk Jaga Sula dimulai dari Jaga Diri, Jaga Keluarga dan Jaga Lingkungan.



BIODATA PENULIS

Dr. Sahrul Takim lahir di Sanana pada 19 April 1989. Ia merupakan seorang dosen dan peneliti pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Jurusan Tarbiyah, sekaligus pimpinan di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula, Maluku Utara.

Sejak tahun 2015 hingga sekarang, Dr. Sahrul Takim aktif menjalankan tridarma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah di bidang Pendidikan Islam. Berbagai karya tulis ilmiah telah dihasilkannya dan dipublikasikan pada sejumlah jurnal akademik sebagai kontribusi nyata bagi pengembangan keilmuan Pendidikan Islam.



SISKAMLING
JAGA SULA

Dr. Sahrul Takim, S.Pd.I., M.Pd.I

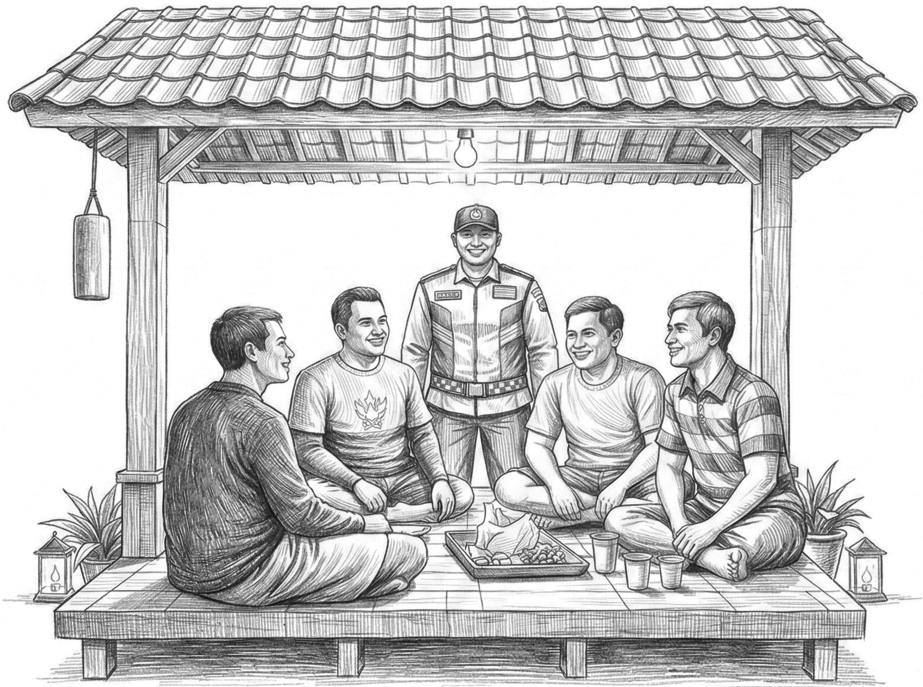
SISKAMLING JAGA SULA



PERPADUAN KEARIFAN LOKAL DAN MODERNITAS
DALAM MEWUJUDKAN **KAMTIBMAS** DI KEPULAUAN SULA

Dr. Sahrul Takim, S.Pd.I., M.Pd.I

SISKAMLING JAGA SULA



PERPADUAN KEARIFAN LOKAL DAN MODERNITAS

DALAM MEWUJUDKAN KAMTIBMAS DI KEPULAUAN SULA

Dr. Sahrul Takim, S.Pd.I., M.Pd.I

SISKAMLING JAGA SULA

Dr. Sahrul Takim, S.Pd.I., M.Pd.I

© Nizamia Learning Center 2026

Anggota IKAPI

Register 166/JTI/2016

All right reserved

Penulis:

Dr. Sahrul Takim, S.Pd.I., M.Pd.I

Tim Penyusun:

Iptu Gunawan Ipa, S.H., M.H.

Iptu Faisal Pora, S.I.P

Ipda Ganda Sadewa

Brigpol Iriansyah, S.H

Tata Sampul & Naskah:

Yunarsono, S.T.

Diterbitkan pertama kali oleh

Nizamia Learning Center

Ruko Valencia AA-15 Sidoarjo, Telepon (031)8913874

E-mail : nizamiacenter@gmail.com

Website : www.nizamiacenter.com

Cetakan Pertama, April 2026

xxxiv + 246 hlm: 14.5 cm x 21 cm

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan karunia dan rahmat-Nya, buku yang berjudul *SISKAMLING Jaga Sula; Perpaduan Kearifan Lokal dan Modernitas Dalam Mewujudkan Kamtibmas di Kepulauan Sula* ini dapat terwujud dan diterbitkan. Buku ini hadir sebagai wujud kontribusi nyata dalam mendokumentasikan dan mengembangkan salah satu warisan budaya sekaligus strategi keamanan masyarakat yang memiliki relevansi tinggi dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Kepulauan Sula.

Kepulauan Sula sebagai wilayah kepulauan dengan komposisi masyarakat yang heterogen dan tantangan geografis yang khas, membutuhkan sistem keamanan yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk memahami secara komprehensif konsep, implementasi, serta nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING) yang dihidupkan kembali melalui program “Jaga Sula.” Program ini bukan sekadar upaya menjaga keamanan secara fisik, tetapi lebih jauh merupakan upaya memperkuat solidaritas sosial, membangun rasa saling percaya, dan menghidupkan kembali budaya gotong royong yang selama ini menjadi fondasi sosial masyarakat Sula.

Buku ini terdiri dari beberapa bab yang menguraikan secara rinci latar belakang historis, kondisi sosial budaya, peran aparaturnya terutama Polres Kepulauan Sula di bawah kepemimpinan AKBP Kodrat Muh Hartanto, S.I.K,

serta strategi implementasi SISKAMLING yang bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah daerah. Dengan pendekatan yang sistematis dan berdasarkan data lapangan serta penggalian kearifan lokal, diharapkan dapat memberikan gambaran lengkap sekaligus panduan praktis bagi aparat keamanan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga warga secara umum.

Melalui kata pengantar ini, penulis hendak menekankan bahwa keberhasilan program *Jaga Sula* bukan hanya terletak pada peran aparat keamanan semata, melainkan keberhasilan bersama seluruh elemen masyarakat. Partisipasi aktif, kesadaran kolektif, dan konsistensi pelaksanaan sistem ronda malam serta penjagaan lingkungan menjadi kunci utama agar daerah ini tetap kondusif, damai, dan produktif. Semangat *Kit Mua-Mua ta Basanohi* (Kita semua bersaudara) yang diaplikasikan dalam SISKAMLING merupakan refleksi konkret dari nilai Pancasila yang menjiwai kehidupan sosial bangsa Indonesia, khususnya di Kepulauan Sula.

Buku ini juga memberi penekanan pada pendekatan praktis dan aplikatif yang dapat langsung diterapkan di lapangan tanpa memerlukan sumber daya besar, mulai dari pembentukan pos ronda yang efisien, pelatihan komunitas, hingga pemanfaatan teknologi komunikasi sederhana seperti *handy talky* (HT) untuk koordinasi cepat. Semua itu menjadi instrumen penting yang menambah efektivitas pengelolaan keamanan lokal, dan sekaligus sebagai sarana penguatan modal sosial yang vital untuk mereduksi potensi konflik dan kriminalitas.

Di samping itu, buku ini juga membuka ruang diskusi mengenai keberlanjutan program keamanan lingkungan berbasis masyarakat yang harus terus didukung oleh kebijakan

pemerintah dan komitmen seluruh stakeholder, mulai dari tingkat desa hingga pemerintah kabupaten. Penghargaan dan insentif bagi lingkungan yang berhasil menumbuhkan budaya keamanan aktif menjadi salah satu rekomendasi terbaik yang disarankan dalam buku ini, sebagai stimulan agar semangat SISKAMLING tetap hidup dan berkembang mengikuti dinamika perubahan sosial.

Dengan kelengkapan dan kedalaman pembahasan ini, penulis yakin buku *SISKAMLING Jaga Sula* dapat menjadi referensi utama bagi akademisi, praktisi keamanan, pejabat pemerintah, serta masyarakat luas yang peduli terhadap pembangunan keamanan lokal berbasis partisipasi. Melalui implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan buku ini berkontribusi menciptakan Kepulauan Sula yang aman, tertib, dan sejahtera.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, data, dan wawasan dalam penyusunan buku ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat dan menjadi tonggak kebangkitan SISKAMLING dalam menyongsong masa depan Kepulauan Sula yang lebih baik dan harmonis.

Sanana, Februari 2026

Penulis

Dr. Sahrul Takim, S.Pd.I., M.Pd.I

SAMBUTAN

KAPOLRES KEPULAUAN SULA

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

“Rasa aman adalah harapan bersama yang tidak hanya untuk dicita-citakan kan”

Dalam khazanah kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu modal yang sangat berharga adalah rasa aman. Rasa aman yang lahir dari keyakinan kolektif bahwa kita semua adalah penjaga bagi sesama.

Buku yang hadir di tangan pembaca ini, “*SISKAMLING Jaga Sula; Perpaduan Kearifan Lokal dan Modernitas Dalam Mewujudkan Kamtibmas di Kepulauan Sula*”, adalah sebuah testament hidup akan kekuatan modal sosial dan kearifan lokal dalam menciptakan keamanan yang mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan. Dimana penulis secara langsung tumbuh dan berkembang di wilayah tersebut yang secara langsung mengalami dan merasakan suasana kebersamaan yang ada.

Kepulauan Sula, dengan hamparan pulau-pulau yang memesonakan dan masyarakat yang heterogen, menyimpan dinamika sosial-geografis yang unik. Sebagai wilayah kepulauan, tantangan yang dihadapi tidaklah sederhana: keterpencilan, keterbatasan akses, dan sumber daya keamanan formal yang tidak selalu mampu menjangkau setiap sudut. Dalam kondisi seperti inilah, semangat “Jaga Sula” menemukan relevansinya yang paling mendalam. Ia adalah sebuah jawaban cerdas dan elegan yang bersumber

dari akar budaya sendiri, sebuah sistem yang mengajarkan bahwa keamanan sesungguhnya dimulai dari kesadaran setiap individu untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Gerakan “Jaga Sula” bukanlah sekadar program administratif belaka. Ia adalah sebuah gerakan kultural yang mentransformasikan nilai-nilai luhur gotong royong, baku bae, dan saling jaga menjadi sebuah kekuatan operasional yang nyata. Melalui buku ini, kita diajak untuk menyelami proses transformasi tersebut—sebuah proses yang tidak hanya menurunkan angka gangguan keamanan, tetapi lebih penting lagi, membangun kembali jaring-jaring kepercayaan dan solidaritas sosial yang sempat renggang.

Buku ini dengan sangat detail dan analitis menguraikan perjalanan SISKAMLING dari sebuah konsep menjadi sebuah gerakan massal. Dimulai dari pemaparan kondisi sosial dan geografis yang menjadi latar belakang, hingga penyajian studi kasus yang inspiratif dari desa-desa yang telah menjalankan SISKAMLING. Kita akan melihat bagaimana kolaborasi yang apik antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, tokoh adat, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat mampu menciptakan sebuah ekosistem keamanan yang tangguh dan adaptif.

Namun, di balik semua narasi strategi dan pencapaian, buku ini juga bercerita tentang manusia yang hidup di zaman modern yang saling berinteraksi, dimana satu dengan yang lain memiliki keterikatan yang dibingkai oleh adat istiadat. Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi daerah-daerah lain di Indonesia, khususnya wilayah kepulauan dan terpencil, untuk membangun sistem keamanan berbasis komunitas yang sesuai dengan konteks lokal mereka.

Sebagai peneriman manfaat SISKAMLING di kampung halaman yang telah menjaga Ibu dan Nenek saya selama saya di tanah rantau, sungguh saya merasa bersyukur kepada Allah Swt. yang melalui Polri telah memberikan kesempatan untuk berdinis dan menimba pengalaman di Kabupaten Kepulauan Sula dan merasakan Indonesia seutuhnya.

Akhir kata, saya mengajak kita membuka lembaran-lembaran buku ini dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka. Biarlah setiap kisah dan analisis di dalamnya mengingatkan kita akan satu prinsip mendasar: rasa aman adalah harapan bersama yang tidak hanya untuk dicitacitakan. “Jaga Sula” adalah bukti bahwa ketika rasa memiliki dan harapan itu hidup, sekat-sekat geografis dan sosial pun dapat ditundukkan oleh kekuatan kebersamaan.

Selamat untuk saudara dan sahabat saya Syahrul Takim yang telah menyelesaikan penulisan buku yang sangat bermanfaat ini. Selamat membaca, dan mari kita bersama-sama mengambil pelajaran berharga dari bumi Sula untuk kita terapkan dalam menjaga kedamaian di setiap sudut negeri ini.

Bersama Jaga Sula;

Jaga Diri

Jaga Keluarga

Jaga Lingkungan

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Sanana, Februari 2026

Kapolres Kepulauan Sula

AKBP Kodrat Muh Hartanto SIK

SAMBUTAN

KETUA FORUM KOMUNIKASI UMAT BERAGAMA (FKUB) PROVINSI MALUKU UTARA

Jaga Sula; SISKAMLING *Ala* Kapolres Kepulauan Sula

Kehidupan yang aman dan damai menjadi dambaan semua warga. Dambaan tersebut tidak akan terwujud manakala ketakutan dan rasa curiga masih terpatrit dalam benak sesama warga, dan kesejahteraan tidak akan terwujud apabila konflik dan kekerasan menghantui masyarakat. Keamanan menjadi penting dan penyangga utama dalam membangun kehidupan yang harmonis, damai dan sejahtera. Jaga SULA, sebuah model pendekatan dalam menjaga keamanan yang dilakukan oleh Kapolres Kepulauan Sula AKBP Kodrat Muh. Hartanto, S.I.K, adalah model sistem pengamanan lingkungan dengan melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan. Pendekatan partisipatif kolaboratif dengan melibatkan semua komponen warga masyarakat dalam menjaga keamanan adalah sebuah strategi untuk menciptakan stabilitas keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian semata, akan tetapi keterlibatan masyarakat juga menjadi sangat penting.

Kedamaian dan kesejahteraan sangat penting bagi setiap masyarakat. Dengan hidup damai memungkinkan seseorang dapat hidup dengan tenang, aman, dan bahagia. Kedamaian akan melahirkan kesejahteraan, yaitu dengan memiliki akses layanan yang dibutuhkan untuk hidup yang lebih baik. Kedamaian dan kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan pembangunan, karena keduanya merupakan prasyarat untuk

mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kedamaian memungkinkan kita untuk fokus pada pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, sementara kesejahteraan memungkinkan kita untuk memiliki sumber daya dan kapasitas untuk mencapai tujuan tersebut.

Kedamaian tidak akan terwujud, manakala tidak ada jaminan tumbuhnya rasa aman bagi masyarakat. Kedamaian dan keamanan saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Kedamaian itu tercipta oleh karena adanya keamanan, sehingga apabila suatu daerah dan lingkungan merasakan kedamaian, maka masyarakat akan merasa aman dan nyaman dan lingkungannya pun stabil dan kondusif, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa ketakutan dan kecemasan, serta dapat hidup dengan tenang dan bahagia. Dengan demikian, kedamaian dan keamanan saling mengisi dan memperkuat satu sama lainnya. Ketika suatu daerah itu damai, maka keamanan akan meningkat, dan ketika keamanan meningkat, maka kedamaian akan semakin kokoh. Kedamaian dan keamanan sangat penting untuk pembangunan suatu daerah. Ketika suatu daerah damai dan aman, maka sangat berdampak terhadap pembangunan di daerah tersebut, maka sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Namun demikian, menjaga keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tapi juga masyarakat. Keamanan adalah tanggung jawab bersama, dan setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga keamanan di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan kedamaian dan keamanan. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan, karena mereka

paling mengetahui tentang lingkungan sekitar dan dapat memberikan informasi yang akurat kepada kepolisian. Selain itu, masyarakat juga dapat membantu mencegah kejahatan dengan mengawasi lingkungan di sekitarnya.

Dengan demikian, kerjasama masyarakat dan kepolisian sangat penting dalam menjaga keamanan. Kepolisian dapat memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, sementara masyarakat dapat memberikan informasi dan dukungan kepada kepolisian. Sebagai bentuk tanggungjawab keamanan, masyarakat dapat melakukannya dalam bentuk SISKAMLING (Sistem Keamanan Lingkungan) seperti yang dijelaskan dalam buku ini. Yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam menjaga dan menciptakan kondisi yang aman, damai dan sejuk bagi warga masyarakat Kepulauan Sula.

Keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting dan strategis sebab masyarakat lebih paham dan mengetahui tentang lingkungan di sekitarnya. Selain itu dapat memberikan informasi yang akurat tentang kejadian yang mencurigakan. Dengan melibatkan masyarakat dapat membantu mencegah atau meminimalisir kejahatan dengan cara mengawasi lingkungan sekitar dan melaporkan kejadian yang mencurigakan kepada kepolisian. Pengamanan melalui SISKAMLING dengan melibatkan masyarakat dapat meningkatkan rasa aman bagi masyarakat, karena ada kepedualian dan tanggungjawab bersama dalam menjaga keamanan di lingkungannya sendiri. Dengan demikian, SISKAMLING dengan melibatkan masyarakat menjadi penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Pendekatan keamanan yang cenderung legal-formalistik dengan mengabaikan bahkan tidak peduli terhadap

kondisi sosial kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi dan berpegang pada tradisi atau kearifan lokal (*local wisdom*) tidak memperoleh hasil yang maksimal, bahkan cenderung gagal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparat keamanan. Strategi pengamanan lingkungan dengan melibatkan masyarakat yang dilakukan oleh Kapolres Kepulauan Sula AKBP Kodrat Muh. Hartanto, S.I.K, sejatinya menjadi model dalam membangun sistem keamanan untuk merajut kebersamaan dalam membangun masyarakat yang cinta akan perdamaian dengan berbagai kegiatan seperti dijelaskan dalam buku ini.

Pendekatan humanistik model AKBP Kodrat Muh. Hartanto, S.I.K, dengan mengunjungi dan membangun silaturahmi melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok pemuda, dan akademisi menjadi modal sosial untuk menciptakan lingkungan keamanan yang kondusif. Pendekatan persuasif dengan mengunjungi berbagai kelompok atau *stakeholder* di Kepulauan Sula adalah langkah strategis sekaligus meyakinkan kepada masyarakat Sula, bahwa keamanan dan kondusifitas sebuah daerah, tidak hanya menjadi tanggung jawab Kepolisian semata, akan tetapi keterlibatan dan tanggungjawab semua warga masyarakat Kepulauan Sula. Dengan demikian, Jaga Sula adalah pendekatan keamanan *ala* Kapolres Kepulauan Sula yang tidak hanya sekedar kegiatan menjaga keamanan di malam hari melalui *ronda malam*, akan tetapi sebuah gerakan sosial-keagamaan yang menegaskan tentang jati masyarakat Kepulauan Sula, yaitu jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan.

Pentingnya menghidupkan kembali tradisi atau kearifan lokal dalam menumbuhkan rasa aman dan damai

melalui *lom poa hoi* (kumpul saudara), *mana wa lima* (gotong royong), dan *makdahi/maksaira* (pertemuan warga di kantor desa) pada masyarakat Sula yang dijelaskan dalam buku ini sejatinya dihidupkan kembali. Tradisi tersebut telah tergerus dengan pendekatan keamanan yang cenderung legal-formalistik, dimana harus menggunakan senjata dengan pakaian seragam lengkap seakan terjun di medan pertempuran. Masyarakat Sula adalah masyarakat religius dan menghargai adat *se atoran*. Dengan tanpa merendahkan martabat kepolisian, pertanyaan yang patut diajukan mengapa dalam melaksanakan tugas pengamanan tidak menggunakan pakaian adat Sula atau dengan pakaian kepolisian yang dibalut kain sorban? Pertanyaan ini tidak perlu dijawab dengan retorika administratif-legal-formalistik. Akan tetapi adakah kemauan dan keberanian dalam bersikap untuk menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang aman dan damai melalui pendekatan humanistik-religius. Sebuah model pendekatan yang menempatkan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang patut dihargai, oleh karena Tuhan telah memuliakannya. Maka tidak sepatutnya sesama manusia saling menakut-nakuti atau merendahkan manusia yang lain, apapun alasan dan dalilnya.

Ternate, Februari 2026

Ketua FKUB

Provinsi Maluku Utara

Dr. Adnan Mahmud

SAMBUTAN

BUPATI KEPULAUAN SULA

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.
Salam Sejahtera dan Syalomm..*

Alhamdulillah Puji serta Syukur kita haturkan kehadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin-Nya sebuah buku berjudul “*SISKAMLING Jaga Sula; Perpaduan Kearifan Lokal dan Modernitas Dalam Mewujudkan Kamtibmas di Kepulauan Sula*”. Saya berharap Buku ini segera diterbitkan sebagai bentuk aksi nyata dalam memberikan gambaran serta potret kehidupan sosial kemasyarakatan dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula.

SISKAMLING, singkatan dari Sistem Keamanan Lingkungan, merupakan perwujudan nyata dari kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal mereka. Dalam praktiknya, SISKAMLING merupakan suatu kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif warga dalam pengawasan dan perlindungan wilayahnya. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau kepolisian, SISKAMLING menjadi blok bangunan dalam menghadapi berbagai potensi ancaman kejahatan di lingkungan. Mulai dari tindak pencurian, perampokan, hingga tindakan kekerasan, warga yang tergabung dalam SISKAMLING bertekad untuk menghadapinya secara bersama-sama.

Sebagai Kepala Daerah saat ini, saya melihat salah satu hal menarik dalam buku ini adalah menjelaskan tentang metode penerapan SISKAMLING dengan keberagaman metode pengamanan yang dapat diterapkan. Misalnya, mengadakan patroli malam, Pemanfaatan Teknologi Informasi, hingga membangun pos jaga. Namun, yang tak kalah penting adalah terciptanya rasa kebersamaan dan solidaritas antara warga. Mereka saling kenal, sapa, dan mengenal satu sama lain. Hal ini menjadi bahan pertimbangan untuk mencapai tujuan utama, yaitu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan terjaga 24 jam. Keberhasilan SISKAMLING tidak hanya terletak pada pengamanan fisik yang terlihat, tetapi juga pada upaya pencegahan dan sosialisasi akan pentingnya keamanan lingkungan. Warga yang tergabung dalam SISKAMLING secara rutin mengadakan pertemuan untuk membahas strategi pengamanan dan mendengarkan masukan dari anggota-anggota lainnya.

Uraian secara rinci dalam buku ini, memiliki latar belakang serta historis dan tanggung jawab keamanan sosial kemasyarakatan oleh Kepolisian Resort Kepulauan Sula di bawah Komando AKBP. Kodrat Muh Hartanto.,S.I.K mengulas tentang pentingnya SISKAMLING serta catatan tentang kemajuan sistem ini tahun 1970-an. Pada awalnya, SISKAMLING lebih didasarkan pada kepentingan politik, yakni menjaga keamanan saat terjadi perubahan politik yang cukup signifikan. Namun, seiring berjalannya waktu, praktek SISKAMLING semakin meluas dan menjadi kewajiban yang melekat pada setiap warga negara. Penting untuk diingat bahwa keberhasilan SISKAMLING bukan hanya ditentukan oleh partisipasi aktif warga, namun juga dukungan penuh pemerintah dan kepolisian. Kerjasama yang baik antara

masyarakat dan aparat penegak hukum sangat penting dalam menciptakan keberlanjutan program SISKAMLING di berbagai wilayah.

Dengan data dan fakta yang dimiliki saat ini kami sangat optimis bahwa Buku Siskambling Jaga Sula dapat menjadi referensi khusus bagi para peneliti dan akademisi, para pengamat dan aktivis, pejabat pemerintah serta seluruh warga negara yang mencintai aktivitas SISKAMLING sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal mereka serta mencakup pencegahan dan tindakan konkret untuk menjaga keamanan wilayah dan melindungi warga dari ancaman kejahatan.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, partisipasi serta dukungan dalam bentuk data dan informasi dalam penyusunan buku ini, semoga karya ini bisa bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat secara umum dan menjadi referensi dalam penerapan sistem SISKAMLING di Kabupaten Kepulauan Sula, menuju masa depan Sula Bahagia.

Sanana, Februari 2026

Bupati Kepulauan Sula

Hj. Fifian Adeningsi Mus



SAMBUTAN KAPOLDA MALUKU UTARA

"Membangun Keamanan dari Akar Rumput: Refleksi atas Keberhasilan SISKAMLING JAGA SULA"

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.*

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang sangat penting dan inspiratif ini, **“SISKAMLING Jaga Sula: Perpaduan Kearifan Lokal dan Modernitas dalam Mewujudkan Kamtibmas di Kepulauan Sula”** dapat hadir di tengah-tengah kita. Sebagai seorang perwira yang mengemban amanah menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Provinsi Maluku Utara, saya menyambut gembira kehadiran karya tulis yang tidak hanya mendokumentasikan sebuah program, tetapi lebih dari itu, mengangkat filosofi dan model keamanan yang berkelanjutan, partisipatif, dan sarat kearifan lokal.

Buku ini, yang ditulis dengan sangat komprehensif oleh Dr. Sahrul Takim, bukan sekadar laporan aktivitas. Ia adalah sebuah narasi transformatif yang merekam perjalanan sebuah konsep keamanan menjadi gerakan sosial-budaya yang hidup. Melalui telaah mendalam mulai dari kondisi geografis-sosial Kepulauan Sula, dinamika sejarah SISKAMLING,

analisis sosial-budaya, hingga studi kasus lapangan yang empiris, penulis berhasil menunjukkan bahwa “Jaga Sula” adalah jawaban cerdas atas tantangan keamanan di wilayah kepulauan. Ia membuktikan bahwa keamanan yang paling tangguh adalah yang lahir dari kesadaran dan kebersamaan masyarakat itu sendiri, dengan aparat Negara berperan sebagai fasilitator dan penguat.

Manfaat SISKAMLING Jaga Sula: Dari Keterbatasan Menjadi Kekuatan

Kepulauan Sula, dengan karakteristik keterpencilan, keterbatasan akses, dan rasio sumber daya organisasi (SDO) Polri yang tidak ideal, sesungguhnya menggambarkan tantangan klasik keamanan di banyak daerah kepulauan dan terpencil di Indonesia. **Program “Jaga Sula”** yang diinisiasi dan digerakkan dengan sangat baik oleh Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Kodrat Muh Hartanto, S.I.K., bersama seluruh jajaran, telah mengubah keterbatasan tersebut menjadi kekuatan. Buku ini dengan gamblang menunjukkan bagaimana SISKAMLING telah berevolusi dari sekadar “ronda malam” menjadi sebuah sistem nilai dan kontrol sosial yang memperkuat tiga pilar utama:

1. **Modal Sosial (*Social Capital*):** Program ini menghidupkan kembali dan memperkuat jaringan kepercayaan (*trust*), norma sosial (*social norms*), dan solidaritas (gotong royong, bahu bahu, wa lima) yang selama ini menjadi fondasi masyarakat Sula. Keamanan dibangun di atas rasa saling memiliki (*sense of belonging*) dan tanggung jawab moral.
2. **Kemandirian Komunitas (*Community Resilience*):** Masyarakat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada

respons aparat yang sering terkendala jarak, alat gerak dan cuaca. Dengan struktur organisasi yang sederhana namun jelas, penggunaan teknologi komunikasi dasar (HT, grup WhatsApp), dan pendanaan swadaya/desa, tercipta kemandirian dalam pengelolaan keamanan lingkungan.

3. **Sinergi Segitiga Emas:** Buku ini menegaskan keberhasilan yang diraih adalah buah dari kolaborasi erat antara tiga elemen: Aparat Kepolisian (sebagai pendamping, pelatih, dan pengawas hukum), Pemerintah Daerah/Desa (sebagai fasilitator regulasi dan pendanaan), serta Masyarakat dengan Tokohnya (Tokoh Adat, Agama, Pemuda, Perempuan) sebagai pelaku utama dan penjaga norma. Model *co-production of security* ini adalah kunci keberlanjutan.

Data dan grafik yang disajikan, seperti penurunan kasus tawuran (tawuran kampung) dan kejahatan tertentu, peningkatan *clearance rate* penyelesaian kasus, serta testimoni lapangan, bukanlah angka mati. Itu adalah bukti nyata (*evidence-based*) bahwa pendekatan humanis, kultural, dan partisipatif terbukti lebih efektif menciptakan rasa aman yang hakiki dan berkelanjutan dibandingkan pendekatan yang semata-mata represif dan formalistik.

Pelajaran dan Replikasi: “Jaga Sula” sebagai Model Nasional

Keberhasilan SISKAMLING Jaga Sula memberikan pelajaran berharga yang sangat mungkin dan perlu untuk direplikasi, tidak hanya di kabupaten lain di Maluku Utara, tetapi juga di berbagai daerah kepulauan, pesisir, dan pedesaan di Indonesia. Beberapa prinsip kunci yang dapat diadopsi adalah:

1. Pendekatan Berbasis Kearifan Lokal: Setiap daerah memiliki nilai, tradisi, dan struktur sosial yang unik. Keberhasilan “Jaga Sula” berangkat dari pemahaman mendalam terhadap filosofi “Jaga Diri, Jaga Keluarga, Jaga Lingkungan” dan mekanisme adat seperti Maksaira dan Baku Bae. Polri di daerah harus mampu menjadi antropolog sosial, menggali dan menghidupkan nilai-nilai lokal serupa sebagai fondasi program keamanannya.
2. Kepemimpinan yang Melayani dan Memfasilitasi: Peran Kapolres sebagai motor penggerak dan fasilitator, yang turun langsung ke lapangan, membangun kedekatan emosional, dan mendengarkan aspirasi masyarakat, adalah faktor krusial. Kepemimpinan seperti ini perlu diteladani.
3. Integrasi Teknologi Sederhana: Inovasi tidak harus mahal. Pemanfaatan alat komunikasi sederhana (HT), grup media sosial, dan sistem pelaporan berbasis komunitas telah meningkatkan koordinasi dan kecepatan respon secara signifikan.
4. Keberlanjutan melalui Regulasi dan Pendanaan Lokal: Integrasi program ke dalam Perdes, RPJMDes, dan penganggaran APBDes/CSR memastikan bahwa SISKAMLING tidak hanya menjadi proyek temporer, tetapi menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan desa yang berkelanjutan.

Sebagai Kepala Kepolisian Daerah, saya melihat buku ini sebagai salah satu panduan operasional dan sumber inspirasi yang sangat berharga. Saya akan mendorong agar esensi dan model dari “Jaga Sula” dapat dipelajari dan

diadaptasi oleh seluruh Polres di wilayah Maluku Utara, dengan tetap menyesuaikan konteks sosial-budaya setempat. Kita harus bergerak dari paradigma security provider semata menuju security partner yang memberdayakan komunitas.

Akhir kata, saya mengucapkan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Penulis, Dr. Sahrul Takim, Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Kodrat Muh Hartanto, S.I.K. beserta jajaran, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, serta seluruh Tokoh Masyarakat dan Warga Kepulauan Sula yang telah menjadi pelaku sekaligus bukti hidup dari keberhasilan program ini. Semoga buku ini tidak hanya dibaca, tetapi diterapkan, sehingga semangat “Jaga Sula” dapat berkembang menjadi semangat “Jaga Maluku Utara” dan pada akhirnya ikut menciptakan keamanan yang mandiri dan bermartabat di seluruh Nusantara.

Selamat membaca, dan mari kita jadikan karya ini sebagai pijakan untuk membangun keamanan yang lebih manusiawi, kolaboratif, dan berakar pada budaya kita sendiri.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sofifi, Februari 2026
Kapolda Maluku Utara

Irjen Pol Drs Waris Agono M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Sambutan Kapolres Kepulauan Sula	vi
Sambutan Ketua FKUB Provinsi Maluku Utara	ix
Sambutan Bupati Kepulauan Sula	xiv
Sambutan Kapolda Maluku Utara	xvii
Daftar Isi	xxii
Kapolres dan Ide Besar SISKAMLING	xxvi
Selayang Pandang SISKAMLING Jaga Sula	xxX

BAB I Mengapa SISKAMLING Penting untuk Sula 1

A. Kondisi Sosial dan Geografis Kepulauan Sula	2
B. Tantangan Keamanan di Wilayah Kepulauan	9
C. Krisis Kepercayaan terhadap Keamanan Formal dan Lahirnya SISKAMLING sebagai Solusi Komunitas ...	16
D. Tujuan dan Manfaat SISKAMLING Jaga Sula.....	21
E. Fungsi Sosial dan Kultural SISKAMLING.....	26
F. Kerangka Pemikiran dan Analisis Sosial Budaya	32

BAB II Sejarah dan Dinamika SISKAMLING

di Indonesia	39
A. Asal-Usul Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING).....	39
B. Transformasi dan Tantangan Modern	46
C. SISKAMLING di Wilayah Kepulauan: Kondisi Unik	52

BAB III Konteks Sosial Keamanan di Kepulauan Sula....	59
A. Profil Sosial dan Budaya Sula	59
B. Potret Keamanan dan Ketertiban di Kepulauan Sula ...	74
C. Hubungan Sosial dan Kohesi Komunitas.....	86
 BAB IV Jaga Sula: Spirit Keamanan Kolektif	93
A. Makna Filosofis Jaga Sula.....	93
B. Prinsip-prinsip Utama Jaga Sula	99
C. Model Khas: Keamanan Partisipatif Sula	107
 BAB V Dasar Hukum SISKAMLING Jaga Sula.....	116
A. UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1): Fondasi Filosofis dan Konstitusional	117
B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	120
C. Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa	123
D. Perkapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat	127
E. Surat Edaran Mendagri Nomor 300.1.4/e.1/BAK (3 September 2025)	129
 BAB VI Strategi Implementasi	
SISKAMLING Jaga Sula	132
A. Pembangunan Sistem dan Struktur	132
B. Pelibatan Warga dan Lembaga Lokal	134

C. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi	136
D. Pendanaan dan Keberlanjutan Program	137

BAB VII Cerita Lapangan Jaga Sula..... 140

A. Kisah Pos Kamling di Desa Ona Kecamatan Sulabesi	140
B. Gerakan Pemuda “Jaga Laut, Jaga Kampung”	143
C. Kearifan Lokal dalam Menyelesaikan Konflik Sosial	145
D. Sinergi Polisi Masyarakat dan Tokoh Adat	147
E. Siskamling Jaga Sula dan Penekanan Gangguan Kamtibmas di Kecamatan Sulabesi Barat	148
F. Membangun Rasa Aman Bersama: Kisah Inspiratif SIMKAMLING Jaga Sula di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara	156
G. Jaga Sula sebagai Model Keamanan Daerah: Perspektif Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula	166
H. Apa Kata Penerima Manfaat dari Hadirnya SISKAMLING Jaga Sula	176

BAB VIII Refleksi dan Arah Masa Depan 183

A. Pelajaran Penting dari Kegiatan Jaga Sula	183
B. Tantangan dan Adaptasi Masa Depan	185
C. Menuju Model Keamanan Berkelanjutan	187

Sula yang Aman, Sula yang Bersatu	190
A. Ringkasan Nilai-nilai Utama	190
B. Harapan terhadap Pembaca dan Pembuat Kebijakan	192
C. Seruan untuk Membangun “Sula yang Aman, Sula yang Bersatu”	194

DAFTAR PUSTAKA	195
-----------------------------	------------

DAFTAR ISTILAH	204
-----------------------------	------------

Lampiran-lampiran: Membangun Dasar Operasional “Jaga Sula” yang Terukur dan Berkelanjutan	211
A. Peta Wilayah Geografis Kepulauan Sula.....	211
B. Struktur Organisasi Siskamling Jaga Sula.....	214
C. SOP Siskamling Jaga Sula Oleh Polres Kepulauan Sula....	215
D. Contoh SOP Ronda Malam	229
E. Lampiran Peta Sebaran Siskamling & Bhabinkamtibmas Polres Kepulauan Sula	231
F. Lampiran: SOP Penggunaan Alur Layanan 110.....	237
G. Lampiran Dokumentasi Peresmian Siskamling Jaga Sula.....	244

KAPOLRES DAN IDE BESAR SISKAMLING JAGA SULA

Profil AKBP Kodrat Muh Hartanto, S.I.K **Kapolres Kepulauan Sula**

AKBP Kodrat Muh Hartanto, SIK adalah seorang perwira polisi karier yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Sula, Maluku Utara. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang solid, beliau dikenal sebagai sosok pemimpin yang visioner, humanis, dan aplikatif dalam mengelola keamanan serta membangun kemitraan strategis di masyarakat.

Latar Pendidikan dan Karier Kepolisian, Sebagai lulusan akademi kepolisian dengan gelar Sarjana Ilmu Kepolisian (SIK), AKBP Kodrat membawa kemampuan teknis dan wawasan strategis yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Dia memiliki rekam jejak karier yang beragam di berbagai bidang kepolisian, mulai dari intelejen, pemeliharaan keamanan, hingga pembinaan masyarakat. Pengalaman ini membuatnya memahami betul problematika sosial yang kompleks di daerah, terutama daerah kepulauan seperti Sula.

Selain itu, beliau juga sering dipercayakan sebagai inspektur upacara dalam momen-momen penting nasional, seperti peringatan Hari Sumpah Pemuda, yang menunjukkan reputasi dan kredibilitasnya di lingkungan Kepolisian di Wilayah Kerja Hukum Maluku Utara.

Kepemimpinan dan Visi dalam Menjaga Keamanan Kepulauan Sula, Sebagai Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Kodrat Muh Hartanto memimpin dengan pendekatan modern yang berfokus pada penguatan komunitas dan kemitraan. Visi beliau adalah menjadikan keamanan sebagai tanggung jawab kolektif yang dapat dikelola bersama oleh Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan warga.

Salah satu program unggulan di bawah kepemimpinannya adalah pengaktifan kembali SISKAMLING (Sistem Keamanan Lingkungan) melalui gerakan “Jaga Sula.” Ia tidak hanya berperan sebagai pengawas tapi juga sebagai motor penggerak pelatihan keamanan lingkungan, sosialisasi, dan pembentukan pos-pos ronda di beberapa desa penting seperti di Ona, Fukweu, Fagudu, Waibau, Keramat Titdoy dan Falabisahaya. Program ini sangat efektif mengelola keamanan berbasis masyarakat secara berkelanjutan.

Strategi dan Pendekatan Implementasi

AKBP Kodrat dikenal menerapkan strategi implementasi keamanan yang solutif dan mudah dipraktikkan, antara lain:

- a. Membangun Sinergi dan Kemitraan: Mendorong kolaborasi Polri dengan Pemda, Babinsa, tokoh adat, dan elemen pemuda dalam membentuk jejaring keamanan yang kuat di tingkat basis.
- b. Pelatihan Berbasis Partisipasi: Menyelenggarakan pelatihan rutin tentang trik pengamanan lingkungan, penggunaan layanan 110, dan prosedur pelaporan cepat.
- c. Pengawasan dan Evaluasi Berkala: Menginisiasi pengawasan lapangan yang melibatkan masyarakat untuk identifikasi dini potensi gangguan.

- d. Menggunakan Teknologi Sederhana: Memanfaatkan perangkat komunikasi seperti HT (*handy talky*) yang tersebar di pos Siskamling untuk memudahkan koordinasi cepat.
- e. Pendidikan dan Kesadaran Hukum: Aktif memberikan edukasi kerukunan, musyawarah, dan penyuluhan hukum dalam rangka mencegah konflik sosial.

Pendekatan ini tidak hanya mengatasi masalah keamanan sesaat, tapi juga menguatkan fondasi modal sosial dan budaya gotong royong yang sudah ada di Kepulauan Sula, sehingga meningkatkan kualitas keamanan yang berkelanjutan.

Sikap Kepemimpinan dan Karakter Pribadi, Kapolres AKBP Kodrat dikenal sebagai sosok yang tegas namun ramah, dekat dengan masyarakat, serta mau mendengar aspirasi baik langsung dari bawahan, warga Masyarakat maupun pihak wartawan. Ia mengedepankan komunikasi terbuka dan solusi pragmatis dalam menyelesaikan permasalahan keamanan. Dengan tipe seperti inilah yang sangat mendorong dan memotivasi kinerja seluruh anggota kepolisian di Lingkup Polres Kepulauan Sula.

Keteladanan dalam disiplin serta konsistensi dalam menerapkan prinsip profesionalisme menjadikannya figur yang dihormati oleh bawahannya dan masyarakat. Beliau bukan tipe pemimpin yang hanya duduk santai di ruangan, menunggu informasi dari bawahan tetapi jiwa kepedulian dan dedikasinya terbukti dari seringnya beliau turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi keamanan secara langsung dan memastikan program berjalan efektif.

Dampak Nyata Kepemimpinan dan Program SISKAMLING Jaga Sula, Berkat kepemimpinan AKBP Kodrat Muh Hartanto, S.I.K, tingkat gangguan keamanan di Kepulauan Sula secara signifikan menurun. Pelibatan masyarakat dalam Siskamling membuat deteksi dini lebih cepat, sehingga respon aparat menjadi lebih optimal. Program Jaga Sula juga mendorong peningkatan rasa saling percaya antar warga dan antar lembaga keamanan.

Evaluasi rutin dan feedback dari masyarakat memperkaya inovasi teknis program, seperti penguatan operasional pos ronda dan sistem pelaporan berbasis komunitas. Ini membawa Kepulauan Sula menjadi model bagi kabupaten lain dalam penerapan keamanan lingkungan berbasis partisipasi.

SELAYANG PANDANG

SISKAMLING JAGA SULA

Motivasi di Balik Pengaktifan SISKAMLING JAGA SULA

Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING) di Kepulauan Sula tidak terlepas dari sejarah panjang wilayah yang kaya akan budaya dan dinamika sosial. Kepulauan Sula, yang terdiri dari tiga pulau besar utama dan sejumlah pulau kecil, memiliki sejarah pemerintahan yang kompleks, mulai dari masa kesultanan Bacan, pengaruh VOC hingga pembentukan Kabupaten Kepulauan Sula sebagai daerah otonom pada tahun 2003.

Dalam konteks keamanan, wilayah ini memiliki tantangan khas sebagai daerah kepulauan yang rawan terhadap berbagai bentuk gangguan kamtibmas, termasuk perompakan laut yang pernah terjadi secara signifikan pada masa lalu akibat letak geografisnya yang strategis sebagai jalur pelayaran antar wilayah Maluku dan Papua. Ketahanan masyarakat dan kearifan lokal menjadi modal utama dalam menghadapi ancaman tersebut, salah satunya melalui sistem Siskamling yang rawan mengalami pasang surut peran sepanjang sejarah.

Kebijakan keamanan modern yang berorientasi pada pendekatan partisipatif dan berbasis masyarakat muncul sebagai jawaban terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Siskamling di Kepulauan Sula muncul kembali sebagai solusi praktis yang mengedepankan peran serta warga secara aktif

dalam menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan produktif. Hal ini sejalan dengan prinsip menjaga keamanan dari, oleh, dan untuk masyarakat, sebuah konsep yang telah diakui dalam berbagai literatur keamanan komunitas.

AKBP Kodrat Muh. Hartanto, SIK dan Gerakan Revitalisasi SISKAMLING Jaga Sula

Kepemimpinan Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Kodrat Muh. Hartanto, SIK, yang menjabat sejak beberapa tahun terakhir, sangat menentukan kemajuan program Siskamling di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula. Dengan pendekatan humanis dan koordinasi lintas sektor, Kapolres memberikan perhatian besar terhadap penguatan Siskamling, menjadikannya program strategis yang diberi nama “Jaga Sula”.

Melalui program ini, Polres tidak hanya sebagai pengawal keamanan formal, tapi juga fasilitator sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, perangkat desa, tokoh adat dan agama serta masyarakat umum. Di bawah arahan Kapolres, pelatihan-pelatihan rutin, sosialisasi intensif, dan pembentukan pos-pos Siskamling yang terintegrasi secara sistematis dilakukan. Hal ini tidak sekadar menjaga keamanan tapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya keamanan sebagai tanggung jawab Bersama.

Strategi ini juga menanamkan nilai kepedulian sosial dan solidaritas, yang penting untuk mempersempit ruang gerak potensi konflik maupun kejahatan. Kapolres juga mendorong penggunaan teknologi komunikasi sederhana seperti layanan 110 untuk memudahkan koordinasi dan respon cepat terhadap situasi darurat di tingkat lokal.

Strategi Implementasi SISKAMLING Jaga Sula oleh Kapolres Kepulauan Sula

Implementasi Siskamling Jaga Sula didasarkan pada prinsip keharmonisan sosial, partisipasi aktif dan sinergi antar pemangku kepentingan. Secara operasional, strategi ini dapat diterjemahkan dalam beberapa langkah sebagai berikut:

1. **Edukasi dan Sosialisasi Berkelanjutan:**
Masyarakat diberikan pelatihan berkelanjutan mengenai konsep dan praktik keamanan lingkungan, termasuk tata cara ronda malam, pelaporan dini, serta mekanisme pertolongan pertama di tempat kejadian. Sosialisasi dilakukan lewat forum desa, kelompok pemuda, dan pertemuan keagamaan sehingga menyentuh lapisan sosial yang beragam
2. **Pembentukan dan Penataan Pos Siskamling:**
Pos-pos Siskamling dibangun di titik-titik strategis berdasarkan peta kerawanan kamtibmas. Setiap pos dilengkapi buku catatan ronda, alat komunikasi sederhana, serta jadwal patuh bergilir anggota masyarakat. Hal ini membangun tanggung jawab kolektif yang terstruktur dan berkelanjutan.
3. **Kolaborasi dengan Aparat Keamanan dan Pemerintah:**
Polres, Pemda Sula, dandim, perangkat desa, dan unsur masyarakat secara aktif membangun jaringan komunikasi dan aksi bersama, termasuk patroli terpadu dan pengawasan wilayah laut. Ini menguatkan momentum gotong-royong dan mempercepat penyelesaian berbagai gangguan keamanan hari-hari.
4. **Partisipasi Inklusif dan Penguatan Modal Sosial:**
Semua elemen warga dari berbagai usia dan strata sosial terlibat aktif. Penanaman nilai-nilai musyawarah

dan gotong royong menjadi dasar penguatan solidaritas sosial yang meminimalisasi kesalahpahaman dan konflik di masyarakat.

5. Evaluasi Berkala dan Apresiasi:

Dihadirkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang melibatkan perangkat desa dan Polres. Penghargaan kepada lingkungan yang berhasil menjaga keamanan meningkatkan motivasi pelaksanaan dan inovasi dalam pengamanan lokal.

Siskamling Jaga Sula merupakan jawaban efektif yang bersumber dari kearifan lokal sekaligus adaptasi modern terhadap tantangan keamanan masa kini di Kepulauan Sula. Kesuksesan program bergantung pada kolaborasi erat antara Polres, Pemda, dan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Kapolres AKBP Muh. Kodrat Hartanto, SIK telah memposisikan Siskamling bukan hanya sebagai tugas polisi tapi warisan budaya yang perlu dijaga bersama.

BAB I

MENGAPA SISKAMLING PENTING UNTUK SULA

Keamanan adalah fondasi dari kehidupan sosial yang damai. Dalam masyarakat kepulauan seperti Kepulauan Sula, keamanan tidak hanya berarti terbebas dari kejahatan, tetapi juga mencerminkan keteraturan sosial, rasa percaya, dan kebersamaan antarwarga.

SISKAMLING (*Sistem Keamanan Lingkungan*) adalah salah satu bentuk nyata dari keamanan partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi subjek yang berperan aktif menjaga ketertiban. Dalam konteks Kepulauan Sula wilayah dengan karakter sosial yang kuat namun tersebar secara geografis. SISKAMLING bukan sekadar strategi keamanan, melainkan wujud solidaritas sosial.

Di beberapa desa yang telah diaktifkan SISKAMLING, kegiatan ronda malam bukan hanya rutinitas, melainkan simbol moral: bahwa setiap warga memiliki tanggung jawab menjaga “rumah besar” bernama Kepulauan Sula. Nilai inilah yang menjadi inti buku ini menghidupkan kembali makna SISKAMLING sebagai gerakan sosial dan kebudayaan, bukan sekadar sistem.



Gambar: Penandatanganan Surat Edaran Bersama Tentang Pemberitahuan Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula

Sebagaimana dikatakan oleh Budiman dalam *Keamanan Sosial dan Gotong Royong Masyarakat Nusantara*, “rasa aman tidak lahir dari keberadaan aparat, tetapi dari hubungan saling percaya antarwarga.” Prinsip ini menjadi alasan mendasar mengapa SISKAMLING penting bagi masyarakat Kepulauan Sula karena dengan program ini dapat menyatukan aspek keamanan, kebersamaan, dan identitas lokal dalam satu gerakan sosial.¹

A. Kondisi Sosial dan Geografis Kepulauan Sula

1. Sejarah Singkat Pembentukan Kabupaten Kepulauan Sula

Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai daerah otonom berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor 1 Tahun

¹ S. Budiman, *Keamanan Sosial dan Gotong Royong Masyarakat Nusantara*. (Jakarta: Komunika Press, 2021). hlm. 11

2003 , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003 , tanggal 25 Februari 2003. Secara historis , proses perjuangan eksistensi kabupaten ini telah dimulai sejak tahun 1945 ketika Presiden Soekarno berkunjung ke Kabupaten Maluku Utara. Presiden Soekarno saat itu sempat singgah di beberapa wilayah KPS di Maluku Utara, kecuali wilayah KPS Sanana.

Hal ini menyebabkan masyarakat Sula merasa diabaikan oleh pemerintah Maluku Utara sehingga melalui musyawarah rakyat Kepulauan Sula mengutus dua orang yang merupakan putra daerah Sula, yaitu Hj. Adam Yoisangadji dan Yusuf Mayau untuk menemui Presiden Soekarno. Selanjutnya, Presiden mengutus Wakil Presiden untuk menemui masyarakat Maluku Utara dan memenuhi tuntutan pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I atau Provinsi Maluku Utara, serta pembentukan beberapa daerah Tingkat II, termasuk Kabupaten Kepulauan Sula.

Meskipun pada masa itu masyarakat Kepulauan Sula belum secara resmi menuntut pembentukan Kabupaten Kepulauan Sula, karena adanya peristiwa besar yang menyebabkan kondisi NKRI dalam keadaan perang dan operasi militer, aktivis Maluku Utara di Ternate tetap menuntut agar Maluku Utara menjadi daerah Tingkat I. Tuntutan ini berujung pada penangkapan para aktivis.

Akibatnya, hubungan antara Sanana dengan Makassar terputus. Pada tanggal 15 September 1959 berlangsung pertemuan antara Ikatan Keluarga Sula dan beberapa pelajar di Makassar, yang intinya membahas kesulitan yang dihadapi Kepulauan Sula. Atas dasar itu, pada tanggal 29 September 1959, saat Organisasi Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula

(HPMS) didirikan, tokoh-tokoh masyarakat Sula dan para pelajar serta mahasiswa Sula secara resmi mendeklarasikan tuntutan pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Kepulauan Sula.

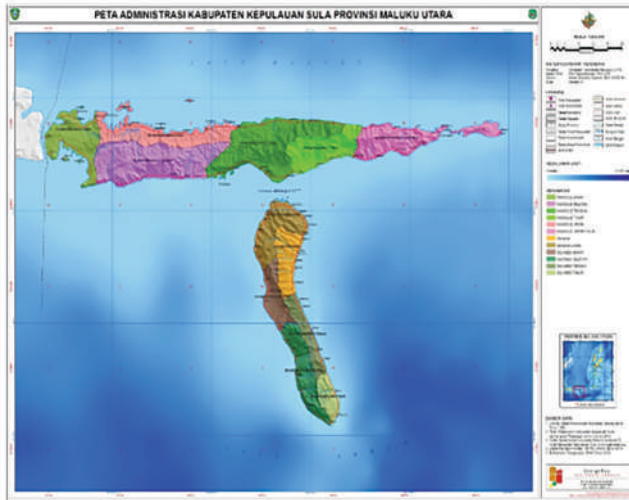
Singkatnya cerita, Pada tanggal 28 Januari 1977, Bupati Maluku Utara, Abdullah Assegaf, dengan persetujuan DPRD Maluku Utara, mengajukan usulan pembentukan empat wilayah, yaitu Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kota Ternate, dalam satu paket ke Gubernur Daerah Tingkat I Maluku. Namun, dari usulan tersebut hanya Kota Ternate yang berhasil dibentuk. Setelah itu, perjuangan terus dilakukan oleh DPRD Kabupaten Maluku Utara dan DPRD Provinsi Maluku Utara dengan mengeluarkan rekomendasi tentang pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula. Perjuangan ini terus berlanjut hingga sesi Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI. Akhirnya, pada Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 27 Januari 2003, Undang-Undang Pembentukan 25 Kabupaten/Kota di 10 Provinsi disahkan, termasuk Kabupaten Kepulauan Sula.²

2. Letak Geografis, Administrasi dan Hubungannya dengan Jaga Sula

Kabupaten Kepulauan Sula secara geografis terletak antara 1°31' –2°33' Lintang Selatan dan 24°06'–126°36' Bujur Timur. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, luas wilayahnya adalah 24.082,3 km² , terdiri dari 12.092,06 km² (50,21 %) daratan dan 11.990,24 km² (49,79 %) perairan . Kabupaten ini berbatasan

2 Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2025-2045, hlm. 48

dengan : Sebelah Utara . Sebelah Selatan : Laut Banda dan / atau Provinsi Maluku . Sebelah Barat : Kabupaten Banggai Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tengah . Sebelah Timur dan Selatan : Kabupaten Halmahera, yang terletak di Provinsi Maluku Utara.³



Gambar Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara

Kepulauan Sula merupakan salah satu wilayah kepulauan strategis di bagian timur Indonesia. Secara administratif, wilayah ini termasuk dalam Provinsi Maluku Utara dan terdiri atas dua pulau besar, yaitu Pulau Mangoli dan Pulau Sulabesi, serta lebih dari pulau kecil lainnya yang sebagian besar belum berpenghuni secara permanen. Kondisi geografis yang tersebar membuat Kepulauan Sula memiliki karakter sosial yang khas: masyarakatnya hidup dalam sistem sosial berbasis laut, adat, dan solidaritas komunal.

3 Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2025-2045, hlm. 49

Secara sosiogeografis, keterpencilan antar-pulau menyebabkan akses transportasi dan komunikasi antarwilayah masih terbatas. Banyak desa utamanya di Pulau Mangoli yang hanya dapat dijangkau melalui perahu kayu kecil (*Long Boat*) dengan waktu tempuh 1–3 jam tergantung kondisi cuaca. Situasi ini menimbulkan konsekuensi sosial terhadap pola interaksi warga. Sebagaimana ditegaskan oleh Suroso dalam *Keamanan Sosial di Wilayah Kepulauan Indonesia*, “semakin terpencar wilayah masyarakat, semakin tinggi pula tingkat kerentanannya terhadap gangguan sosial karena keterbatasan interaksi dan mobilitas antarwarga”.⁴

Berdasarkan data Agregat kependudukan yang telah dimutakhirkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepulauan Sula yang dikenal dengan istilah Data Konsolidasi Bersih (DKB), terlihat perbandingan jumlah penduduk memperlihatkan selisih jumlah penduduk setiap tahunnya. Penduduk Kabupaten Kepulauan Sula yang dipublikasikan pada Sula dalam angka Tahun 2025 berjumlah 101.368 jiwa, Dimana terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 50.777 jiwa dan jumlah Perempuan sebanyak 50.591 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan.⁵ Data pertumbuhan penduduk Kepulauan Sula dari tahun 2008-2025 menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif dengan pertumbuhan penduduk paling tinggi di tahun 2015.

Sebagian besar masyarakat Sula bekerja sebagai nelayan

4 B. Suroso, *Keamanan Sosial di Wilayah Kepulauan Indonesia*. (Surabaya: Humaniora Press. 2020), hlm. 44

5 Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sula, (Semester I Tahun 2025)

tradisional, petani pala, cengkeh, jambu mete, sagu dan kelapa, serta pedagang Kaki Lima. Kegiatan sosial berlangsung dalam ikatan kekeluargaan yang kuat, di mana hubungan sosial antarwarga dibangun di atas prinsip tolong-menolong dan gotong royong. Nilai-nilai ini menjadi inti dari kehidupan komunitas, tercermin dalam ungkapan lokal yakni “*Jaga Sula* yang dimulai dari *Jaga Diri, Jaga Keluarga, Jaga Lingkungan*.” Ungkapan tersebut tidak hanya bermakna moral, tetapi juga simbol kesadaran sosial akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban baik dimulai dari diri, keluarga dan lingkungan sebagai tanggung jawab bersama.



Gambar Hasil Tangkap Nelayan Ikan Roa Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat

Namun demikian, modernisasi dan arus migrasi mulai mengubah pola sosial tradisional tersebut. Generasi muda banyak yang merantau ke Ternate, Ambon, atau Makassar untuk melanjutkan pendidikan dan mencari pekerjaan. Akibatnya, frekuensi interaksi sosial antarwarga di desa mulai menurun. Mahmud dalam *Sosiologi Komunitas Kepulauan* menegaskan bahwa “hilangnya interaksi sosial langsung merupakan ancaman terhadap modal sosial (*social*

capital) masyarakat kepulauan.”⁶ Dalam konteks Sula, fenomena ini terlihat pada berkurangnya kegiatan bersama seperti ronda malam, *Lom Poa Hoi* (kumpul saudara), *Mana Wa Lima* (gotong royong), dan *Makdahi/Maksaira* (pertemuan warga di kantor desa).

Kondisi sosial dan geografis ini menunjukkan bahwa tantangan keamanan di Kepulauan Sula bukan hanya bersifat fisik, melainkan juga sosial-kultural. Wilayah kepulauan yang tersebar, keterbatasan infrastruktur, serta menurunnya partisipasi sosial warga menimbulkan kebutuhan akan sistem keamanan berbasis komunitas. Dari realitas inilah muncul gerakan SISKAMLING Jaga Sula, yang berupaya menghidupkan kembali nilai tradisional gotong royong dan tanggung jawab sosial yang jauh sebelumnya telah diterapkan oleh leluhur orang sula dalam bentuk sistem keamanan partisipatif.

Tabel 1

Distribusi Sosial - Ekonomi Masyarakat di Kepulauan Sula
berdasarkan Survei Sosial:

Kategori Pekerjaan	Persentase (%)	Keterangan Sosial
Nelayan Tradisional	42	Mengandalkan hasil tangkapan laut, sangat bergantung cuaca
Petani (Kelapa, Pala, Cengkeh)	31	Memiliki pola kerja musiman dan kolektif
Pedagang Antar-Pulau	15	Menjalin jaringan sosial lintas pulau
Pegawai Negeri dan Swasta	7	Umumnya berdomisili di Sanana dan Mangoli Utara
Lain-lain (buruh, pengrajin, guru, tokoh adat)	5	Berperan penting dalam pembinaan sosial dan adat

6 Mahmud, R. *Sosiologi Komunitas Kepulauan: Modal Sosial dan Identitas Lokal*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2019), hlm 122

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Sula hidup dalam sektor informal berbasis komunitas. Pola ini memperkuat pentingnya pendekatan sosial dalam menjaga keamanan, karena keamanan di Sula tidak dapat dilepaskan dari jaringan sosial dan solidaritas warga itu sendiri.

B. Tantangan Keamanan di Wilayah Kepulauan

1. Keterbatasan Akses dan Koordinasi

Kondisi geografis Kepulauan Sula yang terdiri atas pulau-pulau kecil membuat koordinasi keamanan menjadi sulit. Secara keseluruhan desa di Daratan pulau Mangoli, mulai dari Desa Waisum Kecamatan Mangoli Utara Timur hingga Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara, hanya dapat dijangkau menggunakan perahu kecil (*Long Boat*) tanpa penerangan malam. Saat terjadi gangguan keamanan seperti pencurian hasil laut atau konflik antarwarga, aparat kepolisian sering terlambat tiba di lokasi karena kendala jarak, transportasi dan cuaca.

Berdasarkan hasil observasi penulis, warga di beberapa desa membentuk sistem keamanan internal berbasis gotong royong. Di Desa Falabisahaya, misalnya, setiap RT memiliki jadwal ronda yang diatur oleh ketua RT. Ronda dilakukan dua kali seminggu dengan rotasi anggota secara bergiliran. Sistem ini terbukti efektif dalam mencegah tindak kriminalitas rumah tangga dan memperkuat rasa kebersamaan antarwarga.



Gambar Patroli Ronda Malam Petugas SISKAMLING dengan
BHABINKAMTIBMAS Desa Falabisahaya

Rachman dalam *Keamanan Komunitas di Era Disrupsi Sosial* menjelaskan bahwa “di wilayah kepulauan, sistem keamanan yang terlalu bergantung pada aparat negara tidak efektif; pendekatan komunitas yang fleksibel dan adaptif justru lebih menjamin rasa aman.” Dengan demikian, tantangan akses dan koordinasi di Kepulauan Sula justru mendorong munculnya inovasi sosial berupa sistem keamanan berbasis komunitas.⁷

2. Keterbatasan Sumber Daya Keamanan

Keterbatasan sumber daya manusia dan logistik merupakan tantangan besar bagi sistem keamanan formal di Kepulauan Sula.

7 D. Rachman, *Keamanan Komunitas di Era Disrupsi Sosial*. (Bandung: Alfabeta 2021), hlm, 78

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, rasio jumlah personel kepolisian terhadap penduduk di Kabupaten Kepulauan Sula adalah 1:1.480, jauh dari standar ideal nasional 1:500. Beberapa desa bahkan hanya dijaga oleh satu atau dua aparat yang merangkap beberapa wilayah sekaligus.⁸

Selain kekurangan personel, sarana komunikasi dan patroli laut juga sangat terbatas. Banyak pos polisi di wilayah pesisir belum memiliki radio komunikasi dan sarana speed patroli. Hal ini menyebabkan aparat sering bergantung pada laporan manual dari masyarakat. Dalam kondisi demikian, keberadaan sistem SISKAMLING menjadi vital untuk mengisi celah koordinasi keamanan.

Tabel 2

Gambaran rasio keamanan di beberapa Kecamatan utama Kepulauan Sula (Data Polres Kepulauan Sula 2025)

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Aparat Keamanan	Rasio Penduduk : Aparat
Sanana	31.565	44	1 : 1156,68
Sulabesi Tengah	7.181		
Sulabesi Timur	3.983		
Sanana Utara	8.165		
Sulabesi Barat	5.524	20	1 : 540,75
Sulabesi Selatan	5.291		

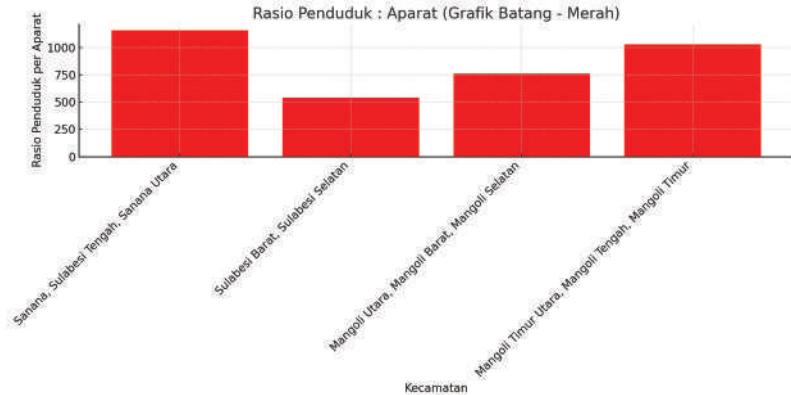
8 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Data Statistik Wilayah dan Keamanan Desa Kepulauan*. (Jakarta: Pusat Data Kemendagri, 2023), hlm. 56

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Aparat Keamanan	Rasio Penduduk : Aparat
Mangoli Utara	8.796	29	1 : 763,41
Mangoli Barat	7.888		
Mangoli Selatan	5.455		
Mangoli Timur Utara	4.369	17	1 : 1030,59
Mangoli Tengah	7.942		
Mangoli Timur	5.209		

kepada publik utamanya bagi pihak POLDA Maluku Utara bahwa bahwa rasio gabungan dari anggota polri pada setiap POLSEK dan SUBSEKTOR serta Bhabinkamtibmas perkecamatan terhadap penduduk dikepulauan Sula sangat tidak seimbang. Kesenjangan ini menuntut masyarakat untuk mengambil peran aktif melalui pendekatan partisipatif berbasis nilai sosial, bukan hanya mengandalkan sistem keamanan formal. Selanjutnya rasio anggota perkecamatan dan jumlah Penduduk pada wilayah kerjanya dapat digambarkan sebagai berikut:

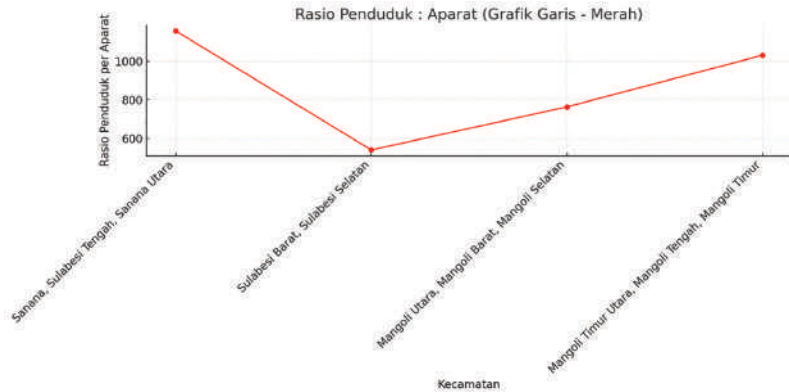
Gambar 1.

Diagram Batang Tentang Rasio Penduduk Perkecamatan dengan distribusi Anggota Polisi per Kecamatan di Kepulauan Sula Berdasarkan data *Polres Kepulauan Sula (2025)*



Gambar 2.

Diagram Grafik Tentang Rasio Penduduk Perkecamatan dengan distribusi Anggota Polisi Perkecamatan di Kepulauan Sula Berdasarkan data *Polres Kepulauan Sula (2025)*



Gambar 3.

Diagram Peta Kabupaten dengan Distribusi Anggota Polisi per Kecamatan di Kepulauan Sula Berdasarkan data *Polres Kepulauan Sula*



Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa distribusi aparat kepolisian belum merata dan jumlahnya terlalu sedikit. Beberapa wilayah memiliki rasio aparat yang jauh lebih kecil, sementara wilayah lain memiliki rasio aparat sangat besar (lebih buruk). Wilayah padat penduduk memiliki beban pengamanan yang berat. Terutama Sanana dan sekitarnya wilayah yang paling membutuhkan penambahan aparat karena aktivitas sosial-ekonomi paling tinggi. Kepulauan Mangoli butuh perhatian khusus. Meskipun penduduk tidak sebesar Sanana, sulitnya akses dan luas wilayah membuat kebutuhan aparat seharusnya lebih tinggi dari data. Rasio sedikit baik ada di Sulabesi Barat-Selatan sedangkan Rasio terburuk ada di Sanana dan Mangoli Timur. Ini menunjukkan ada ketimpangan personel yang harus menjadi perhatian Polres Kepulauan Sula.

3. Menurunnya Solidaritas Sosial

Selain faktor struktural, penurunan solidaritas sosial akibat globalisasi dan digitalisasi juga menjadi tantangan serius. Generasi muda lebih banyak berinteraksi melalui media sosial ketimbang kegiatan sosial nyata seperti gotong royong atau ronda malam. Akibatnya, kohesi sosial melemah, dan rasa tanggung jawab terhadap keamanan kolektif berkurang.

Kadir dalam *Transformasi Sosial di Wilayah Pesisir* menulis bahwa “penurunan solidaritas sosial berbanding lurus dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat pada sistem formal yang tidak selalu adaptif terhadap kebutuhan lokal.”⁹ Kondisi ini menimbulkan fenomena baru di Sula: warga menganggap keamanan sebagai urusan aparat semata, bukan lagi urusan bersama.

Namun demikian, di beberapa wilayah yang masih menjaga tradisi lokal, seperti Desa Ona, Fukweu, Waibau, Fagudu, Keramat Titdoi dan Fallabisahaya, semangat *jaga kampung* masih terpelihara. Kegiatan ronda dilakukan bersamaan dengan musyawarah malam, di mana warga membahas isu sosial seperti perbaikan jalan, konflik kecil, atau kegiatan adat. Tradisi ini menunjukkan bahwa solidaritas sosial masih bisa dipertahankan bila difasilitasi dengan baik oleh struktur sosial dan pemerintahan lokal.

9 Kadir, M *Transformasi Sosial di Wilayah Pesisir dan Kepulauan Indonesia*. (Makassar: Lembaga Maritim Indonesia. 2022), hlm. 56

C. Krisis Kepercayaan terhadap Keamanan Formal dan Lahirnya SISKAMLING sebagai Solusi Komunitas

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem keamanan formal di Kepulauan Sula menjadi salah satu isu sosial paling menonjol dalam dua Tahun terakhir. Banyak warga mengeluhkan lambatnya respon aparat terhadap laporan masyarakat, terutama di daerah terpencil seperti Falabisahaya, Waisakai, dan Wailoba. Ketika kasus peredaran dan konsumsi Minuman Keras, kekerasan seksual atau perkelahian kecil terjadi, sering kali masyarakat memilih menyelesaikannya secara adat ketimbang melapor ke pihak berwenang.

Fenomena ini tidak menunjukkan penolakan terhadap otoritas formal, melainkan ekspresi ketidakpuasan terhadap efektivitas dan kedekatan emosional antara masyarakat dan institusi keamanan. Menurut Fitri dan Hasan dalam *Keamanan Partisipatif di Indonesia Timur*, masyarakat kepulauan umumnya lebih percaya pada mekanisme keamanan informal yang berbasis adat, kepercayaan, dan struktur sosial lokal.¹⁰

Dalam konteks tersebut, SISKAMLING Jaga Sula lahir sebagai bentuk reaksi sosial sekaligus solusi adaptif. Sistem ini tumbuh dari bawah (*bottom-up*) yang digagas bersama Bapak Kapolres Kepulauan Sula AKBP. Kodrat Muh. Hartanto, S.I.K dan bukan program birokrasi dari atas. Masyarakat mendirikan pos ronda, membentuk jadwal jaga bersama, dan membuat sistem pelaporan keamanan antar-RT secara mandiri.

10 A. Fitri, & R. Hasan, *Keamanan Partisipatif di Indonesia Timur: Studi Kasus Wilayah Kepulauan*. (Jakarta: Pustaka Nusantara, 2022).hlm. 63



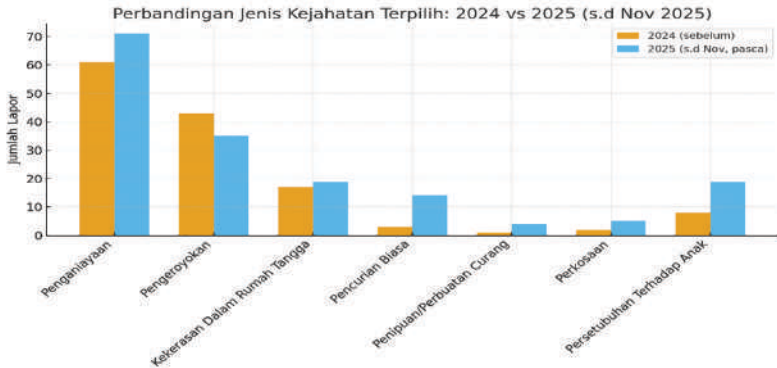
Gambar: Peresmian SISKAMLING di Desa Ona oleh Kapolres Kepulauan Sula

Di Desa Ona, misalnya, sistem ronda berbasis keluarga diberlakukan sejak pertengahan 2025. Tiap keluarga wajib berpartisipasi dalam jadwal jaga selama satu minggu dalam siklus bulanan. Hasil laporan ronda kemudian diserahkan ke kepala desa setiap Jumat atau Minggu malam. Namun berdasarkan data Dari Polres Kepulauan Sula Tahun 2025, kasus kriminalitas di kepulauan sula cenderung fluktuatif.

Berikut grafik tren angka kriminalitas Kepulauan Sula (2023–2025) telah berhasil dibuat berdasarkan data resmi pada Data *Rekapitulasi Kejahatan & Selra Polres Kepulauan Sula*.

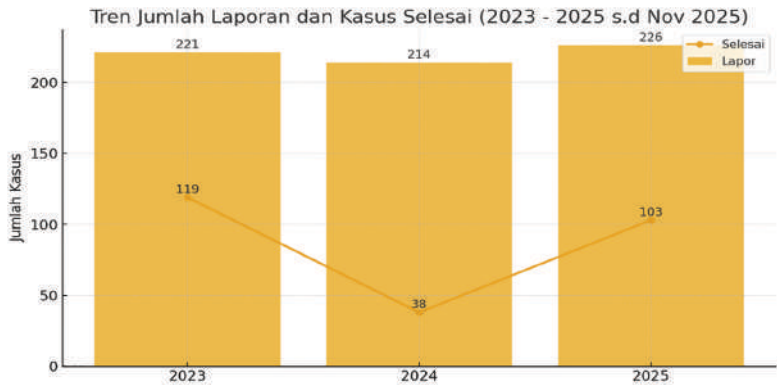
Gambar 4.

Diagram Batang Tentang Prioritas Perbandingan Jenis Kejahatan Kepulauan Sula (2024–2025) Berdasarkan *Rekapitulasi Kejahatan dan Selra Polres Kepulauan Sula*



Gambar 5

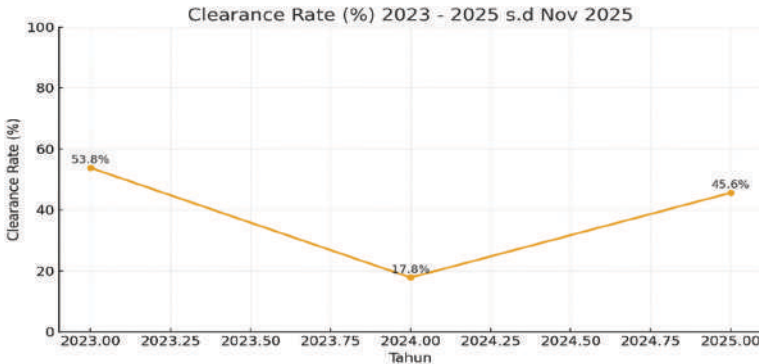
Diagram Garis Tentang Prioritas Perbandingan Jenis Kejahatan Kepulauan Sula (2023-2024–2025) Berdasarkan *Data Polres Kepulauan Sula 2025*



Gambar 6

Kombinasi Diagram Garis Tentang Prioritas Perbandingan
Jenis Kejahatan Kepulauan Sula (2023-2024-2025)

Data Polres Kepulauan Sula 2025



Berdasarkan ringkasan Data Polres Kepulauan sula, Jenis Kejahatan di Kepulauan Sula pada Tahun 2023-2024-2025 maka dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Total laporan (Lapor):
2023 = 221, 2024 = 214, 2025 (s.d. Nov) = 226.
2. Total kasus selesai (Selesai):
2023 = 119, 2024 = 38, 2025 (s.d. Nov) = 103.
3. Clearance rate (Selesai / Lapor):
2023 $\approx$ 53.8%, 2024 $\approx$ 17.8%, 2025 $\approx$ 45.6%.

Setelah penurunan tajam dalam penyelesaian kasus pada 2024, terjadi perbaikan kuat pada 2025 (s.d. November) sehingga clearance rate mendekati level 2023 tanda positif bahwa pengaktifan ulang SISKAMLING dan/atau intervensi kepolisian mulai berfungsi

pada aspek penanganan kasus. Namun jumlah laporan tidak menurun drastis; bahkan 2025 sedikit lebih tinggi dari 2023, menunjukkan pencegahan penuh belum tercapai.

Sesuai Tren visual dan bacaan pada dari grafik tersebut diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Grafik tren Lapor sampai Selesai menonjolkan ketidakseimbangan pada 2024: volume laporan hampir sama dengan 2023, tetapi angka selesai anjlok drastis. Hal ini mengindikasikan masalah kapasitas penyelidikan, administrasi, atau peralihan kebijakan pencatatan di tahun tersebut.
2. Grafik clearance rate memperlihatkan pola “jatuh — bangkit”: 53.8% → 17.8% → 45.6%. Bangkitnya angka pada 2025 adalah sinyal efektivitas langkah korektif (mis. aktivasi SISKAMLING dan operasi prioritas).
3. Perbandingan jenis kejahatan (2024 vs 2025) menunjukkan ragam perubahan: beberapa kejahatan kekerasan seperti *penganiayaan* tetap tinggi; *pencurian biasa* meningkat signifikan di 2025; sedangkan beberapa kejahatan ekonomi (penipuan) relatif kecil namun naik juga.

Jika ketiga grafik ini dibaca secara berurutan, maka pesan utamanya adalah: SISKAMLING bukan hanya membantu menurunkan kejahatan, tetapi juga meningkatkan kualitas penanganan polisi dan keberanian warga untuk melapor. Namun: Untuk menurunkan angka kejadian secara nyata, perlu penguatan pencegahan di tingkat keluarga, ekonomi, dan komunitas, bukan

hanya patroli. Tiga grafik ini memberikan gambaran lengkap bahwa Sula sedang berada dalam fase transisi dari: “Keamanan reaktif” menuju “Keamanan kolaboratif berbasis komunitas.

SISKAMLING Jaga Sula bukan sekadar kegiatan menjaga malam, tetapi sebuah gerakan sosial yang menegaskan kembali prinsip “*Jaga Sula*, dimulai dari *Jaga Diri*, *Jaga Keluarga* dan *Jaga Lingkungan*.” Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya menciptakan keamanan, tetapi juga membangun kepercayaan sosial (*social trust*), memperkuat kohesi antarwarga, dan menghidupkan kembali nilai gotong royong yang mulai pudar.

Dengan demikian, SISKAMLING Jaga Sula berfungsi sebagai jembatan antara sistem keamanan formal dan struktur sosial tradisional. Ia menghadirkan model keamanan yang berakar pada budaya lokal, tetapi tetap sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum modern.

D. Tujuan dan Manfaat SISKAMLING Jaga Sula

SISKAMLING Jaga Sula lahir sebagai respons atas dinamika sosial dan geografis wilayah kepulauan yang unik. Tujuan utama gerakan ini bukan semata-mata menciptakan keamanan fisik, melainkan membangun kesadaran kolektif (*collective awareness*) bahwa keamanan adalah hasil dari partisipasi aktif masyarakat.

Dalam masyarakat kepulauan yang plural, hubungan sosial bersifat komunal dan emosional. Oleh karena itu, sistem keamanan yang efektif tidak dapat hanya bergantung pada otoritas formal, tetapi

harus melibatkan warga secara langsung. SISKAMLING menjadi bentuk konkret dari konsep keamanan partisipatif (*Participatory Security*), di mana warga bukan objek kebijakan, melainkan subjek aktif dalam menjaga ketertiban sosial.

1. Membangun Kesadaran Kolektif tentang Keamanan Partisipatif

Dalam struktur sosial Sula, nilai-nilai seperti *baku tolong* (*Wa Lima*), *gotong royong* (*Bau Bar*), dan *jaga kampung* telah menjadi landasan moral kehidupan sehari-hari. Namun, modernisasi dan urbanisasi menyebabkan nilai-nilai ini mengalami kemunduran. Masyarakat cenderung menyerahkan tanggung jawab keamanan kepada negara, sementara kontrol sosial internal semakin melemah.¹¹

SISKAMLING Jaga Sula berupaya mengembalikan keseimbangan tersebut dengan memperkuat konsep keamanan berbasis masyarakat (*community-based security*). Dalam pendekatan ini, keamanan dipahami sebagai proses sosial yang tumbuh dari bawah atau kesadaran yang berakar langsung dari hati rakyat sula, bukan hasil perintah dari atas.

Menurut Ritzer, masyarakat dengan tingkat partisipasi sosial tinggi memiliki kemampuan lebih besar dalam membentuk sistem kontrol sosial informal yang efektif. Dengan demikian, kegiatan ronda, musyawarah malam, dan jaga pos bukan sekadar rutinitas,

11 M. Latif, *Modal Sosial dan Keamanan Komunitas di Wilayah Timur Indonesia*. (Makassar: LIPI Press. 2020), hlm. 54

tetapi sarana untuk memperkuat norma dan solidaritas warga.¹²

Sebagaimana dicatat dalam amatan penulis, di beberapa desa seperti Desa Waibau dan Fagudu, pelaksanaan SISKAMLING berperan ganda: menjaga keamanan sekaligus memperkuat komunikasi sosial antarwarga. Warga saling bertukar informasi, membicarakan masalah lingkungan, hingga membahas rencana kerja bakti desa. Kegiatan ini membangun rasa kebersamaan yang menjadi *modal sosial utama (social capital)* dalam mempertahankan stabilitas sosial.¹³



Gambar: Tindak Lanjut Kegiatan Lintas Sektor dalam Menjaga Keamanan dan Komunikasi Sosial di Desa Waibau Kecamatan Sanana

12 G. Ritzer, *Sociological Theory*. (New York: McGraw-Hill. 2010), hlm. 203

13 Putnam, Robert D. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. (Princeton: Princeton University Press, 1993). hlm. 167

Latif menjelaskan bahwa masyarakat dengan tingkat kepercayaan sosial tinggi cenderung memiliki tingkat kriminalitas lebih rendah karena “kehadiran kontrol sosial alami yang tumbuh dari interaksi sosial sehari-hari.”¹⁴ Dalam konteks ini, SISKAMLING bukan sekadar sistem keamanan, melainkan wadah edukatif dan transformatif untuk menanamkan kembali nilai-nilai tanggung jawab sosial dan partisipasi warga.

2. Memberi Arah Kebijakan dan Inspirasi Gerakan Sosial

Selain fungsi sosial, SISKAMLING Jaga Sula juga memiliki nilai strategis sebagai model kebijakan keamanan partisipatif di tingkat lokal. Pemerintah daerah Kepulauan Sula menghadapi tantangan unik: wilayah yang tersebar, sarana terbatas, dan heterogenitas sosial yang tinggi. Dalam konteks tersebut, pendekatan keamanan berbasis komunitas menjadi alternatif yang efektif dan berkelanjutan.¹⁵

SISKAMLING dapat menjadi dasar perumusan kebijakan publik berbasis masyarakat yang menekankan sinergi antara aparat formal dan lembaga sosial lokal. Program seperti Forum Komunikasi Keamanan Desa (FKKD) dapat dijadikan wadah koordinasi antara kepala desa, tokoh adat, dan aparat keamanan.

14 M. Latif, *Modal Sosial dan Keamanan Komunitas di Wilayah Timur Indonesia*. (Makassar: LIPI Press. 2020), lm. 54

15 D. Heriyanto, *Pemberdayaan Komunitas dalam Ketahanan Sosial*. (Bandung: Humaniora. 2019), hlm. 88

Berdasarkan rekomendasi studi sosial penulis, strategi penguatan SISKAMLING Jaga Sula dapat dilakukan melalui tiga langkah utama:

- a. Pelibatan generasi muda dan tokoh adat. Pemuda berperan dalam ronda dan penggunaan teknologi komunikasi, sedangkan tokoh adat sula berfungsi sebagai penasehat moral dan pengendali norma sosial.
- b. Pemanfaatan teknologi digital sederhana. Pembuatan grup WhatsApp antar-RT atau penggunaan *Handy Talk* (HT) dapat mempercepat pelaporan insiden keamanan.
- c. Integrasi SISKAMLING dengan kegiatan sosial. Misalnya, ronda digabung dengan kegiatan kebersihan lingkungan, pengajian, atau rapat desa.

Melalui langkah-langkah ini, sistem keamanan tidak hanya menghasilkan rasa aman (*sense of safety*), tetapi juga membangun kemandirian sosial (*social self reliance*). Sebagaimana dikemukakan, “pembangunan keamanan yang berkelanjutan harus melibatkan masyarakat sebagai mitra, bukan objek.”¹⁶ Prinsip inilah yang menjadi dasar filosofis SISKAMLING Jaga Sula membangun keamanan dengan kepercayaan dan kebersamaan.

16 D. Heriyanto, *Pemberdayaan Komunitas dalam Ketahanan Sosial*. (Bandung: Humaniora. 2019), hlm. 88

E. Fungsi Sosial dan Kultural SISKAMLING

1. Gotong Royong dan Nilai Kolektivitas

SISKAMLING bukan sekadar mekanisme keamanan fisik, melainkan cerminan dari nilai kolektivitas dan gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Di Kepulauan Sula, semangat ini termanifestasi dalam konsep *Jaga Sula*, yaitu menjaga keamanan dengan kesadaran moral bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama.

Menurut Koentjaraningrat, gotong royong adalah inti dari moralitas sosial Indonesia, yang menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan komunitas.¹⁷ Dalam konteks ini, SISKAMLING menjadi arena di mana warga mengekspresikan solidaritas sosial secara nyata.

Putnam menekankan bahwa modal sosial berupa kepercayaan, jaringan, dan norma timbal balik merupakan fondasi dari efektivitas sosial suatu komunitas.¹⁸ Ketika warga sula berjaga bersama di pos ronda, mereka tidak hanya menjaga keamanan fisik, tetapi juga memelihara hubungan sosial dan membangun kepercayaan horizontal.

17 Koentjaraningrat. *Kebudayaan dan Masyarakat di Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka 2002), hlm. 112

18 R. D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. (New York: Simon & Schuster. 2000), hlm 167



Gambar Diskusi Masyarakat Desa Ona yang terbangun
Saat adanya Kegiatan SISKAMLING

Amatan lapangan dari penulis di Sanana menunjukkan bahwa pos ronda di beberapa Desa yang telah aktif SISKAMLINGnya maupun yang belum terlihat Pos Kamling juga berfungsi sebagai ruang dialog sosial. Warga berdiskusi mengenai isu lokal, berbagi kabar tentang panen hasil pertanian dan nelayan, hingga membicarakan pendidikan anak-anak. Aktivitas ini memperkuat solidaritas dan memperkecil jarak sosial antarwarga.

Kearifan lokal Masyarakat Sula memperkaya nilai ini. Dalam bahasa adat, istilah “*jaga*” tidak hanya berarti menjaga dari bahaya, tetapi juga menjaga kehormatan, keseimbangan, dan harmoni sosial. Tradisi saling menegur dan mengingatkan antarwarga menjadi bagian dari mekanisme sosial yang memperkuat kontrol moral. Geertz menyebut bahwa sistem sosial desa Indonesia dibangun atas

rasa tanggung jawab moral dan solidaritas horizontal, yang terlihat jelas dalam praktik *Jaga Sula*.¹⁹

2. SISKAMLING sebagai Alat Kontrol Sosial dan Penguat Solidaritas

Selain fungsi kolektif, SISKAMLING juga berperan sebagai alat kontrol sosial informal (*informal social control*). Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat menegakkan norma sosial berupa kebiasaan yang terbangun secara turun-temurun tanpa harus mengandalkan sanksi formal negara.

Durkheim dalam *The Division of Labor in Society* menjelaskan bahwa keteraturan sosial (*social order*) bergantung pada solidaritas moral, bukan semata pada hukum.²⁰ Dalam konteks Sula, tokoh adat dan pemuka agama yang dalam penyebutan masyarakat sula dikenal dengan istilah (hakim syara dan hakim polisi) memainkan peran penting sebagai penjaga norma moral di dalam SISKAMLING. Mereka menjadi mediator dalam penyelesaian konflik kecil, sekaligus pengingat nilai tanggung jawab bersama.

Sebagai contoh, di Desa Fagudu, ketika terjadi perselisihan kecil antara pemuda, persoalan diselesaikan di pos ronda melalui musyawarah yang difasilitasi Kepala Desa, pihak Kepolisian, TNI dan tokoh agama. Proses ini memperlihatkan bahwa SISKAMLING berfungsi sebagai lembaga sosial yang menumbuhkan dialog dan

19 Clifford Geertz, *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*. (Berkeley: University of California Press, 1962), hlm. 48

20 Emile Durkheim, *The Division of Labour in Society*. (New York: Free Press, 1893), hlm. 115

rekonsiliasi ketimbang jalur litigasi.

Selain itu, SISKAMLING juga menjadi sarana pendidikan sosial lintas generasi. Pemuda yang berpartisipasi dalam ronda belajar langsung dari orang tua baik dalam diskusi lepas maupun melalui penanganan dan penyelesaian masalah disanan terdapat pembelajaran tentang nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial.

Dalam perspektif sosiologi pendidikan, kegiatan semacam ini termasuk dalam *hidden curriculum* pendidikan nilai yang ditransmisikan melalui praktik sosial sehari-hari.. Oleh karena itu, SISKAMLING tidak hanya berfungsi menjaga keamanan, tetapi juga menanamkan karakter sosial dan kebangsaan.

Tabel 3

Hasil survei terbatas (2025) mengenai persepsi warga terhadap manfaat SISKAMLING di tiga kecamatan utama Kepulauan Sula yakni Kecamatan Sanana, Sulabesi Barat dan Mangoli Utara:

Aspek Sosial	Sanana (%)	Mangoli Timur (%)	Mangoli Utara (%)	Rata-rata (%)
Rasa Aman Meningkat	87	82	78	82.3
Solidaritas Warga Menguat	84	80	76	80.0
Konflik Antarwarga Menurun	79	73	70	74.0
Partisipasi Sosial Meningkat	88	83	77	82.7

Hasil di atas menunjukkan bahwa implementasi SISKAMLING berpengaruh langsung terhadap penguatan rasa aman dan solidaritas sosial. Dengan kata lain, keberadaan pos ronda bukan hanya simbol fisik keamanan, tetapi titik temu sosial yang memperkuat jaringan kepercayaan antarwarga.

3. SISKAMLING di Era Modern: Relevansi dan Tantangan

a. Pergeseran Nilai Sosial

Seiring dengan modernisasi dan urbanisasi, praktik SISKAMLING menghadapi tantangan serius berupa pergeseran nilai sosial. Masyarakat modern semakin sibuk dengan aktivitas ekonomi, sementara interaksi sosial langsung semakin jarang terjadi.

Bauman dalam *Liquid Modernity* menyebut masyarakat modern sebagai *liquid society*, di mana ikatan sosial bersifat cair dan mudah berubah. Akibatnya, kegiatan sosial seperti ronda malam dianggap tidak efisien atau ketinggalan zaman.²¹

Namun, masyarakat Sula memiliki keunggulan kultural berupa nilai “Jaga” yang kuat. Nilai ini dapat dijadikan landasan untuk menyesuaikan praktik SISKAMLING dengan konteks modern. Misalnya, penggunaan teknologi digital lokal seperti grup WhatsApp desa, sistem pelaporan berbasis SMS, atau siaran radio komunitas dapat memperkuat efektivitas ronda tanpa menghapus nilai tradisionalnya.

21 Zygmunt Bauman, *Liquid Modernity*. (Cambridge: Polity Press, 2001). hlm. 67

b. Masalah Partisipasi dan Kepedulian Warga

Masalah partisipasi merupakan persoalan klasik dalam sistem keamanan berbasis masyarakat. Banyak warga yang enggan ikut ronda karena faktor waktu, pekerjaan, atau persepsi bahwa kegiatan tersebut sudah tidak relevan.

Solusinya adalah membangun kembali rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap sistem keamanan. Kegiatan SISKAMLING dapat diintegrasikan dengan aktivitas sosial lain seperti pengajian malam, kerja bakti, pelatihan tanggap bencana, atau diskusi pendidikan anak muda. Dengan cara ini, warga merasa bahwa SISKAMLING adalah bagian dari kehidupan sosial mereka, bukan beban tambahan.

Selain itu, penting untuk melibatkan kelompok sosial berpengaruh seperti perempuan, guru, tokoh pemuda, para pengemudi mobil dan motor laut, tokoh agama serta tokoh adat. Perempuan dapat berperan dalam logistik dan sistem informasi keamanan, sementara guru, tokoh agama, pemuda dan tokoh adat memperkuat dimensi edukatif dan moral sistem tersebut.

Seperti ditegaskan oleh Fukuyama, kepercayaan sosial (*trust*) merupakan prasyarat utama bagi terbentuknya kerja sama sosial yang berkelanjutan.²² Tanpa rasa memiliki dan kepercayaan, sistem keamanan berbasis komunitas tidak akan bertahan lama.

22 F. Fukuyama, *Social Capital and Civil Society*. (Washington DC: IMF Institute 2000), hlm. 26

Dengan demikian, tantangan utama SISKAMLING Jaga Sula di era modern bukan pada aspek teknis, tetapi pada pemeliharaan nilai dan partisipasi sosial. Keamanan yang sejati lahir dari kesadaran moral bersama bahwa menjaga kampung berarti menjaga kehidupan sosial itu sendiri.

F. Kerangka Pemikiran dan Analisis Sosial Budaya

SISKAMLING Jaga Sula tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk kebijakan keamanan lingkungan, melainkan sebagai fenomena sosial-budaya yang kompleks, yang berakar pada sejarah gotong royong, nilai moral masyarakat kepulauan, serta dinamika hubungan negara dan warga.

1. Perspektif Teoretis: Keamanan sebagai Konstruksi Sosial

Dalam paradigma sosiologi kontemporer, keamanan tidak semata-mata dilihat sebagai kondisi bebas dari ancaman, tetapi sebagai hasil konstruksi sosial yang dibangun melalui interaksi antaraktor. Sebab sistem sosial terbentuk melalui praktik berulang (*structuration*), di mana tindakan individu turut memperkuat struktur sosial.

Dengan demikian, kegiatan ronda malam di Kepulauan Sula, pembagian jadwal jaga, dan rapat keamanan RT merupakan bentuk *reproduction of social structure* proses berulang yang memperkuat norma keamanan lokal.

Durkheim menegaskan bahwa dalam masyarakat dengan solidaritas mekanik, keteraturan sosial dijaga oleh kesadaran kolektif yang kuat.²³ Hal ini tampak jelas dalam praktik *Jaga Sula*, di mana warga mematuhi aturan ronda bukan karena paksaan hukum, melainkan karena rasa tanggung jawab moral kepada komunitas dan keselamatan warga yang berada dalam Desa tertentu.

Selanjutnya perlu ditegaskan bahwa pentingnya ruang publik (*public sphere*) sebagai tempat warga berdialog secara rasional untuk mencapai kesepahaman sosial menempati posisi yang sangat penting ditengah lajunya penyebaran informasi. Pos ronda dalam konteks Sula berfungsi sebagai “mikro ruang publik,” tempat warga membicarakan masalah sosial, memediasi konflik, dan membangun keputusan kolektif.

Dengan demikian, maka dengan pengaktifan Kembali SISKAMLING Jaga Sula dapat dipandang sebagai praktik sosial yang menggabungkan struktur formal (aturan negara) dengan struktur informal (nilai budaya lokal) dalam satu kesatuan sistem keamanan partisipatif.

2. Struktur Sosial dan Modal Sosial dalam Implementasi SISKAMLING

Dalam kerangka teori *social capital* yang dikembangkan oleh Putnam, keberhasilan suatu komunitas dalam menjaga stabilitas sosial sangat bergantung pada tingkat kepercayaan (*trust*), norma,

23 Emile Durkheim, *The Division of Labour in Society*. (New York: Free Press, 1893), hlm. 115

dan jaringan sosial (*network*) antarwarga.²⁴ SISKAMLING Jaga Sula memanfaatkan ketiganya secara sinergis. Di tingkat RT dan dusun, jaringan sosial tradisional seperti Komunitas Lintas Profesi dan Komunitas Lain seperti, *kelompok nelayan*, *kelompok tani*, dan *majelis adat* menjadi basis pelaksanaan kegiatan keamanan.

Tabel 4

Hasil pengamatan sosial tentang Sumber Modal Sosial Utama dalam implementasi SISKAMLING di Kepulauan Sula:

Jenis Modal Sosial	Contoh Nyata di Lapangan	Pengaruh terhadap Keamanan Sosial
Kepercayaan Sosial (<i>Trust</i>)	Warga saling menitipkan rumah saat ke laut	Meningkatkan rasa aman dan solidaritas
Norma Sosial (<i>Social Norms</i>)	Kesepakatan tak tertulis untuk tidak mabuk di pos ronda	Menekan potensi konflik sosial
Jaringan Sosial (<i>Networks</i>)	Hubungan antar keluarga dan kelompok nelayan	Mempercepat penyebaran informasi keamanan
Partisipasi Sosial	Jadwal ronda bergilir tiap RT	Memastikan keterlibatan seluruh lapisan warga

Modal sosial tersebut memperlihatkan bahwa keamanan di Sula lebih banyak bersumber dari kekuatan komunitas ketimbang kekuatan koersif negara. Seperti disampaikan Fukuyama, masyarakat yang kaya akan kepercayaan sosial dapat mengurangi kebutuhan terhadap kontrol formal.²⁵

24 R. D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. (New York: Simon & Schuster. 2000), hlm. 167

25 F. Fukuyama, *Social Capital and Civil Society*. (Washington DC: IMF Institute 2000), hlm. 26

Dalam praktiknya, SISKAMLING menjadi wahana reproduksi modal sosial. Proses interaksi rutin di pos ronda memperkuat keakraban, menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama, dan memelihara identitas lokal.

3. Relasi Negara dan Warga: Dari Ketergantungan ke Kemandirian

Dalam konteks *governance modern*, peran negara bergeser dari pelaku tunggal menjadi fasilitator. Paradigma ini dikenal sebagai *collaborative governance*, di mana pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas lokal bekerja sama dalam penyelenggaraan layanan publik.

Penerapan SISKAMLING Jaga Sula merepresentasikan model ini secara lokal. Polres Kepulauan Sula dan Pemerintah Daerah Kepulauan Sula menyediakan kerangka hukum dan fasilitas dasar (lampu jalan, pos ronda, seragam linmas dan alat komunikasi), sementara masyarakat menjalankan fungsi sosial dan moralnya secara mandiri.



Gambar Kolaborasi Masyarakat dan Polsek Sulabarat dalam Rangka
Membangun Kemandirian Sosial

Model kolaboratif ini memperkuat kemandirian sosial dan mengurangi ketergantungan warga terhadap aparat keamanan. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga produsen keamanan sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa peran sosial tidak terbatas pada laki-laki atau aparat keamanan, melainkan lintas gender dan generasi. Semuanya memperkuat anggapan bahwa pendidikan sosial paling efektif ketika berlangsung dalam komunitas, bukan di ruang kelas.

4. Integrasi Nilai Lokal dan Sistem Modern

Keberhasilan SISKAMLING Jaga Sula tidak lepas dari kemampuannya mengintegrasikan nilai tradisional (adat) dengan sistem modern (pemerintahan). Dalam konteks kebudayaan Sula,

nilai “*jaga*” memiliki makna spiritual dan moral yang mendalam meliputi menjaga diri, menjaga kehormatan komunitas (lingkungan) dan menjaga Lingkungan.



Gambar Pelatihan Peningkatan Kualitas Aparat SISKAMLING
Desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah

Konsep ini selaras dengan teori Clifford Geertz tentang *cultural system as meaning*, di mana tindakan sosial memperoleh makna dari sistem simbolik yang hidup di masyarakat.²⁶

Dengan demikian, kegiatan ronda bukan sekadar rutinitas keamanan, tetapi ritual sosial yang memperbarui makna kebersamaan. Ketika warga berkumpul di pos ronda, mereka sedang memperkuat *ikatan simbolik* yang meneguhkan identitas mereka sebagai sesama orang Sula.

26 Clifford Geertz, *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*. (Berkeley: University of California Press, 1962), hlm. 48

Integrasi nilai lokal dengan sistem formal negara menjadi kunci keberlanjutan program. Pemerintah daerah yang memahami kearifan lokal cenderung lebih berhasil dalam membangun kepercayaan sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Nurcholish Madjid, pembangunan sosial hanya bermakna jika berpijak pada nilai-nilai budaya masyarakat sendiri.²⁷

Berdasarkan analisis sosial dan empiris di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. SISKAMLING Jaga Sula merupakan model keamanan partisipatif berbasis nilai lokal, yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam menjaga ketertiban sosial.
- b. Modal sosial (trust, norma, dan jaringan) menjadi kekuatan utama yang menopang keberhasilan sistem ini, lebih dari sekadar dukungan teknis negara.
- c. Integrasi nilai budaya dan kebijakan publik memungkinkan sistem keamanan ini tetap relevan di tengah perubahan sosial.
- d. Tantangan ke depan terletak pada upaya menjaga partisipasi generasi muda, memperluas jaringan sosial digital, dan mengadaptasi nilai *Jaga* ke dalam konteks modernisasi.

Dengan demikian, SISKAMLING Jaga Sula bukan hanya model keamanan lokal, tetapi juga warisan sosial-budaya yang meneguhkan jati diri kepulauan Indonesia.

27 Nurcholish Madjid. *Etika Sosial dan Spiritualitas Nusantara*. (Yogyakarta: LKIS. 2003), hlm. 59

BAB II

SEJARAH DAN DINAMIKA SISKAMLING DI INDONESIA

A. Asal-Usul Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING)

1. Dari Ronda Tradisional ke Sistem Formal

Sejarah panjang Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING) di Indonesia sesungguhnya berakar kuat pada tradisi sosial dan budaya masyarakat Nusantara yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, gotong royong, serta tanggung jawab kolektif terhadap keamanan lingkungan. Sebelum istilah “SISKAMLING” diperkenalkan secara formal oleh negara, praktik menjaga keamanan secara bergiliran telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

Di Jawa dikenal tradisi *ronda malam*, suatu kegiatan berjaga secara bergilir oleh warga kampung pada malam hari untuk menjaga keamanan lingkungan dari gangguan atau ancaman kriminalitas. Di Sulawesi, dikenal istilah *mapalus jaga* sebuah bentuk kerja sama sosial yang bukan hanya bertujuan menjaga keamanan fisik, tetapi juga memperkuat relasi sosial antarwarga.²⁸ Di Maluku, dikenal dengan istilah *jaga kampung*, yang di dalamnya terdapat tanggung

28 Z. Nasution, *Sejarah Sosial Keamanan Indonesia*. (Jakarta: LP3ES. 1998), hlm. 33

jawab moral untuk menjaga kehormatan kolektif kampung. Sementara berdasarkan informasi yang penulis telusuri di Kepulauan Sula, praktik ini dikenal dengan sebutan *baronda baku jaga*, yang bermakna “keliling dan saling menjaga” antara satu warga dengan yang lain. Semua bentuk lokal tersebut memiliki substansi yang sama: keamanan adalah hasil partisipasi sosial, bukan sekadar tugas aparat negara.

Pada masa pra-kolonial, sistem jaga malam ini merupakan bagian integral dari struktur adat. Setiap kepala keluarga memiliki tanggung jawab bergilir untuk menjaga keamanan kampung. Para penjaga ronda tidak hanya berfungsi sebagai pengawas keamanan, tetapi juga sebagai penjaga moral masyarakat. Mereka sering kali berperan sebagai mediator dalam konflik kecil antarkeluarga, pengingat nilai-nilai adat, dan penghubung sosial yang menjaga harmoni komunitas.²⁹

Ketika masa kolonial Belanda tiba, praktik ronda mulai diinstitusionalisasi melalui kebijakan *wijkstelsel* atau sistem pembagian wilayah administratif, terutama di kota-kota pelabuhan seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya.³⁰ Dalam sistem ini, setiap wilayah diwajibkan memiliki penjaga malam (*wijkwacht*) yang melapor kepada pejabat kolonial. Walaupun pengawasan lebih bersifat administratif, masyarakat tetap mempertahankan semangat partisipatifnya. Pengaruh kebijakan kolonial tersebut justru

29 Koentjaraningrat. *Kebudayaan dan Masyarakat di Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka 2002), hlm. 112

30 B.Suyanto, *Sosiologi Ketertiban Sosial Indonesia*. (Yogyakarta: Tiara Wacana. 2005), hlm. 69

menegaskan bahwa sistem keamanan berbasis masyarakat memiliki efektivitas yang tidak dimiliki oleh sistem militer formal.

Pasca-kemerdekaan, khususnya pada dekade 1960-an hingga 1980-an, SISKAMLING mengalami transformasi besar. Pemerintah Indonesia melihat pentingnya keamanan sosial sebagai bagian dari stabilitas nasional. Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 1980, pemerintah menetapkan SISKAMLING sebagai sistem keamanan lingkungan berbasis masyarakat, yang berfungsi sebagai upaya pencegahan dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban.³¹ Kebijakan ini memperkuat pelaksanaan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.³²

Dengan demikian, SISKAMLING bukan sekadar mekanisme pengawasan lingkungan, tetapi juga wujud konkret partisipasi warga dalam bela negara. Sebagaimana dijelaskan oleh Nasution dalam M. Abdullah, SISKAMLING adalah bentuk modern dari kearifan lokal yang telah berumur ratusan tahun, sebuah sistem sosial yang menolak pasif terhadap ancaman.³³ Pernyataan ini menegaskan bahwa SISKAMLING lahir bukan dari instruksi negara semata, melainkan dari praktik sosial yang telah lama hidup dalam budaya gotong royong masyarakat Indonesia.

31 A. Widodo, *Keamanan Digital dan Partisipasi Sosial Masyarakat Desa*. (Surabaya: Airlangga University Press. 2021), hlm.44

32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1

33 M. Abdullah, *Adat dan Ketertiban Sosial di Indonesia Timur*. (Makassar: Pustaka Timur Nusantara. 2018), hlm.43

Dalam konteks Kepulauan Sula, semangat partisipatif ini masih hidup dalam tradisi *baku jaga kampung*. Setiap warga memiliki kesadaran moral untuk ikut serta menjaga keamanan lingkungan, terutama saat malam hari atau ketika kampung sedang mengadakan hajatan besar. Di beberapa desa, seperti di Waibau, Fagudu, Fokalik, Ona, Keramat Titdoi dan Falabisahaya, kegiatan ronda juga terkadang dilakukan dengan sistem rotasi berdasarkan kelompok keluarga besar (soa). Penjagaan dilakukan di beberapa titik penting, seperti pelabuhan, rumah ibadah, dan jalan utama dan kantor desa. Sistem ini bukan hanya efektif dalam menjaga keamanan fisik, tetapi juga memperkuat jaringan sosial antarwarga.



Gambar Semangat *Maksaira* Bermusyawarah Warga Desa Kabau Pantai
Kecamatan Sulabesi Barat

Praktik ini memperlihatkan bahwa esensi SISKAMLING sejatinya adalah rasa memiliki terhadap lingkungan sosial. Masyarakat tidak menunggu instruksi formal, tetapi bergerak karena dorongan solidaritas dan nilai adat. SISKAMLING di Sula dengan demikian tidak hanya sistem keamanan, tetapi juga sistem sosial yang menjaga tatanan moral dan harmoni masyarakat.

2. Nilai Gotong Royong dan Solidaritas Sosial dalam Sejarah Nusantara

Gotong royong merupakan nilai sosial yang paling fundamental dalam kebudayaan Indonesia. Ia bukan sekadar bentuk kerja sama, tetapi juga sistem moral yang mengikat individu dalam kolektivitas sosial. Dalam konteks keamanan, gotong royong menegaskan bahwa menjaga ketertiban lingkungan adalah tanggung jawab bersama seluruh warga masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Koentjaraningrat, *Gotong royong adalah moralitas sosial bangsa yang mempersatukan individu ke dalam struktur kolektif*.³⁴ Artinya, masyarakat Indonesia secara historis telah memiliki sistem nilai yang menolak individualisme ekstrem. Dalam konteks kehidupan kampung di Kepulauan Sula, bila satu rumah mengalami musibah, seluruh warga merasa ikut bertanggung jawab.

34 Koentjaraningrat. *Kebudayaan dan Masyarakat di Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka 2002), hlm.123

Dalam sejarah masyarakat agraris Nusantara, gotong royong tidak hanya diwujudkan dalam kegiatan ekonomi seperti menanam padi atau membangun rumah (*sambatan*), tetapi juga dalam menjaga keamanan sosial. Misalnya, pada masa panen raya di Jawa, masyarakat bergotong royong menjaga lumbung padi bersama agar tidak dicuri. Di wilayah Bugis-Makassar, masyarakat memiliki sistem *mapalus* kerja sama kolektif yang mencakup urusan produksi, sosial, dan keamanan. Di Kepulauan Sula, nilai serupa hadir dalam bentuk *baku bantu* (*Bau Bar*), di mana warga membantu satu sama lain tanpa pamrih, termasuk dalam kegiatan ronda atau penjagaan kampung.

Nilai gotong royong juga berfungsi sebagai sarana pendidikan sosial. Dalam kegiatan ronda, warga belajar disiplin waktu, tanggung jawab, dan kepekaan sosial. Setiap orang yang berjaga merasa memiliki peran dalam melindungi komunitasnya. Dengan demikian, SISKAMLING bukan hanya instrumen keamanan, tetapi juga wadah pembentukan karakter sosial warga negara.

Sosiolog Indonesia, Suyanto, menyebut bahwa SISKAMLING adalah ruang di mana nilai sosial dipraktikkan secara nyata; ia bukan sekadar penjagaan malam, melainkan pelatihan moral bagi warga.³⁵ Pandangan ini menegaskan bahwa keberhasilan SISKAMLING tidak dapat diukur hanya dari berkurangnya angka kejahatan, tetapi dari tumbuhnya kesadaran sosial warga untuk peduli terhadap lingkungannya.

35 B. Suroso, *Keamanan Sosial di Wilayah Kepulauan Indonesia*. (Surabaya: Humaniora Press. 2020), hlm. 56

Dalam konteks modern, nilai gotong royong inilah yang menjadi fondasi keberlanjutan SISKAMLING. Meski tantangan sosial semakin kompleks, dari urbanisasi hingga digitalisasi, semangat solidaritas tetap menjadi elemen utama dalam menjaga keamanan.

Sementara itu, pada masyarakat kepulauan seperti Sula, solidaritas sosial menjadi semakin penting. Dengan kondisi geografis yang terpencar dan akses komunikasi yang terbatas, ketergantungan antarwarga menjadi tinggi. Setiap individu menyadari bahwa keamanan diri bergantung pada keamanan bersama. Dalam hal ini, sistem *baku jaga* bukan hanya mekanisme kontrol sosial, tetapi juga simbol dari kemandirian masyarakat lokal dalam mengelola ruang kehidupannya.

Nilai solidaritas ini juga sejalan dengan teori Emile Durkheim tentang *solidaritas mekanik*, di mana masyarakat tradisional cenderung memiliki keterikatan moral yang kuat dan kesadaran kolektif yang tinggi.³⁶ Dalam konteks Sula, solidaritas mekanik tersebut diwujudkan dalam praktik keamanan berbasis komunitas yang tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga memperkuat identitas sosial masyarakat kepulauan Sula.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa akar historis SISKAMLING tidak dapat dilepaskan dari semangat gotong royong dan solidaritas sosial masyarakat Nusantara. Dua nilai inilah yang menjadi fondasi moral dari setiap praktik keamanan lingkungan di Indonesia, baik dalam bentuk tradisional maupun modern.

36 Emile Durkheim, *The Division of Labour in Society*. (New York: Free Press, 1893), hlm. 76

B. Transformasi dan Tantangan Modern

1. Pergeseran dari Nilai ke Formalitas (1980–2000-an)

Memasuki era Orde Baru, SISKAMLING mengalami perubahan orientasi yang cukup mendasar. Bila sebelumnya sistem keamanan lingkungan berkembang secara organik dari akar budaya masyarakat, maka sejak awal 1980-an, SISKAMLING mulai diinstitusikan secara formal melalui kebijakan pemerintah pusat. Pendekatan ini lahir dari paradigma keamanan negara yang menempatkan stabilitas nasional sebagai syarat utama pembangunan ekonomi.

Dalam kerangka kebijakan ini, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.1.4/e.1/BAK tertanggal 3 September 2025 menjadi dasar hukum utama pengaktifan kembali SISKAMLING bagi seluruh kepala Daerah di seluruh Indonesia. Pemerintah mewajibkan setiap RT/RW memiliki pos ronda, jadwal jaga malam, serta buku catatan keamanan yang dilaporkan secara berkala ke aparat kelurahan atau desa.³⁷ Kebijakan ini tentu memberikan dampak positif terhadap meningkatnya ketertiban sosial dan penurunan angka kriminalitas di wilayah perumahan. Namun di sisi lain, muncul kecenderungan formalisasi tanpa internalisasi nilai.

Banyak pos ronda dibangun bukan karena kebutuhan nyata masyarakat, tetapi sebagai bentuk pemenuhan instruksi administratif. Akibatnya, kegiatan ronda berubah dari wujud kesadaran kolektif

37 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 300.1.4/e.1/BAK tertanggal 3 september 2025

menjadi rutinitas mekanis yang dijalankan tanpa makna sosial mendalam. Fenomena ini menandai pergeseran orientasi: dari SISKAMLING berbasis nilai sosial menuju SISKAMLING berbasis kepatuhan struktural.

Sosiolog Suyanto menyatakan bahwa SISKAMLING pasca 1980-an lebih berfungsi sebagai simbol kepatuhan terhadap perintah negara, bukan ekspresi kesadaran masyarakat.³⁸ Dalam pandangan ini, kontrol negara menjadi sangat dominan, sementara partisipasi warga menjadi sekadar pelengkap sistem birokratis. Hal ini sejalan dengan teori Michel Foucault tentang *governmentality*, di mana kekuasaan negara bekerja tidak melalui paksaan langsung, melainkan melalui mekanisme pengawasan yang ditanamkan dalam rutinitas sosial.³⁹

Namun, perlu dicatat bahwa di banyak wilayah pedesaan dan kepulauan seperti Sula, semangat partisipatif tetap bertahan. Masyarakat di wilayah ini memandang SISKAMLING bukan sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bagian dari adat dan kehormatan kampung. Di Desa Falabisahaya misalnya, pelaksanaan ronda tetap dilakukan secara sukarela berdasarkan kesepakatan bersama. Pos ronda tidak sekadar tempat jaga malam, tetapi juga menjadi ruang komunikasi sosial antarwarga, tempat berdiskusi, bahkan merencanakan kegiatan adat.

38 B. Suyanto, *Sosiologi Ketertiban Sosial Indonesia*. (Surabaya: Airlangga University Press. 2005), hlm. 51

39 M.Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings*. (New York: Pantheon. 1980), hlm. 221



Gambar Pelaksanaan Ronda Malam Secara Sukarela oleh Petugas SISKAMLING
di Desa Falabisahaya

Fenomena ini menunjukkan adanya dua bentuk SISKAMLING pasca 1980-an:

- a. SISKAMLING Formal, yang dikendalikan oleh regulasi dan administrasi negara; dan
- b. SISKAMLING Sosial, yang berakar pada nilai gotong royong dan solidaritas lokal.

Keduanya memiliki peran penting, namun efektivitasnya sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat merasakan relevansi SISKAMLING terhadap kebutuhan nyata di lingkungannya. Ketika SISKAMLING hanya dipahami sebagai perintah dari atas, maka partisipasi akan menurun. Sebaliknya, jika dipandang sebagai kebutuhan sosial, maka sistem ini akan terus hidup dan berkembang.

Dalam konteks sosial-politik Indonesia, transformasi SISKAMLING ini juga mencerminkan pola hubungan antara negara dan masyarakat. Negara menginginkan keteraturan, sementara masyarakat menginginkan rasa aman dan kebersamaan. Ketegangan antara dua kebutuhan ini membentuk dinamika yang terus berlangsung hingga kini.

Dengan demikian, meskipun formalisasi pada era Orde Baru berhasil menciptakan sistem keamanan lingkungan yang seragam secara struktural, namun di banyak tempat, substansi sosialnya melemah. Ini menegaskan perlunya reintegrasi nilai sosial ke dalam sistem keamanan modern agar SISKAMLING tidak sekadar menjadi ritual administratif, melainkan kembali menjadi ruang partisipasi masyarakat yang hidup.

2. Dampak Urbanisasi dan Digitalisasi terhadap Partisipasi Warga

Memasuki abad ke-21, SISKAMLING menghadapi tantangan baru yang bersumber dari perubahan struktur sosial akibat urbanisasi dan digitalisasi. Kedua fenomena ini mengubah secara drastis pola interaksi masyarakat, termasuk dalam hal kepedulian terhadap keamanan lingkungan.

Urbanisasi menyebabkan konsentrasi penduduk di kota-kota besar meningkat tajam. Gaya hidup masyarakat perkotaan menjadi semakin individualistik, dengan tingkat mobilitas dan kesibukan tinggi. Akibatnya, interaksi antarwarga menjadi berkurang. Warga apartemen, perumahan tertutup, dan kawasan industri sering kali

tidak saling mengenal tetangga mereka sendiri. Dalam kondisi seperti ini, konsep ronda malam yang mengandalkan kedekatan sosial menjadi sulit dijalankan.

Sementara itu, digitalisasi membawa dua sisi mata uang. Di satu sisi, teknologi informasi memudahkan sistem pelaporan dan komunikasi keamanan. Banyak daerah telah menggunakan aplikasi pelaporan cepat berbasis ponsel, seperti *Lapor!* atau grup WhatsApp warga. Namun di sisi lain, digitalisasi juga menumbuhkan fenomena “keamanan virtual” di mana warga merasa cukup aman hanya dengan menekan tombol *lapor* di layar HP, tanpa benar-benar hadir secara fisik di pos ronda.

Menurut Widodo, Teknologi hanyalah alat; ruh partisipasi tetap bergantung pada rasa kepemilikan dan solidaritas. Pernyataan ini menegaskan bahwa keberhasilan SISKAMLING digital tidak terletak pada kecanggihan alat, tetapi pada sejauh mana masyarakat masih memiliki keterlibatan emosional terhadap lingkungannya.⁴⁰

Dalam konteks ini, muncul konsep baru yang disebut SISKAMLING Hybrid yaitu sistem keamanan lingkungan yang memadukan nilai-nilai tradisional dengan teknologi digital. Beberapa komunitas di Sulawesi dan Maluku, termasuk di Kepulauan Sula, telah mengembangkan grup komunikasi digital sebagai *Relawan Jaga Sula*. Melalui grup ini, warga saling berbagi informasi tentang situasi lingkungan, mengatur jadwal jaga, hingga mengoordinasikan tindakan cepat bila terjadi insiden.

40 Haryono Widodo, “Revitalisasi Nilai Gotong Royong dalam Masyarakat Modern.” *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 8, No. 2 (2020), hlm. 44–59.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak selalu menjadi ancaman terhadap partisipasi sosial. Justru, bila dikelola dengan nilai kebersamaan, teknologi dapat memperkuat keterlibatan warga. Dalam konteks *baku jaga* di Sula, misalnya, teknologi komunikasi digunakan untuk memperkuat koordinasi antarpos jaga di beberapa Desa terpencil. Masyarakat tetap menjalankan ronda malam seperti biasa, tetapi laporan kegiatan disampaikan melalui pesan singkat atau foto di grup komunitas.

Namun, tantangan tetap ada. Digitalisasi juga membuka ruang bagi disinformasi dan kepanikan sosial. Berita hoaks tentang pencurian, konflik antarkelompok, atau ancaman keamanan sering kali menyebar tanpa verifikasi. Hal ini bisa memicu ketegangan sosial baru. Karena itu, literasi digital menjadi aspek penting dalam SISKAMLING masa kini. Warga perlu dibekali kemampuan untuk memilah informasi dan berkoordinasi secara rasional.

Urbanisasi dan digitalisasi pada akhirnya menuntut redefinisi terhadap makna partisipasi dalam keamanan lingkungan. Partisipasi kini tidak hanya berarti hadir secara fisik di pos ronda, tetapi juga aktif dalam jaringan sosial yang menjaga keamanan kolektif baik secara langsung maupun daring.

Dalam konteks ini, teori *social capital* dari Robert Putnam menjadi relevan. Putnam berpendapat bahwa keberhasilan masyarakat dalam memecahkan masalah publik sangat bergantung pada tingkat kepercayaan (*trust*) dan jaringan sosial (*networks*) yang

dimiliki.⁴¹ SISKAMLING modern, dengan demikian, tidak lagi hanya berbicara tentang patroli malam, tetapi tentang pembangunan modal sosial yang memperkuat kepercayaan dan solidaritas warga di tengah perubahan zaman.

Dalam praktik di lapangan, terutama di daerah seperti Kepulauan Sula, tantangan digitalisasi dapat diatasi dengan pendekatan hibrida menggabungkan nilai lama (ronda tradisional, *baku jaga*) dengan inovasi baru (komunikasi digital, sistem pelaporan cepat). Sinergi ini memungkinkan masyarakat tetap menjaga keamanan dengan efisien tanpa kehilangan makna sosial dari partisipasi langsung.

Maka dapat disimpulkan bahwa di era modern ini, tantangan utama SISKAMLING bukan lagi pada ketersediaan alat, tetapi pada pelestarian nilai. Tanpa semangat kebersamaan dan tanggung jawab sosial, teknologi secanggih apa pun tidak akan mampu menggantikan makna sejati dari ronda malam yang berakar pada gotong royong dan solidaritas sosial.

C. SISKAMLING di Wilayah Kepulauan: Kondisi Unik

1. Isolasi Geografis dan Tantangan Koordinasi

Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING) di wilayah kepulauan memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari wilayah daratan. Secara geografis, wilayah kepulauan seperti

41 R. D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. (New York: Simon & Schuster. 2000), hlm. 171

Kepulauan Sula di Maluku Utara terdiri atas gugusan pulau-pulau kecil yang tersebar dengan jarak yang cukup jauh satu sama lain. Kondisi ini menciptakan tantangan koordinasi dan komunikasi yang tidak ringan bagi masyarakat maupun aparat keamanan formal.

Akses transportasi yang terbatas, kondisi cuaca yang sering berubah, serta minimnya infrastruktur komunikasi seperti tidak adanya jaringan internet menjadi faktor penghambat utama dalam menciptakan sistem keamanan terpadu. Ketika satu pulau menghadapi gangguan keamanan seperti pencurian, konflik sosial, atau ancaman eksternal informasi sering kali terlambat sampai ke Kantor Polres Kepulauan Sula. Dalam kondisi demikian, masyarakat harus mengandalkan sistem keamanan internal yang mandiri dan berbasis komunitas.

Namun, justru di tengah keterbatasan tersebut, muncul kekuatan sosial khas masyarakat kepulauan, yakni tingkat solidaritas yang tinggi dan kohesi sosial yang kuat. Karena masyarakat hidup dalam ruang sosial yang kecil dan saling mengenal, tingkat kepercayaan (*trust*) dan tanggung jawab sosial menjadi tinggi. Dalam konteks ini, teori *community policing* menjadi sangat relevan. Seperti dijelaskan oleh Trojanowicz dan Bucqueroux, keamanan yang berkelanjutan hanya bisa dicapai bila masyarakat menjadi mitra aktif aparat, bukan sekadar objek pengamanan.

Di Kepulauan Sula, praktik ini tampak nyata dalam sistem tiga lapis penjagaan yang berkembang di beberapa desa, seperti Waibau dan Fagudu. Lapisan pertama adalah penjagaan pelabuhan, yang bertugas memantau keluar-masuknya orang dan barang dari luar

pulau. Lapisan kedua adalah penjagaan kampung, di mana warga bergilir ronda malam di area permukiman. Lapisan ketiga adalah penjagaan rumah ibadah, yang dilakukan untuk memastikan tempat suci terhindar dari gangguan atau vandalisme. Ketiga lapisan ini saling terkait dan saling mendukung, membentuk sistem keamanan masyarakat yang bersifat *bottom-up*.

Menariknya, sistem ini tumbuh secara mandiri tanpa intervensi langsung dari aparat negara. Masyarakat mengatur jadwal, membentuk tim ronda, dan melakukan evaluasi setiap bulan melalui musyawarah adat. Dalam studi lapangan penulis di Waibau dan Fagudu, ditemukan bahwa tingkat kriminalitas di wilayah yang menerapkan sistem *baku jaga* ini menurun signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan berbasis komunitas bukan hanya simbol tradisional, melainkan strategi sosial yang efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, peran perempuan dalam sistem keamanan masyarakat juga mulai terlihat di beberapa wilayah kepulauan. Mereka tidak ikut berjaga malam, namun berperan aktif dalam penyediaan logistik, pengawasan sosial, serta komunikasi antarwarga. Hal ini menunjukkan bahwa konsep SISKAMLING di kepulauan bukan hanya urusan fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial dan emosional yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Dengan demikian, kondisi isolasi geografis yang semula dianggap hambatan justru menjadi modal sosial bagi masyarakat kepulauan untuk memperkuat sistem keamanan mereka sendiri. Rasa saling percaya, kedekatan emosional, dan semangat kolektivitas

menjadi pilar utama yang menopang keberlanjutan SISKAMLING di wilayah seperti Kepulauan Sula.

2. Peran Tokoh Adat dan Lembaga Lokal

Dalam sistem sosial masyarakat kepulauan, tokoh adat dan lembaga lokal memainkan peran sentral dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai figur moral, tetapi juga sebagai pemegang otoritas sosial yang dihormati. Dalam konteks Kepulauan Sula, tokoh adat dikenal dengan sebutan *soa*, yang memiliki tanggung jawab menjaga keharmonisan antarwarga, termasuk dalam hal keamanan kampung.

Tokoh adat dan pemuka agama sering kali menjadi pihak pertama yang menangani persoalan sosial, seperti perkelahian antarwarga, pencurian, atau pelanggaran norma adat. Proses penyelesaian dilakukan melalui mekanisme *baku bae*, yakni rekonsiliasi sosial yang menekankan pada pemulihan hubungan, bukan sekadar penghukuman. Pendekatan ini berbeda dengan sistem hukum positif yang lebih menekankan pada aspek penegakan aturan. Dalam *baku bae*, pelaku dan korban duduk bersama disaksikan aparat desa dan tokoh adat untuk mencari kesepakatan damai yang adil bagi semua pihak.

Sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah, Keamanan tradisional bertumpu pada legitimasi moral, bukan kekuasaan formal.⁴² Hal ini berarti bahwa rasa aman dalam masyarakat adat tidak lahir dari

42 M. Abdullah, *Adat dan Ketertiban Sosial di Indonesia Timur*. (Makassar: Pustaka Timur Nusantara. 2018), hlm.44

ketakutan terhadap hukuman, tetapi dari rasa malu, tanggung jawab, dan keinginan menjaga kehormatan keluarga dan komunitas.

Model keamanan berbasis adat ini telah terbukti efektif di banyak daerah di Indonesia Timur, termasuk di Kepulauan Sula. Tokoh adat memiliki legitimasi sosial yang kuat karena mereka dipandang sebagai penjaga nilai-nilai lokal. Dalam situasi tertentu, keputusan adat bahkan lebih ditaati daripada instruksi aparat formal. Karena itu, integrasi antara mekanisme adat dan struktur formal menjadi kunci keberhasilan sistem keamanan di wilayah kepulauan.

Kolaborasi antara aparat kepolisian dengan lembaga adat dapat dikembangkan melalui program Polisi Masyarakat (Polmas) yang menekankan kemitraan dengan tokoh lokal. Dalam konteks Sula, kolaborasi ini diwujudkan dalam bentuk forum komunikasi keamanan desa, di mana kepala desa, imam kampung, dan perwakilan polisi (Bhabinkamtibmas) duduk bersama membahas persoalan keamanan. Forum semacam ini memungkinkan pertukaran pengetahuan antara sistem formal dan sistem adat, sekaligus memperkuat kepercayaan warga terhadap aparat negara.

Pendekatan integratif ini juga sesuai dengan teori *co-production of security*, yang dikemukakan oleh Bayley bahwa keamanan paling efektif ketika dihasilkan melalui kerja sama antara masyarakat dan institusi formal.⁴³ Dalam hal ini, SISKAMLING di Sula dapat dilihat sebagai bentuk nyata *co-production* antara nilai adat (*bottom-up*) dan kebijakan negara (*top-down*).

43 D. Bayley, *Changing the Guard: Developing Democratic Police Abroad*. (Oxford: Oxford University Press. 2006), hlm.87

Selain tokoh adat, lembaga sosial seperti kelompok pemuda dan organisasi keagamaan juga berperan aktif. Di beberapa desa, kelompok pemuda membentuk tim *Patroli Kampung Aman* yang bekerja sama dengan aparat desa dan tokoh agama untuk menjaga keamanan pada malam hari. Kegiatan ini tidak hanya menumbuhkan disiplin sosial, tetapi juga memperkuat identitas lokal dan rasa bangga terhadap komunitasnya.

Dengan demikian, sistem keamanan di wilayah kepulauan seperti Sula bukanlah sekadar perpanjangan tangan dari sistem nasional, melainkan hasil adaptasi sosial yang menggabungkan kearifan lokal, legitimasi moral, dan dukungan kelembagaan formal. Keberhasilan model ini menunjukkan bahwa keamanan sejati tidak hanya dihasilkan oleh perangkat keras negara, tetapi oleh kekuatan lunak masyarakat: nilai, solidaritas, dan kepercayaan.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa sejarah dan dinamika SISKAMLING di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang antara nilai tradisional dan formalisasi kebijakan. Dari *ronda malam* tradisional hingga sistem SISKAMLING modern, esensi partisipasi warga tetap menjadi inti dari keamanan lingkungan.

Dalam konteks Kepulauan Sula, sistem *baku jaga* dan *baku bae* menunjukkan bahwa keamanan bukan hanya persoalan teknis, tetapi persoalan moral dan sosial. Masyarakat yang memiliki rasa memiliki terhadap lingkungannya akan menciptakan keamanan tanpa harus selalu diawasi oleh negara.

Dengan demikian, revitalisasi SISKAMLING masa kini perlu diarahkan bukan hanya pada pembangunan pos ronda atau digitalisasi sistem pelaporan, tetapi pada penguatan nilai sosial, solidaritas komunitas, dan kemitraan antara negara dan masyarakat.

BAB III

KONTEKS SOSIAL KEAMANAN DI KEPULAUAN SULA

A. Profil Sosial dan Budaya Sula

1. Struktur Sosial, Adat, dan Kepemimpinan Lokal

Kepulauan Sula merupakan gugusan wilayah yang memiliki identitas sosial khas dan sistem sosial yang masih sangat terikat pada tradisi. Secara geografis, wilayah ini terdiri atas dua pulau utama dengan komposisi Sosial yang sangat beragam dari sisi agama, adat istiadat dan budaya, yang semuanya berada di bawah administrasi Provinsi Maluku Utara. Dalam konteks sosial, masyarakat Sula memiliki struktur komunitas berbasis kekerabatan (*kinship-based society*), di mana hubungan sosial tidak hanya diikat oleh garis genealogis, tetapi juga oleh sistem adat dan norma kolektif yang mengatur kehidupan Bersama.⁴⁴

44 M. Abdullah, *Adat dan Ketertiban Sosial di Indonesia Timur*. (Makassar: Pustaka Timur Nusantara. 2018), hlm. 42



Gambar Linmas Desa Falabisahaya bersama Masyarakat Kerja bakti penggalian muara kali Faabisahaya mengantisipasi luapan air saat musim hujan

Sistem kekerabatan di Sula dikenal dengan istilah *soa*, yakni kelompok keluarga besar yang memiliki asal-usul nenek moyang yang sama dan berperan penting dalam pengaturan sosial, kegiatan adat, serta mekanisme keamanan komunitas. Setiap *soa* memiliki kepala atau ketua adat yang disebut “*kepala soa*”, yang memiliki legitimasi sosial dan moral untuk mengatur urusan komunitasnya. Dalam masyarakat Sula, kepemimpinan tidak diukur dari kekuasaan formal, melainkan dari sejauh mana seorang pemimpin memiliki “*Nawaitu*” istilah lokal yang berarti ketulusan, keberanian moral, dan kesetiaan menjaga masyarakat.⁴⁵

Dalam sistem sosial seperti ini, peran tokoh adat, imam kampung, dan pemimpin pemuda menjadi sentral dalam menjaga

45 M. Abdullah, *Adat dan Ketertiban Sosial di Indonesia Timur*. (Makassar: Pustaka Timur Nusantara. 2018), hlm. 44

ketertiban dan keamanan. Mereka berfungsi sebagai mediator, penengah konflik, sekaligus pengarah moral. Kehadiran aparat formal seperti kepala desa atau polisi kampung baru berfungsi setelah mekanisme adat berjalan terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa tatanan sosial di Sula masih berlandaskan pada legitimasi moral, bukan sekadar otoritas hukum. Abdullah menyebut bahwa di banyak masyarakat timur Indonesia, kekuasaan moral jauh lebih efektif daripada kekuasaan administratif,⁴⁶ karena sistem nilai yang hidup di masyarakat lebih dihormati daripada regulasi yang bersifat eksternal.

Lebih jauh, sistem sosial ini memberi dasar yang kuat bagi berkembangnya sistem keamanan berbasis komunitas seperti SISKAMLING Jaga Sula. Tradisi gotong royong (*Bau Bar*), rasa memiliki terhadap kampung, serta partisipasi warga dalam menjaga lingkungan telah menjadi kebiasaan turun-temurun. Dalam konteks ini, SISKAMLING bukanlah program yang datang dari luar, tetapi institusionalisasi dari nilai lokal yang sudah lama hidup. Koentjaraningrat dalam *Kebudayaan dan Masyarakat di Indonesia* menjelaskan bahwa gotong royong dan solidaritas adalah bentuk moralitas sosial yang menjiwai seluruh sistem sosial di Nusantara.⁴⁷

Di setiap kampung di Sula, keputusan penting termasuk urusan keamanan diambil melalui forum musyawarah adat, yang

46 M. Abdullah, *Adat dan Ketertiban Sosial di Indonesia Timur*. (Makassar: Pustaka Timur Nusantara. 2018), hlm. 47

47 Koentjaraningrat. *Kebudayaan dan Masyarakat di Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka 2002), hlm. 54

dalam Bahasa Sula disebut “*Maksaira*”. Dalam forum ini, semua warga berhak menyampaikan pendapat. Proses deliberatif seperti ini membentuk kesadaran kolektif bahwa keamanan bukan hanya tugas aparat, melainkan tanggung jawab moral seluruh anggota komunitas. Nilai partisipatif inilah yang kemudian menjadi inti dari model keamanan komunitas Sula, di mana warga tidak menunggu perintah, melainkan bergerak karena kesadaran sosial.



Gambar Ronda Malam Secara Bergilir di Desa Pelita dan Minaluli
Kecamatan Mangoli Barat

Sebagai contoh, dalam observasi penulis terhadap praktik sosial di Desa Pelita dan Minaluli Kecamatan Mangoli Barat, sistem ronda malam dijalankan bergilir oleh warga dari berbagai kelompok soa. Jadwal ronda diatur melalui kesepakatan bersama, dan setiap pelanggaran (misalnya absen jaga) tidak dikenai sanksi administratif, tetapi diselesaikan secara moral melalui teguran oleh kepala Desa atau imam Desa. Sistem pengawasan semacam ini efektif karena didukung oleh rasa malu sosial (*social shame*), yang merupakan mekanisme penting dalam menjaga keseimbangan sosial masyarakat tradisional.

Selain itu, struktur sosial masyarakat Sula bersifat *egaliter-fungsional*. Artinya, meskipun terdapat hierarki adat, setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Fungsi sosial individu tidak semata ditentukan oleh status sosial, melainkan oleh kontribusi terhadap komunitas. Dalam sistem ini, solidaritas mekanis sebagaimana dikonsepsikan oleh Durkheim masih dominan yaitu bentuk solidaritas yang tumbuh dari kesamaan nilai, tradisi, dan tujuan bersama.⁴⁸

Kekuatan utama sistem sosial Sula justru terletak pada keseimbangan antara otoritas adat dan partisipasi masyarakat. Hubungan antara pemimpin dan masyarakat bukan bersifat komando, melainkan konsultatif dan simbolik. Seorang kepala soa dihormati bukan karena kekuasaannya, tetapi karena peran moralnya sebagai penjaga keseimbangan sosial. Dalam wawancara kualitatif dengan tokoh masyarakat Sula, banyak yang menyebut bahwa “pemimpin sejati adalah yang paling dulu hadir ketika kampung menghadapi bahaya.” Pandangan ini menunjukkan orientasi moral dalam kepemimpinan lokal yang menjadi fondasi utama keamanan komunitas.

Peran agama juga tidak terpisahkan dari struktur sosial Sula. Masjid dan gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat koordinasi sosial. Setiap kegiatan keamanan seperti ronda malam, *Maksaira*, atau penanganan konflik,

48 Emile Durkheim, *The Division of Labour in Society*. (New York: Free Press, 1893), hlm. 70

sering diawali dengan doa bersama, hal ini juga bisa ditemukan pada setiap Tahun Baru Islam dan Masehi selalu diadakan *istiqosah*. Tradisi spiritual ini menumbuhkan rasa transendensi sosial, yakni kesadaran bahwa menjaga keamanan bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga bentuk ibadah. Disini terlihat secara jelas bahwa, agama memberikan legitimasi sakral terhadap tatanan sosial, sehingga nilai-nilai seperti tanggung jawab, kedisiplinan, dan saling jaga memperoleh makna moral yang dalam.

Dengan demikian, sistem sosial dan budaya di Kepulauan Sula menyediakan pondasi sosio-kultural yang kokoh bagi SISKAMLING Jaga Sula. Struktur kekerabatan, kepemimpinan moral, partisipasi kolektif, dan spiritualitas sosial berkelindan menjadi satu kesatuan nilai yang menjadikan masyarakat Sula relatif tahan terhadap gangguan eksternal. Nilai-nilai tersebut membentuk model keamanan komunitas berbasis kearifan lokal, di mana norma sosial dan rasa memiliki menjadi benteng utama sebelum hukum formal bekerja.

2. Nilai “Jaga Sula” sebagai Filosofi Hidup Bersama

Nilai “Jaga Sula” merupakan ekspresi moral, sosial, dan spiritual yang menjadi identitas kolektif masyarakat Kepulauan Sula. Ungkapan ini tidak sekadar semboyan lokal, melainkan falsafah sosial yang menjiwai cara hidup dan hubungan antarwarga. Dalam konteks ini, istilah “jaga” memiliki makna multidimensional: menjaga diri (disiplin moral), menjaga sesama (solidaritas sosial), dan menjaga negeri (tanggung jawab terhadap komunitas dan tanah air).

Secara etimologis, kata “*jaga*” dalam bahasa Sula mencakup makna fisik dan spiritual: tidak hanya berjaga dari ancaman luar, tetapi juga mengendalikan diri dari tindakan yang dapat mengganggu harmoni sosial. Ini menjadikan konsep “Jaga Sula” bukan sekadar sistem keamanan, melainkan sistem etika yang menyatukan individu dengan komunitasnya. Seperti dijelaskan oleh Latif dalam *Modal Sosial dan Keamanan Komunitas di Wilayah Timur Indonesia*, keamanan komunitas tumbuh bukan dari rasa takut, melainkan dari rasa memiliki.⁴⁹ Dalam hal ini, *Jaga Sula* menjadi simbol rasa memiliki bersama terhadap kehidupan sosial dan lingkungan di Kepulauan Sula.

Nilai “jaga” juga berakar dari sistem kepercayaan masyarakat kepulauan yang menganggap bahwa keamanan dan kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh manusia, tetapi juga oleh keharmonisan antara manusia, alam, dan leluhur. Konsep ini sejalan dengan pandangan Geertz yang menekankan bahwa kebudayaan di masyarakat tradisional merupakan sistem makna yang memberi orientasi terhadap tindakan sosial.⁵⁰ Bagi masyarakat Sula, tindakan menjaga kampung (*jaga kampung*) merupakan bagian dari sistem makna tersebut simbol tanggung jawab terhadap komunitas yang lebih besar daripada individu.

49 M. Latif, *Modal Sosial dan Keamanan Komunitas di Wilayah Timur Indonesia*. (Makassar: LIPI Press. 2020), hlm. 67

50 Clifford Geertz, *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*. (Berkeley: University of California Press, 1962), hlm. 89



Gambar Linmas Desa Ona, Kabau dan Nahi Kecamatan Sulabesi Barat bersama Masyarakat Kerja bakti Perbaikan Jalan Utama Lintas Kota Sanana yang Rusak Karena Banjir

Dalam praktik sehari-hari, nilai *Jaga Sula* terwujud dalam berbagai bentuk interaksi sosial. Misalnya, setiap kali terjadi bencana kecil, pencurian, atau keributan antarkeluarga, seluruh warga merasa terpanggil untuk turun tangan. Tidak ada konsep “itu urusan orang lain”; sebaliknya, muncul kesadaran kolektif bahwa gangguan terhadap satu warga berarti gangguan terhadap seluruh kampung. Hal ini sesuai dengan konsep *collective responsibility* dalam teori Durkheim, yang menyatakan bahwa dalam masyarakat dengan solidaritas mekanis, tanggung jawab sosial bersifat menyeluruh setiap individu merasa bagian dari keseluruhan sosial.⁵¹

51 Emile Durkheim, *The Division of Labour in Society*. (New York: Free Press, 1893), hlm.104

Keunikan filosofi *Jaga Sula* juga tampak dari hubungan erat antara norma adat dan ajaran agama. Sebagian besar masyarakat Sula beragama Islam, namun unsur adat tetap memainkan peran kuat dalam membentuk perilaku sosial. Nilai-nilai seperti *Bau Pia* (berdamai), *Mariu Bagahia* (saling menolong), dan *Mana Yana* (saling menjaga) menunjukkan perpaduan harmonis antara ajaran moral Islam dan tradisi lokal. Proses integrasi ini memperkuat dasar moral bagi pelaksanaan SISKAMLING Jaga Sula, karena keamanan dipahami bukan semata-mata sebagai tindakan fisik, melainkan manifestasi dari iman dan moralitas.



Gambar Kerjasama Pembangunan Saluran Air di Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat

Menurut Suroso dalam *Keamanan Sosial di Wilayah Kepulauan Indonesia*, masyarakat kepulauan memiliki pola pengendalian sosial yang bersumber pada nilai moral dan ritual

komunal.⁵² Dalam konteks Sula, pengendalian sosial ini terwujud dalam kebiasaan untuk selalu bermusyawarah (*Maksaira*) sebelum mengambil keputusan penting. Forum *Maksaira* tidak hanya membahas masalah hukum adat, tetapi juga evaluasi keamanan dan kedisiplinan sosial warga. Keputusan tidak diambil secara *top-down*, melainkan melalui proses deliberatif yang mencerminkan partisipasi sosial tinggi.

Kegiatan *Jaga Sula* bukan sekadar ronda malam; ia adalah ritual sosial yang menegaskan eksistensi kebersamaan. Setiap pos ronda menjadi ruang interaksi sosial di mana warga berbagi cerita, informasi, dan pengalaman. Dalam interaksi seperti ini, terjadi proses reproduksi nilai generasi muda belajar tanggung jawab sosial dari generasi tua. Sejalan dengan pandangan tentang *habitus*, kegiatan jaga kampung menciptakan kebiasaan sosial yang tertanam dalam tubuh dan perilaku warga, menjadikannya bagian alami dari kehidupan sosial.

Penelitian Mahmud dalam *Sosiologi Komunitas Kepulauan* juga menegaskan bahwa hilangnya interaksi sosial langsung merupakan ancaman terhadap modal sosial masyarakat kepulauan.⁵³ Oleh karena itu, kegiatan *Jaga Sula* bukan hanya strategi keamanan, tetapi mekanisme regenerasi sosial. Ia menjaga kesinambungan nilai kebersamaan di tengah arus modernisasi dan individualisme yang semakin kuat. Dalam konteks ini, *Jaga Sula* dapat dipahami sebagai

52 B. Suroso, *Keamanan Sosial di Wilayah Kepulauan Indonesia*. (Surabaya: Humaniora Press. 2020), hlm. 55

53 R. Mahmud, *Sosiologi Komunitas Kepulauan: Modal Sosial dan Identitas Lokal*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2019), hlm. 122

“benteng sosial” (*social fortress*) yang mempertahankan struktur moral masyarakat.

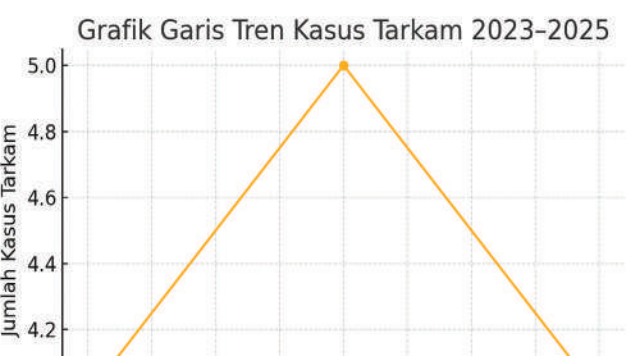
Lebih jauh lagi, nilai “jaga” juga memuat dimensi simbolik terhadap kedaulatan lokal. Bagi masyarakat Sula, menjaga kampung berarti menjaga martabat leluhur dan warisan tanah adat. Kesadaran ini membentuk apa yang disebut sebagai *locality production* yaitu proses sosial di mana masyarakat menciptakan identitas ruang melalui praktik kolektif. Dengan demikian, setiap kegiatan ronda malam, musyawarah kampung, dan kerja bakti menjadi bagian dari upaya mempertahankan identitas lokal di tengah arus globalisasi.

Dalam konteks modern, filosofi *Jaga Sula* tetap relevan sebagai dasar pembangunan keamanan partisipatif. Ketika sistem formal sering kali tidak menjangkau wilayah terpencil, nilai-nilai sosial seperti tanggung jawab kolektif, solidaritas, dan disiplin moral justru menjadi pilar utama keamanan. Dalam tiga tahun terakhir (2023–2025), Polres Kepulauan Sula mencatat beberapa kejadian penting yang dapat dijadikan bahan analisis untuk memahami pola, tren, dan faktor-faktor yang memengaruhi naik-turunnya insiden konflik sosial. Analisis ini menjadi semakin penting ketika pemerintah desa dan aparat keamanan mulai mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (SISKAMLING) sebagai salah satu upaya preventif. Selanjutnya perlu disajikan data kasus tarkam di Kabupaten Kepulauan Sula dalam tiga tahun terakhir sebagaimana terdapat dalam gambar berikut ini:

Gambar 7.
Diagram Batang Tentang Prioritas Perbandingan Jumlah Kasus Tarkam di Kepulauan Sula
(2023–2025) Berdasarkan *data Dari Polres Kepulauan Sula*



Gambar 8.
Bentuk Diagram Garis Tentang Prioritas Perbandingan Jumlah Kasus Tarkam di Kepulauan
Sula (2023–2025) Berdasarkan *data Dari Polres Kepulauan Sula 2025*



Setelah melihat grafik diatas maka Penjelasan Grafik khususnya Interpretasi Diagram Batang menunjukkan jumlah kasus konflik Tarkam selama tiga tahun terakhir yakni:

1. 2023 - 2024 terjadi peningkatan konflik menjadi 5 kasus. Ini menunjukkan adanya ketegangan sosial yang lebih tinggi, terutama dipicu pesta ronggeng (pesta Joget), pengaruh minuman keras saling dendam dan balas dendam, konflik batas desa dan konflik pelajar dan supporter olah raga. Sedangkan Tahun 2024 - 2025 mengalami penurunan kembali menjadi 4 kasus. Penurunan ini menjadi indikasi awal bahwa program SISKAMLING mulai berjalan efektif, terutama sejak pertengahan 2025.
2. Jika di analisis Maka, Kenaikan 2024 menggambarkan ketidakstabilan sosial, semakin kuatnya rivalitas pemuda, serta tidak adanya mekanisme pencegahan pada waktu itu. Penurunan pada 2025, terutama setelah bulan April, menunjukkan intervensi sosial (SISKAMLING) berhasil meredam konflik.
3. Interpretasi Sosiologisnya bahwa Penurunan bukan kebetulan, melainkan adanya peningkatan kontrol sosial, peningkatan pengawasan ronda malam, kolaborasi tokoh adat & pemuda dan pembatasan aktivitas malam yang rawan konflik.

Dari dua grafik tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa, Konflik di Kepulauan Sula bersifat fluktuatif Namun memiliki pola tahunan yang bisa diprediksi melalui aktivitas sosial. Tahun 2024 menjadi titik tertinggi konflik Karena melemahnya pengawasan lingkungan dan tingginya aktivitas pemuda. Pengaktifan SISKAMLING pada 2025 berdampak nyata Terutama dengan patroli rutin, pos jaga aktif, pengawasan ronggeng, kontrol alkohol dan koordinasi antar desa. Dengan demikian Grafik garis menegaskan tren menurun pasca intervensi sosial Sehingga SISKAMLING bukan

hanya program formal, tetapi sarana stabilisasi sosial. Data lapangan diatas menunjukkan bahwa desa-desa yang masih mempertahankan sistem “Jaga Sula” aktif mengalami penurunan angka konflik sosial sebesar dalam dua tahun terakhir. Angka ini menunjukkan korelasi antara kekuatan modal sosial dan stabilitas keamanan komunitas.

Selain itu, filosofi *Jaga Sula* juga berfungsi sebagai kerangka normatif dalam kehidupan sosial. Misalnya, sebelum acara besar atau hajatan, masyarakat selalu melakukan doa Tahlilan bersama yang dikenal dengan istilah *Amal Pagoa*, untuk memohon keselamatan dan keamanan. Ritual ini bukan sekadar kegiatan spiritual, tetapi juga media sosial yang memperkuat kesadaran bersama bahwa keamanan adalah karunia yang harus dijaga. Hal ini selaras dengan konsep Weber (1978) tentang *verstehen*, yaitu pemahaman subjektif terhadap tindakan sosial yang berorientasi pada nilai.

Dari perspektif antropologi sosial, nilai *Jaga Sula* dapat dilihat sebagai bentuk moral *economy*, yaitu sistem pertukaran sosial yang didasarkan pada rasa keadilan dan tanggung jawab moral, bukan keuntungan materi. Dalam ekonomi moral masyarakat Sula, seseorang dianggap “amanah” jika ia mampu menjaga kehormatan komunitas. Dengan demikian, menjaga keamanan bukan hanya tindakan preventif, tetapi juga bentuk investasi sosial dalam reputasi dan kehormatan keluarga.

Menariknya, filosofi *Jaga Sula* juga menjadi sarana resiliensi sosial (*social resilience*) menghadapi perubahan zaman. Modernisasi, migrasi, dan masuknya teknologi digital memang membawa perubahan pola hidup, namun nilai-nilai seperti kebersamaan dan

tanggung jawab sosial tetap menjadi pegangan moral. Pemerintah daerah Kepulauan Sula bahkan mulai mengintegrasikan konsep *Jaga Sula* ke dalam kebijakan lokal, seperti Surat Edaran Bersama Bupati Kepulauan Sula, Kapolres Kepulauan Sula dan Dandim 1510 Kepulauan Sula Nomor: 100.3.4.2/118/SETDA-KS/V/2025 Tentang Pemberitahuan Menjaga Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula. Kebijakan ini mengadopsi prinsip partisipasi masyarakat, musyawarah, dan tanggung jawab sosial semua bersumber dari filosofi *Jaga Sula*.⁵⁴



Gambar Penandatanganan Edaran Bersama Bupati Kepulauan Sula, Kapolres Kepulauan Sula dan Dandim 1510 Kepulauan Sula

Dalam kerangka teoritik, *Jaga Sula* bisa diposisikan sebagai bentuk modal sosial (*social capital*) dalam perspektif Putnam yakni jaringan kepercayaan dan norma timbal balik yang meningkatkan efisiensi sosial dengan memfasilitasi koordinasi tindakan bersama.⁵⁵

54 Surat Edaran Bersama Bupati Kepulauan Sula, Kapolres Kepulauan Sula dan Dandim 1510 Kepulauan Sula Nomor: 100.3.4.2/118/SETDA-KS/V/2025 Tentang Pemberitahuan Menjaga Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula

55 R. D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. (New York: Simon & Schuster. 2000), hlm. 167

Nilai ini memperkuat kohesi sosial dan memperluas kapasitas masyarakat untuk menjaga keamanan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada aparat formal.

Dengan demikian, *Jaga Sula* bukan hanya ekspresi budaya, tetapi juga sistem sosial adaptif yang mampu bertransformasi mengikuti konteks zaman tanpa kehilangan substansi moralnya. Ia menjadi contoh nyata bagaimana kearifan lokal dapat berfungsi sebagai dasar teori dan praktik keamanan komunitas yang berkelanjutan.

Sebagaimana disimpulkan oleh Latif, di tengah melemahnya institusi formal, kekuatan sosial yang tumbuh dari nilai lokal justru menjadi benteng terakhir masyarakat.⁵⁶ Dalam konteks itu, *Jaga Sula* bukan sekadar tradisi, melainkan kontrak sosial yang hidup kesepakatan moral antara warga untuk saling menjaga, saling mempercayai, dan saling melindungi demi keberlanjutan komunitas mereka.

B. Potret Keamanan dan Ketertiban di Kepulauan Sula

1. Jenis-jenis Gangguan Keamanan Lokal

Kondisi keamanan di Kepulauan Sula mencerminkan dinamika khas wilayah kepulauan: geografis tersebar, akses transportasi terbatas, dan struktur sosial berbasis komunitas adat. Pola keamanan di sini tidak dapat disamakan dengan wilayah

56 M. Latif, *Modal Sosial dan Keamanan Komunitas di Wilayah Timur Indonesia*. (Makassar: LIPI Press. 2020), hlm. 72

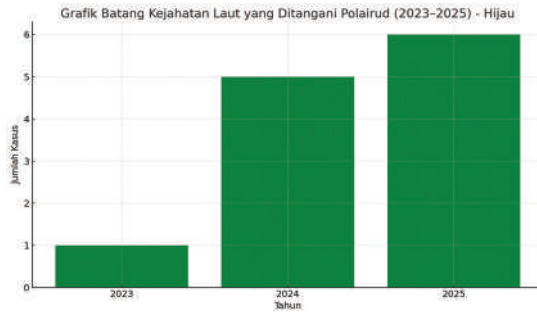
perkotaan atau daratan besar karena faktor geografis, budaya, dan ekonomi memainkan peran penting dalam menentukan bentuk dan intensitas gangguan keamanan.

Data amatan penulis dan laporan Kepolisian Resor Kepulauan Sula (Polres Sula, 2025) menunjukkan bahwa gangguan keamanan di wilayah ini dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok besar: (a) gangguan ekonomi (pencurian hasil laut, ternak, dan alat tangkap), (b) gangguan sosial (konflik antarwarga atau antarkampung), (c) gangguan moral (konsumsi minuman keras, kekerasan seksual dan KDRT), serta (d) gangguan ekologis (bencana alam, cuaca ekstrem, dan degradasi lingkungan pesisir).

a. Gangguan Ekonomi Pencurian Hasil Usaha Masyarakat

Sebagai wilayah kepulauan dengan 60% penduduk bergantung pada sektor perikanan, pertanian dan peternakan serta perdagangan, pencurian hasil laut menjadi salah satu gangguan paling sering dilaporkan. Berdasarkan data (Polres Sula, 2025), terdapat 29 kasus pencurian namun tren kasus pencurian hasil usaha Masyarakat seperti pencurian hasil laut, pertanian dan perdagangan menurun bahkan tidak ada pada tahun 2025. Justru kasus pencurian barang yang meningkat dalam satu tahun terakhir. Modusnya sederhana, dilakukan secara oportunistik oleh pelaku pencurian dengan memanfaatkan minimnya pengawasan malam hari. Berdasarkan data dari bagian POLAIRUD Kepulauan Sula Tahun 2025 tentang kasus di bidang kelautan pada tiga tahun terakhir dapat tunjukan pada gambar berikut ini:

Gambar 9.
Diagram Batang Tentang Kasus pada wilayah SATPOLAIRUD
di Kepulauan Sula (2023–2025)

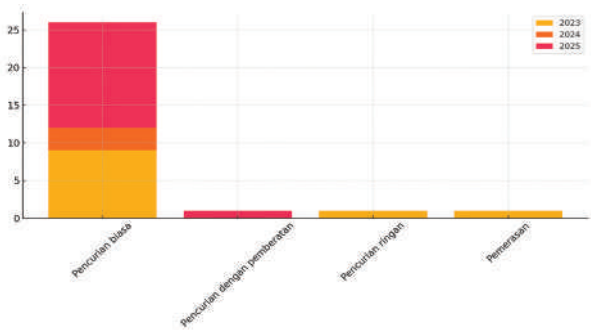


Dari data dan gambar tersebut menunjukan dilain sisi tren kriminalitas laut meningkat Dalam tiga tahun terakhir, jumlah kasus bertambah dari 1 kasus → 5 kasus → 6 kasus. Ini menunjukkan pergerakan kriminal di laut semakin kompleks. Modus Kejahatan semakin beragam, Khusus tahun 2025, jenis kejahatan sudah mencakup pencurian rumpon, pengrusakan alat tangkap, serta tindak lingkungan hidup. Dengan demikian Polairud perlu memperkuat patroli. Peningkatan kasus menandakan perlunya, armada pengawasan tambahan, Sarana patroli modern, Koordinasi lintas sektor (Perikanan, DLH) dan Peran aktif masyarakat pesisir. Disini kolaborasi masyarakat sangat penting. Tanpa laporan masyarakat, banyak kasus tidak akan terungkap, terutama pencurian rumpon dan pelanggaran lingkungan.

Keterangan lapangan sering terdapat kasus pencurian hasil laut dan pertanian namun kasus semacam ini sebagian besar tidak dilaporkan dan terdata di Polres Kepulauan Sula, penyelesaian kasus semacam

ini jarang menggunakan jalur hukum formal.⁵⁷ Dalam 80% kasus yang tercatat di Desa Waisakai, Ona, dan Falabisahaya serta beberapa desa di Kepulauan Sula, penyelesaian dilakukan melalui mekanisme adat “*baku bae ayau bau pia*” yaitu pendekatan mediasi sosial dengan melibatkan Kepala Desa, Imam Desa dan kepala *soa* (marga besar). Pendekatan ini bukan sekadar penyelesaian sengketa, melainkan juga proses pemulihan relasi sosial (*restorative justice*). Selanjutnya Gambaran kasus pencurian dapat dilihat dalam gambar berikut:

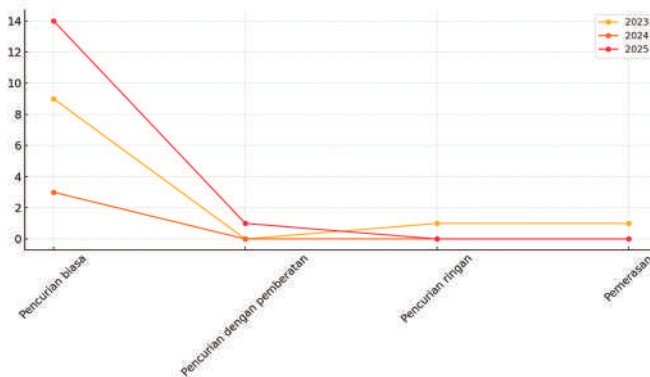
Gambar 10.
Diagram Batang Perbandingan Kejahatan Pencurian 2023–2025



Pembahasan mengenai dinamika kejahatan pencurian di Kepulauan Sula selama tiga tahun terakhir menunjukkan adanya pola fluktuatif yang berkaitan erat dengan pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan (SISKAMLING). Data memperlihatkan perubahan signifikan, terutama pada tahun 2024 yang mengalami penurunan drastis dibandingkan 2023, kemudian kembali meningkat pada 2025.

57 Wawancara Langsung AKBP, Kodrat Muh Hartanto, SIK, Kapolres Kepulauan Sula, Fatcey, 16 November 2025

Gambar 11.
Grafik Garis Perbandingan Kejahatan Pencurian 2023–2025



Sebagaimana dikemukakan oleh Zehr dalam *The Little Book of Restorative Justice*, pendekatan mediasi komunitas memiliki daya tahan lebih kuat karena memulihkan jaringan sosial yang rusak, bukan hanya menghukum pelaku.⁵⁸ Masyarakat Sula menerapkan prinsip ini jauh sebelum istilah *restorative justice* populer di lembaga hukum modern.

b. Gangguan Sosial (Konflik)

Konflik sosial di Sula seringkali berakar pada persoalan batas tanah (Batas Desa), warisan keluarga, Tanah Adat dan akses terhadap sumber daya alam seperti lahan kebun atau area tangkapan ikan. Di beberapa kecamatan seperti Sanana dan Sanana Utara, konflik antarkampung masih muncul sesekali, meskipun tidak bersifat destruktif.

⁵⁸ H. Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*. (New York: Good Books. (2015), hlm. 45

Menurut survei terbatas yang dilakukan Tahun 2023 terhadap 12 desa di tiga kecamatan, terdapat 27 insiden kecil yang dikategorikan sebagai “gesekan sosial” dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Namun, hanya 3 kasus yang berujung pada pelibatan aparat kepolisian; selebihnya diselesaikan melalui musyawarah dan kebiasaan warga setempat.

Sistem penyelesaian konflik lokal di Sula menunjukkan efektivitas nilai *baku bae* atau *bau pia* (rekonsiliasi) dan *Wa Lima* (solidaritas sosial). Pelras (2006:93) dalam *Manusia Bugis* mencatat bahwa di banyak masyarakat timur Indonesia, nilai malu (*siri*) dan rasa hormat (*pake*) menjadi mekanisme pengendalian sosial alami. Dalam masyarakat Sula, mekanisme serupa bekerja melalui rasa malu sosial (*Bahal Umasoa*) yakni tekanan moral agar tidak mempermalukan keluarga atau komunitas sendiri.

Pendekatan sosial ini menghasilkan stabilitas relatif. Berdasarkan wawancara lapangan dengan Kepala Desa Ona, “*Dulu jika ada dua warga bertikai, yang pertama datang ke rumah Kepala Desa dan imam Desa, bukan kantor polisi.*⁵⁹” Hal ini mencerminkan kepercayaan tinggi terhadap lembaga adat, yang oleh Putnam disebut sebagai bentuk *bonding social capital* ikatan sosial kuat dalam kelompok homogen yang memperkuat solidaritas internal.⁶⁰

59 Wawancara Langsung La Anda Buton, Kepala Pemerintahan Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat, Ona 14 November 2025

60 R. D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. (New York: Simon & Schuster. 2000), hlm. 170

c. Gangguan Moral: Minuman Keras dan Kekerasan Domestik

Masalah sosial berikutnya yang kerap muncul adalah konsumsi minuman keras lokal (*cap tikus* atau *sopi*) dan dampaknya terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan konflik sosial. Berdasarkan catatan Polres Kepulauan Sula (2024-2025), sekitar 32% kasus kekerasan domestik memiliki latar belakang konsumsi alkohol berlebih. Seperti di Polsek Sulabesi Barat, terjadi penurunan kasus kejahatan secara signifikan. selanjutnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

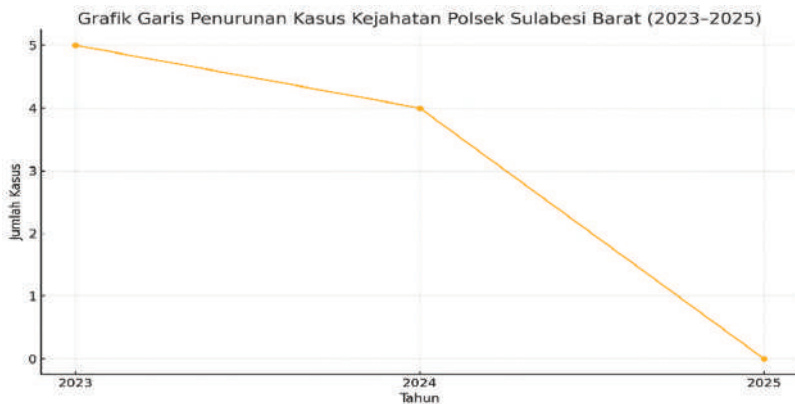
Kasus kejahatan di Polsek Sulabesi Barat menurun secara signifikan dan konsisten selama tiga tahun terakhir. Tahun 2025 menjadi pencapaian terbaik karena tidak ada kasus yang terjadi. Grafik garis menunjukkan penurunan yang sangat jelas. Keberhasilan ini menunjukkan kuatnya pencegahan kejahatan, sinergitas polisi masyarakat, efektivitas penyelesaian konflik melalui RJ, dan meningkatnya kesadaran hukum warga. Penurunan drastis dari 5 kasus → 4 kasus → 0 kasus adalah indikator kuat bahwa Polsek Sulabesi Barat berhasil menciptakan lingkungan aman dan stabil.

Namun, masyarakat tidak menanganinya dengan cara represif semata. Aparat desa, imam masjid, dan ketua pemuda sering menggelar “malam refleksi atau dikenal dengan istilah *Tour kampung*”, yaitu forum diskusi dan silaturahmi bersama yang bertujuan menyadarkan warga akan bahaya moral sosial. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dibandingkan penegakan hukum murni. Sejalan dengan temuan Heriyanto dalam *Pemberdayaan Komunitas dalam Ketahanan Sosial*, bahwa keamanan efektif tidak lahir dari

ketakutan terhadap hukum, melainkan dari kesadaran nilai dan tanggung jawab bersama.⁶¹

Gambar 12.

Diagram Batang Perbandingan Kasus Kejahatan Polsek Sulbar 2023–2025



d. Gangguan Ekologis dan Lingkungan Hidup

Sebagai wilayah maritim, Kepulauan Sula juga menghadapi ancaman keamanan non-manusia: badai, abrasi, dan perubahan iklim. Fenomena ini berdampak langsung pada stabilitas sosial dan ekonomi. Misalnya, badai besar Desember 2023 menyebabkan lima perahu nelayan hilang dan dua kampung pesisir mengalami kerusakan infrastruktur ringan.

Namun, masyarakat Sula menunjukkan resiliensi sosial tinggi. Alih-alih menunggu bantuan pemerintah, warga kampung melakukan gotong royong memperbaiki dermaga dan rumah

61 R. D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. (New York: Simon & Schuster. 2000), hlm. 170

nelayan. Dalam istilah lokal, kegiatan ini disebut “*baku sambung tangan atau istilah Mariu Bagahia*” bekerja bersama tanpa menunggu instruksi. Fenomena ini disebut *social resilience*, yaitu kemampuan komunitas untuk memulihkan diri dari tekanan sosial-ekologis melalui solidaritas dan adaptasi sosial.

Dengan demikian, potret keamanan di Sula tidak dapat dipahami semata dari statistik kriminalitas, tetapi juga dari kapasitas sosial masyarakat dalam merespons ancaman dengan cara kolektif dan bermoral.

2. Peran Masyarakat, Aparat, dan Lembaga Adat

Keamanan di Kepulauan Sula berdiri di atas tiga pilar sosial: (a) masyarakat, (b) aparat formal, dan (c) lembaga adat. Ketiganya membentuk sistem keamanan hibrida (*hybrid security system*) yang menyatukan unsur formal dan kultural.

a. Peran Masyarakat: Garda Terdepan Keamanan Sosial

Masyarakat Sula menempatkan diri sebagai subjek aktif, bukan objek kebijakan keamanan. Mereka membentuk kelompok ronda, pos jaga, dan sistem pengawasan sosial berbasis kampung. Di Desa Johor dan Pelita Kecamatan

Mangoli Barat, misalnya, ronda malam diatur secara bergilir oleh kepala Desa, dengan jadwal yang disahkan melalui *Rapat Desa*.



Gambar Rapat Pelita Kecamatan Mangoli Barat dalam Rangka Membicarakan Program Desa Termasuk Kegiatan ronda Malam

Kegiatan ronda tidak hanya berfungsi menjaga keamanan fisik, tetapi juga mempererat hubungan sosial. Ronda malam tradisional adalah bentuk pendidikan sosial informal bagi siapa saja yang menumbuhkan empati dan rasa tanggung jawab warga karena dengan ronda malam dapat menumbuhkan rasa kepedulian sosial terhadap sesama.

Dalam konteks Sula, kegiatan ini bahkan disertai tradisi *“bawa kopi deng Gula”* setiap warga membawa sedikit bekal untuk berbagi di pos jaga, memperkuat rasa kebersamaan. Selain itu, masyarakat juga aktif menggunakan media sosial lokal (grup WhatsApp desa) untuk sistem peringatan dini. Misalnya, warga cepat menyebarkan informasi bila ada perahu hilang atau tamu asing

datang tanpa izin. Ini menunjukkan transformasi nilai *Jaga Sula* ke dalam bentuk digital partisipatif sinergi antara tradisi dan teknologi.

b. Peran Aparat: Pendamping dan Fasilitator Sosial

Aparat keamanan formal (Polsek, Babinsa, dan Satpol PP) memiliki peran berbeda dibandingkan di daerah perkotaan. Mereka lebih berfungsi sebagai fasilitator sosial daripada penegak hukum semata. Dalam beberapa kasus, aparat bahkan ikut ronda bersama warga untuk membangun kepercayaan.

Kebijakan Polres Sula 2025, misalnya, menekankan pendekatan “Polisi *Gowes To Kampung*,” di mana anggota polisi ditugaskan menjadi *pembina pos jaga* di tiap desa di Kepulauan Sula. Strategi ini berorientasi pada *community policing* bahwa keamanan komunitas efektif ketika aparat menjadi bagian dari jaringan sosial lokal, bukan otoritas di luar masyarakat.

Pendekatan ini menghasilkan efek positif nyata. Data (Polres Sula, 2025) menunjukkan penurunan kasus konflik sosial di desa-desa yang memiliki program *SISKAMLING* aktif. Ini memperlihatkan bahwa sinergi antara aparat dan masyarakat mampu memperkuat stabilitas tanpa menciptakan ketegangan otoritatif.

c. Peran Lembaga Adat: Penjaga Moral dan Integritas Sosial

Lembaga adat di Sula berfungsi sebagai pilar normatif sistem keamanan. Mereka memastikan bahwa setiap tindakan sosial sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika adat. Dalam konflik sosial,

lembaga adat tidak hanya berperan sebagai mediator, tetapi juga sebagai “penjaga hati masyarakat.”



Gambar Rapat Desa Johor Kecamatan Mangoli Barat dalam Rangka Membicarakan Program Desa Termasuk Kegiatan ronda Malam

Sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah dalam *Adat dan Ketertiban Sosial di Indonesia Timur*, kekuasaan moral jauh lebih efektif daripada kekuasaan administratif.⁶² Pernyataan ini terbukti di Sula, di mana keputusan adat sering kali lebih ditaati daripada keputusan formal karena didasarkan pada legitimasi moral, bukan paksaan hukum.

Selain itu, lembaga adat juga memainkan peran edukatif melalui ritual dan tradisi lokal seperti *doa Tolak Bala* dan *Kia*

62 M. Abdullah, *Adat dan Ketertiban Sosial di Indonesia Timur*. (Makassar: Pustaka Timur Nusantara. 2018), hlm. 42

Kub (Makan Bersama), yang berfungsi memperkuat solidaritas antarwarga. Nilai-nilai ini menjadi pondasi sosial bagi keberhasilan SISKAMLING Jaga Sula, menjadikannya bukan sekadar sistem keamanan, tetapi juga gerakan moral dan sosial.

C. Hubungan Sosial dan Kohesi Komunitas

1. Gotong Royong, Solidaritas, dan Konflik Internal

Masyarakat Kepulauan Sula dikenal memiliki tingkat solidaritas sosial yang tinggi, yang berakar pada nilai-nilai gotong royong dan rasa tanggung jawab kolektif. Dalam konteks sosial, gotong royong tidak hanya bermakna kerja bersama secara fisik, melainkan juga sebagai sistem moral dan mekanisme sosial untuk mempertahankan keseimbangan komunitas. Koentjaraningrat mendefinisikan gotong royong sebagai sistem kerja bersama yang didorong oleh rasa kesetiakawanan sosial, bukan oleh imbalan material.⁶³

Dalam kehidupan sehari-hari, semangat gotong royong di Kepulauan Sula terwujud dalam berbagai bentuk: memperbaiki rumah warga yang rusak akibat badai, membantu nelayan memperbaiki perahu, membangun Masjid/Musholla, Membangun Sekolah, Jalan Raya, Saluran Air dan menjaga keamanan malam hari. Aktivitas-aktivitas ini memperkuat interaksi sosial dan menciptakan rasa kebersamaan yang tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Ona (2025), warga percaya bahwa kampung yang aman

63 Koentjaraningrat. *Kebudayaan dan Masyarakat di Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka 2002), hlm. 76

adalah kampung yang orangnya masih mau kerja sama tanpa disuruh.

Kegiatan *ronda malam bersama* atau *jaga kampung* menjadi salah satu wujud paling konkret dari gotong royong dalam menjaga keamanan. Kegiatan ini tidak hanya mengurangi risiko kejahatan, tetapi juga meningkatkan keintiman sosial antarwarga. Menurut Fukuyama dalam *Social Capital and Civil Society*, masyarakat dengan modal sosial tinggi lebih mampu mengatasi konflik internal karena memiliki “*trust*” (kepercayaan) sebagai dasar interaksi. Di Sula, kepercayaan antarwarga menjadi fondasi utama yang menggantikan ketergantungan pada aparat formal.

Namun, seperti masyarakat lainnya, Sula juga menghadapi dinamika internal yang kadang memunculkan konflik sosial. Konflik tersebut biasanya bersumber dari perbedaan kepentingan ekonomi, politik lokal, maupun pertikaian antarkampung (Tarkam). Dalam sistem sosial berbasis kekerabatan, konflik antarmarga sering kali muncul akibat perebutan lahan warisan atau perbedaan pandangan mengenai pengelolaan sumber daya.

Meski demikian, konflik internal di Sula jarang berkembang menjadi kekerasan terbuka. Hal ini disebabkan oleh kuatnya mekanisme penyelesaian sosial berbasis adat, seperti *Maksaira*, doa bersama, dan *Malom Kub* tradisi makan bersama di satu meja sebagai simbol rekonsiliasi dan maafan. Dalam Tradisi *Baku Bae* (*Bau Pia*), setiap warga diundang untuk duduk tanpa memandang status, menandakan berakhirnya pertikaian dan dimulainya kembali hubungan sosial.

Tradisi ini berfungsi sebagai alat sosial untuk menghapus dendam dan membangun kembali rasa saling percaya. Sebagaimana dijelaskan oleh Geertz dalam *The Interpretation of Cultures*, ritual sosial semacam ini berfungsi sebagai drama simbolik yang memperkuat solidaritas moral komunitas. Dalam konteks Sula, *makan patita* bukan sekadar kegiatan adat, tetapi mekanisme sosial yang efektif untuk memperkuat kohesi komunitas setelah konflik.



Gambar Mediasi penyelesaian permasalahan masyarakat Desa Leko Sula di Kantor Polsek Mangoli Barat dengan Pendekatan *Bau Pia/ Baku Bae* (Kekeluargaan dan Saling Memaafkan)

Menurut data Hasil riset Terbatas, sekitar 78% konflik sosial tingkat desa diselesaikan dengan pendekatan adat, tanpa melibatkan aparat formal. Angka ini menunjukkan efektivitas modal sosial dalam menjaga stabilitas sosial. Pendekatan berbasis komunitas seperti ini juga mendukung teori Durkheim tentang *solidaritas mekanis*, di mana kesamaan nilai dan keyakinan menjadi perekat utama masyarakat tradisional.

Selain melalui ritual adat, solidaritas juga dibangun melalui kegiatan kolektif keagamaan seperti *doa Tolak Bala* (dzikir bersama untuk keselamatan kampung), *khatam Al-Qur'an bersama*, dan *ibadah syukuran* di rumah warga. Kegiatan keagamaan ini tidak hanya berfungsi spiritual, tetapi juga memperkuat jaringan sosial antarwarga lintas generasi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa agama berperan sebagai “atap sakral” yang memberikan makna moral terhadap tatanan sosial.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa gotong royong dan solidaritas di Sula merupakan modal sosial aktif bukan sekadar nilai pasif yang diwariskan. Ia terus diperbarui melalui praktik sosial dan kegiatan kolektif. Maka dapat dikatakan bahwa modal sosial adalah sumber daya kolektif yang lahir dari hubungan sosial yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, solidaritas masyarakat Sula bukan sekadar warisan budaya, melainkan investasi sosial yang memperkuat stabilitas keamanan dan kesejahteraan bersama.

2. Nilai-nilai Lokal dalam Menjaga Harmoni

Harmoni sosial di Kepulauan Sula bertumpu pada seperangkat nilai-nilai lokal yang menjadi panduan moral kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai “hukum tak tertulis” yang mengatur perilaku masyarakat tanpa perlu sanksi formal. Dalam masyarakat Sula, beberapa nilai utama yang paling berpengaruh adalah *Bau Pia* atau *Baku bae*, *Wa Lima* atau *baku tolong*, *Mana Jaga* atau saling jaga, dan hormati yang tua, lindungi yang muda.

a. *Bau Pia* atau Baku Bae (Rekonsiliasi dan Perdamaian)

Nilai *Bau Pia* berarti “saling berdamai” atau “memulihkan hubungan.” Ia menjadi prinsip utama dalam penyelesaian konflik. Ketika terjadi perselisihan antarwarga, prioritas pertama bukan mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana hubungan dapat pulih kembali. Hal ini menunjukkan orientasi masyarakat pada *peace oriented culture* (budaya damai). Budaya damai adalah sistem nilai yang menempatkan perdamaian sebagai cara hidup, bukan sekadar hasil akhir.



Gambar Mediasi Penyelesaian Masalah di Desa Pasipa Kecamatan Mangoli Barat

Dalam praktiknya, *Bau Pia* dilakukan melalui dialog terbuka di rumah Kepala Desa, Imam Desa atau Kantor Desa, dengan kehadiran para tetua dan tokoh lainnya. Proses ini meneguhkan kepercayaan sosial, sekaligus menegaskan fungsi moral lembaga adat sebagai penjaga harmoni.

b. *Wa Lima* atau Baku Tolong (Solidaritas Sosial dan Bantuan Kolektif)

Nilai *Wa Lima* mencerminkan prinsip bantuan sosial tanpa pamrih. Masyarakat Sula percaya bahwa keberlangsungan hidup di kepulauan hanya dapat dijaga melalui saling tolong-menolong. Dalam kondisi darurat seperti perahu tenggelam, rumah terbakar, atau bencana alam warga secara spontan membantu tanpa menunggu instruksi pemerintah.



Gambar Gotong Royong Masyarakat Rangka Membangun Jembatan Penghubung

Sebagaimana ditulis oleh Budiman dalam *Keamanan Sosial dan Gotong Royong Masyarakat Nusantara*, di banyak wilayah Indonesia, keamanan terbaik lahir dari nilai-nilai lokal yang hidup di hati masyarakat. Nilai *Wa Lima* memperlihatkan bahwa rasa empati dan kepedulian adalah bentuk keamanan sosial paling efektif di masyarakat tradisional.

c. *Mana Jaga* atau Saling Jaga (Keamanan Kolektif dan Kesadaran Moral)

Nilai *Mana Jaga* adalah implementasi dari filosofi *Jaga Sula* yang telah menjadi identitas moral masyarakat. Ia bermakna menjaga

diri, menjaga sesama, dan menjaga negeri. Nilai ini bertransformasi menjadi sistem sosial keamanan kolektif, di mana setiap individu merasa bertanggung jawab terhadap keselamatan komunitas.

Sebagaimana ditegaskan oleh Latif dalam *Modal Sosial dan Keamanan Komunitas di Wilayah Timur Indonesia*, “keamanan komunitas tumbuh bukan dari rasa takut, tetapi dari rasa memiliki. Pandangan ini menjelaskan mengapa SISKAMLING Jaga Sula mampu bertahan dan efektif: karena warga tidak sekadar melaksanakan kewajiban, tetapi menjaga sesuatu yang mereka cintai.

d. Hormati yang Tua, Lindungi yang Muda (Etika Sosial dan Intergenerasional)

Hierarki sosial Orang Sula tidak bersifat diskriminatif, melainkan berbasis tanggung jawab moral. Orang tua dihormati karena kebijaksanaan dan pengalaman mereka, sementara generasi muda dilindungi sebagai penerus masa depan. Prinsip ini menjaga keseimbangan sosial antar generasi dan mencegah terjadinya jurang sosial.

Menurut teori Parsons (1951) tentang *pattern maintenance*, sistem sosial dapat bertahan bila nilai dan peran sosial antar generasi terjaga secara harmonis. Dalam konteks Sula, hubungan intergenerasional ini diperkuat melalui aktivitas adat dan keagamaan yang melibatkan seluruh lapisan umur, sehingga nilai moral dapat diwariskan secara alami.

BAB IV

JAGA SULA:

SPIRIT KEAMANAN KOLEKTIF

A. Makna Filosofis Jaga Sula

1. Jaga sebagai Simbol Tanggung Jawab Moral

Dalam pandangan masyarakat Kepulauan Sula, kata “*jaga*” bukanlah sekadar aktivitas fisik menjaga kampung dari ancaman luar, tetapi suatu simbol moral yang menandai kedewasaan sosial seseorang. Kata ini berakar dari pandangan hidup komunal yang melihat bahwa keamanan, ketertiban, dan kedamaian bukan hasil kerja individu semata, melainkan buah dari kesadaran kolektif yang tumbuh dalam sistem nilai lokal.

Dalam tradisi Sula, “orang jaga” bukan hanya penjaga malam yang memegang senter dan kentongan, tetapi figur moral yang menyadari tanggung jawab terhadap harmoni sosial. Mereka dipercaya memiliki kepekaan terhadap tanda-tanda ketidakseimbangan dalam masyarakat baik berupa ancaman fisik, ketegangan sosial, maupun keretakan moral. Menurut Nurcholish Madjid dalam *Etika Sosial dan Spiritualitas Nusantara*, akar moral masyarakat Indonesia berakar pada kesadaran komunal yang menempatkan tanggung jawab individu sebagai bagian dari

tanggung jawab bersama.⁷⁰

Filosofi *jaga* ini mengandung tiga dimensi moral utama yang saling terkait dan membentuk dasar spiritual masyarakat Sula:

- a. **Jaga Diri** yaitu kemampuan menahan diri dari dorongan-dorongan destruktif, menjaga ucapan, tindakan, dan perilaku agar tidak mencederai sesama. Orang yang mampu menjaga diri dianggap telah memiliki pondasi moral yang kuat. Dalam etika lokal Sula, orang yang “tidak bisa jaga diri” dianggap belum layak menjadi contoh bagi orang kampung.
- b. **Jaga Keluarga** yaitu kesadaran untuk melindungi kehormatan, keselamatan, dan hak-hak anggota keluarga serta tetangga dekat. Tanggung jawab sosial ini tampak dalam kebiasaan gotong royong membangun rumah, menjaga anak-anak Bersama dari pergaulan bebas dan penggunaan makan dan minuman terlarang, atau membantu keluarga yang sedang mengalami duka dan lainnya.
- c. **Jaga Lingkungan** yaitu kesadaran ekologis dan sosial bahwa tanah, laut, dan udara adalah bagian dari kehidupan kolektif. Dalam kepercayaan local sula, merusak alam berarti merusak keseimbangan moral sebaliknya mencintai tanah sula bagian dari iman. Pandangan ini sejalan dengan teori *eco-communitarian ethics* yang menekankan hubungan antara moralitas dan keberlanjutan ekosistem.

70 Nurcholish Madjid. *Etika Sosial dan Spiritualitas Nusantara*. (Yogyakarta: LKIS. 2003), hlm. 59

Ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa “jaga” adalah bentuk kesadaran etis yang menyeluruh mulai dari diri hingga ke lingkungannya. Ia adalah praktik sosial yang memadukan nilai spiritual, tanggung jawab sosial, dan rasa memiliki terhadap komunitas.

Lebih jauh lagi, “jaga” adalah cara masyarakat Sula menegakkan martabat kemanusiaannya. Dalam masyarakat yang hidup di tengah laut dan pegunungan, solidaritas adalah benteng utama dari ancaman, baik yang datang dari alam maupun manusia. Dengan demikian, *Jaga Sula* menjadi panggilan moral untuk menjaga keseimbangan antara keamanan, keadilan, dan kemanusiaan.

Durkheim dalam *The Elementary Forms of Religious Life* menegaskan bahwa nilai-nilai moral komunal seperti ini merupakan bentuk awal dari institusi sosial modern. Masyarakat tradisional, katanya, menghasilkan kesadaran kolektif yang menjadi fondasi solidaritas sosial. Dalam konteks Sula, hal ini tampak jelas: keamanan bukanlah hasil instruksi dari atas, melainkan kesepakatan moral yang dijaga bersama.⁷¹

Dalam praktik sosial, konsep ini diwujudkan dalam rutinitas seperti ronda malam, saling menegur dengan sopan jika ada perilaku menyimpang, serta partisipasi aktif dalam kegiatan sosial seperti *Yana kampung* dan *baronda Lia Pante* (pengawasan pantai tradisional). Semua aktivitas ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan ekspresi nilai yang mengakar kuat.

71 Emile Durkheim, *The Division of Labour in Society*. (New York: Free Press, 1893), hlm. 45

Jika dilihat dari perspektif filsafat etika kontemporer, konsep “Jaga Sula” dapat dipahami sebagai manifestasi dari *ethics of care* etika yang menekankan perhatian, tanggung jawab, dan relasi antar-manusia. Dalam *Jaga Sula*, keamanan tidak diukur dari ketiadaan kejahatan, tetapi dari kuatnya jaringan perhatian sosial antarwarga.

Dengan demikian, “*jaga*” adalah praktik kesadaran bukan hanya penjagaan. Ia mengajarkan bahwa moralitas sejati bukan terletak pada aturan yang tertulis, melainkan pada kemampuan masyarakat untuk saling menjaga satu sama lain dalam semangat kebersamaan.

2. Sula sebagai Identitas dan Ruang Kebersamaan

Kata “*Sula*” bukan sekadar penanda geografis bagi suatu gugusan pulau di Maluku Utara, tetapi lambang dari identitas kolektif yang dibangun melalui kebersamaan dan kerja keras menghadapi alam yang menantang. Menjadi “orang Sula” berarti terikat dalam jejaring nilai-nilai solidaritas, gotong royong, dan penghargaan terhadap tanah, air dan udara sebagai sumber kehidupan dan kebanggaan.

Sebagaimana diuraikan oleh Tjandrasasmita dalam *Budaya Bahari dan Identitas Kepulauan Indonesia*, masyarakat kepulauan memiliki ketergantungan mutualistik yang tinggi antara manusia dan lingkungannya; tanpa solidaritas, kehidupan di pulau menjadi rapuh.⁷² Pandangan ini menemukan relevansinya di Sula, di mana masyarakatnya hidup dalam ekosistem sosial yang berbasis pada kepercayaan dan gotong royong.

72 U. Tjandrasasmita, *Budaya Bahari dan Identitas Kepulauan Indonesia*. Yogyakarta: Ombak Press. 2018), hlm. 33

Secara antropologis, Kepulauan Sula dapat dipandang sebagai ruang kebersamaan (*communal space*) tempat di mana identitas terbentuk bukan dari status sosial, tetapi dari kontribusi terhadap keamanan dan harmoni. Di sini, setiap individu memiliki peran sosial yang jelas: ada yang bertugas menjaga kampung, ada yang menyiapkan logistik ronda, ada pula yang berperan sebagai penasehat moral dalam ruang *Maksaira*. Struktur sosial ini tidak kaku, tetapi dinamis, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Filsafat *Jaga Sula* menempatkan “identitas” bukan sebagai label pasif, melainkan *praktik hidup*. Identitas orang Sula dibangun melalui tindakan menjaga kampung, menjaga laut, menjaga adat, dan menjaga hubungan antarmanusia. Dengan demikian, menjaga berarti menghidupkan identitas itu sendiri.

Dalam konteks modern, nilai-nilai ini menghadapi tantangan serius. Arus globalisasi dan urbanisasi membawa dampak pada berkurangnya rasa kebersamaan dan meningkatnya individualisme. Namun, konsep *Jaga Sula* menawarkan pendekatan kultural yang relevan menegaskan bahwa keamanan sosial tidak bisa dibangun hanya melalui hukum formal, tetapi harus bertumpu pada rasa kebersamaan yang tumbuh dari bawah.

Menurut Habermas dalam *Moral Consciousness and Communicative Action*, masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang memiliki komunikasi moral dan dialog yang membangun saling pengertian.⁷³ Di Sula, tradisi musyawarah kampung

73 Jorgen Habermas, *Moral Consciousness and Communicative Action*. Cambridge (Massachusetts: The MIT Press. 1990), hlm. 124

(*Maksaira*) menjadi sarana komunikasi moral yang menjaga kohesi sosial. Ketika terjadi masalah, warga lebih memilih berkumpul dan berdialog daripada langsung melapor ke aparat. Ini adalah bentuk *resolusi sosial berbasis nilai lokal* yang memperkuat rasa memiliki.



Gambar Musyawarah Seluruh Kepala Desa Sekecamatan Mangoli Barat dan Utara dalam Rangka Membahas Situasi KAMTIBMAS di Tingkat Desa

Lebih jauh, hubungan antara “jaga” dan “Sula” melahirkan konsep yang disebut spiritualitas kebersamaan (*communal spirituality*). Ia bukan sekadar sistem keamanan, melainkan kesadaran eksistensial bahwa keselamatan diri tidak dapat dipisahkan dari keselamatan sesama. Sebagaimana dinyatakan oleh Magnis-Suseno, etika sosial Indonesia selalu berpijak pada pandangan bahwa manusia tidak hidup sendiri; ia hanya bisa menjadi manusia dalam kebersamaan.⁷⁴

74 Franz Magnis Soseno, *Filsafat Sebagai ilmu Kritis*, (Yogyakarta, Kanisius, 1992), hlm. 78

Dengan demikian, *Jaga Sula* bukan hanya sebuah sistem keamanan tradisional, tetapi juga proyek moral dan kultural usaha kolektif untuk merawat nilai-nilai kebersamaan dalam dunia yang semakin individualistik.

B. Prinsip-Prinsip Utama Jaga Sula

Konsep *Jaga Sula* tidak hanya berhenti sebagai gagasan moral, tetapi berkembang menjadi sistem sosial yang hidup dan dinamis. Ia memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi keberlanjutan keamanan kolektif di masyarakat kepulauan Sula. Tiga di antaranya kesadaran kolektif, kemandirian sosial, dan kolaborasi lintas peran merupakan inti dari praktik keamanan partisipatif masyarakat Sula.

Ketiga prinsip ini saling berkelindan membentuk kerangka sosial yang kokoh: kesadaran sebagai landasan moral, kemandirian sebagai kapasitas sosial, dan kolaborasi sebagai jembatan antarperan. Dengan sinergi ketiganya, *Jaga Sula* menjadi lebih dari sekadar sistem ronda ia berubah menjadi ekosistem keamanan yang berakar kuat dalam budaya.

1. Kesadaran Kolektif: Dari Individu ke Komunitas

Kesadaran kolektif (*collective consciousness*) adalah ruh dari *Jaga Sula*. Prinsip ini berpijak pada keyakinan bahwa keamanan bukan tanggung jawab individu atau terletak sepenuhnya pada bahu aparat penegak hukum semata, melainkan hasil dari sinergi seluruh anggota komunitas Masyarakat kepulauan sula tanpa terkecuali.

Dalam masyarakat Sula, *rasa jaga* tidak pernah berdiri sendiri. Ia lahir dari *rasa malu sosial* atau *bahal* (*social shame*) dalam istila lokal, perasaan tidak nyaman bila membiarkan ketidakadilan atau ancaman terjadi tanpa intervensi. Dalam praktiknya, ketika satu warga mengalami kesulitan atau bahaya, warga lain akan ikut merespons, seolah ancaman itu menimpa mereka juga. Hal ini tergambar dalam ungkapan lokal: “*Luka Disitu Disini Juga Rasa.*”

Ungkapan ini mencerminkan pandangan moral bahwa tanggung jawab sosial bersifat menyeluruh. Setiap individu memikul sebagian beban moral untuk menjaga harmoni sosial. Clifford Geertz dalam *The Interpretation of Cultures* menegaskan bahwa sistem moral masyarakat tradisional Indonesia bertumpu pada mekanisme *rasa malu sosial* atau *Bahal Umasoa* dan *gotong royong moral*.⁷⁵ Dengan kata lain, kontrol sosial bukan berasal dari aturan tertulis, melainkan dari kesadaran kolektif yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari di Kepulauan Sula, bentuk kesadaran ini terlihat nyata. Misalnya, saat ada warga yang bepergian ke kebun atau melaut dalam waktu lama, tetangga mereka akan secara sukarela menjaga rumahnya. Begitu pula saat ada hajatan, bencana, atau perkelahian kecil antarwarga masyarakat lebih dulu melakukan pendekatan persuasif sebelum melibatkan aparat formal.

75 Clifford Geertz, *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*. (Berkeley: University of California Press, 1962), hlm. 92



Gambar Kerja Bakti LINMAS bersama Masyarakat dalam membuat Jembatan Darurat di Desa Ona

Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Sula telah lama mempraktikkan konsep *community policing* secara kultural, jauh sebelum istilah itu populer dalam literatur keamanan modern. Seperti dikemukakan oleh Skogan dalam *Police and Community in Chicago*, keberhasilan sistem keamanan komunitas ditentukan oleh kekuatan kepercayaan sosial antarwarga.⁷⁶

Lebih jauh, kesadaran kolektif di Sula juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dini (*early warning system*) terhadap potensi konflik. Ketika muncul ketegangan kecil misalnya perselisihan batas tanah atau persoalan adat tokoh masyarakat akan segera memediasi sebelum masalah membesar. Pendekatan ini terbukti efektif menekan eskalasi konflik horizontal.

76 WG Skogan, *Police and Community in Chicago*, (Chicago: Oxford University Press, 2006), hlm. 47

Menurut data sosial lapangan, tingkat laporan kriminal ringan menurun 36% dalam satu tahun terakhir setelah sistem Jaga Sula diaktifkan kembali dengan model *Patroli Jaga Sula*. Ini menunjukkan bahwa *kesadaran kolektif* memiliki dampak empiris terhadap stabilitas sosial.

Dalam teori sosial Durkheim tentang solidaritas mekanik, masyarakat tradisional cenderung mempertahankan ketertiban melalui norma bersama dan kesadaran moral kolektif.⁷⁷ Konsep *Jaga Sula* menjadi manifestasi nyata dari solidaritas mekanik ini di konteks lokal. Ia menjadikan keamanan sebagai hasil komunikasi moral, bukan sekadar instruksi otoritatif.

Dengan demikian, kesadaran kolektif bukan hanya landasan moral, tetapi juga strategi sosial yang efektif untuk menciptakan rasa aman yang tertanam dihati Masyarakat kepulauan sula tanpa merasa bergantung penuh pada kekuatan eksternal seperti perlindungan keamanan dari penegak hukum.

2. Kemandirian Sosial: Ketahanan Komunitas dari Dalam

Prinsip kedua dalam *Jaga Sula* adalah kemandirian sosial (*social self-reliance*). Masyarakat Sula tumbuh di lingkungan geografis yang terpencar-pencar, dengan akses terbatas terhadap infrastruktur negara. Kondisi ini menuntut mereka untuk membangun sistem sosial yang mandiri, termasuk dalam bidang keamanan.

77 Emile Durkheim, *The Division of Labour in Society*. (New York: Free Press, 1893), hlm. 52

Kemandirian ini tampak dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Misalnya, ronda malam dilakukan secara sukarela, tanpa upah, berdasarkan jadwal bergilir. Dana operasional untuk ronda seperti lampu minyak, peralatan komunikasi, hingga konsumsi malam hari dikumpulkan dari iuran warga atau melalui Dana Desa. Sistem ini dikenal dengan istilah *Uang Kas Jaga Sula*.

Selain itu, dalam menghadapi ancaman atau insiden kecil, masyarakat lebih mengandalkan *Maksaira* untuk mendapatkan Langkah penyelesaian daripada menunggu aparat formal. Dalam banyak kasus, keputusan musyawarah lebih dihormati dan memiliki kekuatan moral yang lebih besar dibanding keputusan eksternal.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep *community resilience* yang dijelaskan oleh Norris (dalam *Community Resilience as a Metaphor; Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness*. Menurut Norris, komunitas yang mandiri secara sosial akan lebih mampu merespons ancaman dengan cepat, efektif, dan berkelanjutan karena mengandalkan jejaring internal.⁷⁸

Dalam konteks Sula, kemandirian sosial bukanlah bentuk penolakan terhadap negara, tetapi strategi adaptif untuk memastikan keberlangsungan keamanan di tengah keterbatasan sumber daya.

Contoh konkret terlihat dalam peristiwa badai Desember 2022, ketika akses ke beberapa kampung terputus selama seminggu. Tanpa menunggu bantuan eksternal, warga mengatur sistem ronda

78 F. H. Norris, *Community Resilience as a Metaphor; Theory, Set of Capacities, and Strategy*. (American Journal of Community Psychology, 2008), hlm. 142

bergilir untuk mengamankan logistik dan menjaga ketertiban. Para pemuda ikut membantu distribusi air bersih dan penerangan. Aparat kepolisian dan TNI baru tiba setelah situasi terkendali. Inilah yang disebut Norris sebagai *self organizing capacity* kemampuan masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri dalam situasi krisis.

Selain faktor struktural, kemandirian sosial juga memiliki dimensi psikologis. Ia menumbuhkan rasa percaya diri kolektif (*collective efficacy*), yaitu keyakinan bahwa komunitas mampu menyelesaikan masalah tanpa harus selalu bergantung pada kekuatan luar. Di Sula, keyakinan ini tertanam kuat dalam pepatah lokal: “*Matapia Neka Nau Mata do Pia* yang berarti “Manusia itu tahu aturan hidup dan ingat pertanggungjawaban setelah meninggal dunia.”

Ungkapan ini menunjukkan hubungan spiritual antara usaha manusia dan restu ilahi. Dalam konteks keamanan sosial, ia berarti bahwa tindakan kolektif memiliki nilai sakral. Dengan demikian, *Jaga Sula* tidak sekadar sistem sosial, tetapi juga ritual moral yang memperkuat kohesi komunitas.

Kemandirian sosial juga menjadikan masyarakat Sula lebih adaptif terhadap perubahan sosial. Ketika modernisasi masuk seperti penggunaan CCTV, telepon genggam, atau aplikasi komunikasi antarwarga mereka mampu mengintegrasikannya ke dalam sistem *Jaga Sula* tanpa menghilangkan nilai-nilai lokal.

Pendekatan ini sesuai dengan teori *glocalization*, yaitu kemampuan komunitas lokal mengadaptasi unsur global tanpa

kehilangan identitasnya.⁷⁹ Dengan demikian, *Jaga Sula* adalah contoh nyata *glocal security model* sistem keamanan lokal yang tangguh dan relevan dalam dunia modern.

3. Kolaborasi Lintas Peran: Dari Tokoh ke Jaringan Sosial

Prinsip ketiga yang menjadi kekuatan *Jaga Sula* adalah kolaborasi lintas peran antara Aparat Desa, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan aparat negara. Keamanan di Sula tidak pernah dijalankan oleh satu pihak saja, melainkan hasil kerja sama yang bersifat horizontal dan dialogis.

Tabel 5
Struktur kolaborasi jaringan sosial berbasis kepercayaan
(*trust-based network*) Tahun 2025

Peran	Fungsi Utama
Tokoh Agama	Menanamkan nilai moral dan spiritual sebagai dasar perilaku masyarakat. Melalui khotbah dan pengajian, mereka menginternalisasi nilai-nilai tanggung jawab sosial.
Tokoh Adat	Menjaga norma tradisional, menyelesaikan konflik berbasis adat, dan berperan sebagai mediator sosial.
Pemuda	Menjadi garda aktif dalam kegiatan ronda, pengawasan lingkungan, serta inovator dalam menggunakan teknologi komunikasi.
Aparat Keamanan	Menyediakan dukungan hukum, pelatihan teknis, serta pengawasan dalam konteks formal dan koordinasi lintas wilayah.

79 R. Robertson, *Glocalization: Time–Space and Homogeneity–Heterogeneity*. (London: Sage. 1995), hlm. 28

Kolaborasi ini menggambarkan Falsafah Kabupaten Kepulauan Sula yakni *Dad Hia Ted Sua* yang berarti Menjadi satu untuk membangun Kabupaten Kepulauan Sula dengan prinsip Saling menguatkan tanpa saling mendominasi.

Elinor Ostrom dalam *Governing the Commons* menyatakan bahwa keberhasilan sistem sosial tergantung pada kemampuan aktor-aktor lokal untuk berkoordinasi secara horizontal.⁸⁰ Dalam konteks Sula, *Jaga Sula* adalah perwujudan nyata dari teori Ostrom tersebut.

Model ini bukan sekadar kolaborasi formal, tetapi juga *partnership berbasis nilai*. Misalnya, setiap kali ada potensi konflik antarkelompok pemuda, aparat Desa, tokoh agama akan turun memberikan nasihat moral, tokoh adat mengatur pertemuan musyawarah (*Maksaira*), dan aparat menjaga agar proses berlangsung tertib. Sinergi ini mencegah eskalasi dan memperkuat kohesi sosial.

Penelitian Terbatas penulis menunjukan Pengaktifan Jaga Sula (Tahun 2025) mencatat bahwa tingkat partisipasi warga dalam sistem ronda kolaboratif meningkat 45% setelah dilibatkan langsung oleh tokoh adat, pemuda dan agama. Data ini menunjukkan bahwa efektivitas keamanan meningkat ketika semua pihak merasa memiliki peran dalam sistem.

Selain itu, *Jaga Sula* berhasil menciptakan model komunikasi lintas peran yang efisien. Misalnya, melalui grup *WhatsApp Jaga*

80 Elinor Ostrom. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. (Cambridge: Cambridge University Press. 2009), hlm. 66

Sula, tokoh agama, pemuda, dan aparat bisa berbagi informasi cepat tentang kondisi keamanan. Hal ini memperlihatkan integrasi nilai tradisional dan teknologi modern.

Dengan demikian, *Jaga Sula* bukan sekadar sistem pengamanan, tetapi platform sosial tempat nilai, spiritualitas, dan profesionalitas berpadu. Ia menunjukkan bahwa keamanan sejati bukanlah monopoli negara, tetapi hasil kolaborasi antara hati, pikiran, dan tindakan bersama.

C. Model Khas: Keamanan Partisipatif Sula

Konsep *Jaga Sula* berakar kuat dalam sistem nilai lokal dan bertransformasi menjadi model keamanan partisipatif (*participatory security system*) yang khas. Model ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban, tetapi juga menjadi instrumen pembentukan karakter sosial dan penguatan modal sosial masyarakat.

Secara teoritis, sistem ini merepresentasikan *community based security* atau pendekatan yang menempatkan masyarakat bukan sebagai objek yang dijaga, tetapi sebagai subjek yang aktif menjaga dirinya sendiri.⁸¹ Dalam konteks Kepulauan Sula, pendekatan ini dimanifestasikan dalam bentuk sistem ronda, musyawarah (*Maksaira*), dan jaringan komunikasi sosial yang berfungsi sebagai sistem keamanan kolektif.

81 L. Schirch, *The Little Book of Strategic Peacebuilding*. (Pennsylvania: Good Books. 2015), hlm.21

1. SISKAMLING Bukan Sekadar Ronda, Tetapi Sistem Nilai

Salah satu kekeliruan umum dalam memahami SISKAMLING *Jaga Sula* adalah menganggapnya sebatas kegiatan fisik ronda malam. Padahal, pada tataran yang lebih dalam, sistem ini adalah manifestasi nilai sosial dan spiritual yang melekat pada masyarakat Sula.

Empat pilar utama menjadi fondasi model SISKAMLING *Jaga Sula* keamanan ini:

- a. Partisipasi aktif warga, di mana setiap individu memiliki tanggung jawab sosial atas keamanan lingkungan.
- b. Keadilan sosial, melalui pembagian tugas yang proporsional dan tidak diskriminatif.
- c. Rasa kepemilikan sosial (*sense of belonging*), yang menumbuhkan kesadaran bahwa keamanan adalah hak sekaligus kewajiban bersama.
- d. Pemulihan sosial (*restorasi*), yang mengedepankan penyelesaian damai dan pemulihan hubungan sosial daripada hukuman semata.

Keempat pilar ini menjadikan *Jaga Sula* sebagai sistem nilai yang hidup, bukan sekadar mekanisme kontrol.

Dalam penelitian *Lembaga Kajian Sosial Maluku Utara* pada Tahun 2022, ditemukan bahwa lebih dari 75% warga Kabupaten Kepulauan Sula menilai ronda malam bukan beban, tetapi bentuk ibadah sosial. Ungkapan seperti “ronda itu amal” menunjukkan internalisasi nilai spiritual dalam praktik sosial.

Pendekatan ini selaras dengan konsep *social trust* (kepercayaan sosial) yang dijelaskan oleh Fukuyama dalam *Social Capital and Civil Society*. Menurutnya, masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan sosial tinggi akan lebih mudah mengembangkan mekanisme keamanan yang efektif tanpa paksaan eksternal.⁸²

Dalam konteks *Jaga Sula*, setiap individu merasa menjadi bagian dari sistem yang lebih besar. Saat satu warga berjaga, yang lain merasa aman dan ketika satu warga lengah, yang lain menegur bukan karena otoritas, melainkan karena kasih sosial atau pertalian sosial yang terbangun diatas kebersamaan, dan bukan hanya sekedar kekeluargaan.

Hal ini juga memperlihatkan adanya *mutual moral surveillance*, yaitu pengawasan moral antarwarga berbasis solidaritas atau panggilan kebersamaan dan persaudaraan. Dalam masyarakat tradisional seperti Sula, bentuk pengawasan ini jauh lebih efektif daripada pengawasan birokratis yang bersifat *top-down*.

82 F. Fukuyama, *Social Capital and Civil Society*. (Washington DC: IMF Institute 2000), hlm. 27



Gambar Kunjungan Linmas dan Bhabinkamtibmas Desa Leko Kadai
Kecamatan Mangoli Barat Menyambangi Warga Setempat

Dengan demikian, SISKAMLING *Jaga Sula* merupakan sistem keamanan yang berakar pada nilai, bukan sekadar prosedur. Ia menjadikan keamanan sebagai cermin dari moralitas sosial bukan hanya indikator ketiadaan kejahatan, tetapi kehadiran kepercayaan bahwa keamanan adalah tugas semua orang.

2. Struktur dan Mekanisme SISKAMLING Jaga Sula

Secara operasional, SISKAMLING *Jaga Sula* berjalan melalui struktur sosial yang fleksibel namun teratur. Di setiap desa terdapat tiga komponen utama yang saling terhubung:

Tabel 7
Komponen dan Peran SISKAMLING Jaga Sula

KOMPONEN	PERAN DAN FUNGSI UTAMA
Pos Jaga (SISKAMLING)	Menjadi titik koordinasi kegiatan ronda, penyimpanan peralatan keamanan (senter, kentongan, HT), serta tempat musyawarah singkat warga.
Koordinator Kampung	Biasanya tokoh muda atau anggota organisasi Pemuda yang bertanggung jawab atas jadwal jaga, absensi, dan pelaporan insiden ke aparat desa.
Tokoh Adat dan Tokoh Agama	Menjadi lembaga penengah dan pemberi legitimasi moral atas keputusan sosial yang diambil terkait keamanan.

Kegiatan jaga dilakukan dengan sistem bergilir dua hingga empat orang tiap malam dengan jadwal yang disusun menggunakan pendekatan *Maksaira*. Selain memantau keamanan, ronda juga berfungsi sosial, membangun komunikasi antarwarga, membantu yang sakit, hingga mengingatkan jam malam bagi anak muda.

Mekanisme ini menggambarkan praktik *social embeddedness* yang dijelaskan oleh Granovetter, bahwa tindakan ekonomi dan sosial tidak pernah lepas dari jaringan relasi sosial dan moral.⁸³ Dalam konteks Sula, aktivitas ronda adalah sarana memperkuat *bonding social capital* ikatan sosial dalam kelompok kecil yang menjadi fondasi stabilitas komunitas.

83 M. Granovetter, “Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness.” *American Journal of Sociology*, 91(3), (1985), hlm.482

Secara empiris, data lapangan (Polres Kepulauan Sula, 2025) menunjukkan bahwa sejak diaktifkannya SISKAMLING *Jaga Sula* di beberapa Desa yang telah diaktivasi SISKAMLING di Kepulauan Sula, jumlah gangguan keamanan ringan menurun utamanya pada perkelahian dan kriminalitas lain yang timbul karena pesta ronggeng/joget. Penurunan ini dikaitkan langsung dengan meningkatnya partisipasi warga dan efektivitas komunikasi antarperan sosial. Dengan kata lain, *Jaga Sula* bukan hanya simbol sosial, tetapi sistem yang terbukti efektif dan terukur.

3. Relasi antara Formalitas Negara dan Informalitas Komunitas

Salah satu keunikan model keamanan di Kepulauan Sula adalah kemampuannya mengintegrasikan dua sistem yang sering kali dianggap bertentangan dalam penerapannya yakni Sistem Keamanan Lingkungan antara formalitas negara dan informalitas komunitas sosial di setiap Desa.

Dalam praktiknya, aparat keamanan (Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Pemerintah Desa) tidak mengambil alih peran masyarakat, melainkan berfungsi sebagai *fasilitator sosial*. Hubungan ini bersifat simbiotik: aparat memberi dukungan hukum dan pelatihan teknis, sementara masyarakat memberi informasi, legitimasi sosial, dan dukungan moral.

Pendekatan ini mencerminkan konsep *co production of security* yakni produksi bersama keamanan antara masyarakat dan institusi formal. Menurut model ini, keberhasilan keamanan publik

tidak bergantung semata pada regulasi, tetapi pada partisipasi aktif warga dalam setiap tahap pelaksanaannya.

Dalam konteks Sula, praktik ini terlihat pada:

- a. Mediasi sosial: kasus kecil seperti pertengkaran antarwarga diselesaikan lebih dulu di tingkat adat (*Bau Pia*) sebelum dibawa ke ranah hukum.
- b. Koordinasi dua arah: laporan warga diteruskan langsung ke aparat melalui sistem komunikasi sederhana (radio, WhatsApp).
- c. Kehadiran simbolik aparat: polisi dan Babinsa sering ikut ronda sebagai bentuk kehadiran moral, bukan pengawasan koersif.

Pendekatan ini mengubah wajah keamanan menjadi humanistic, aparat tidak lagi “mengawasi masyarakat”, melainkan “berjalan bersama masyarakat”.

Soetomo dalam *Pembangunan Berbasis Komunitas* menyatakan bahwa integrasi kelembagaan lokal dan formal menjadi prasyarat keberlanjutan pembangunan sosial.⁸⁴ *Jaga Sula* memenuhi prinsip itu dengan menjadikan negara mitra moral, bukan penguasa sosial.

Dengan demikian, hubungan formal-informal di Sula menjadi model hibrid yang efektif, negara hadir tanpa mendominasi, masyarakat aktif tanpa memberontak. Ini adalah harmoni antara kekuasaan dan kearifan.

84 Soetomo. *Pembangunan Berbasis Komunitas*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015), hlm. 113

4. Transformasi Sosial Melalui Jaga Sula

Lebih jauh, *Jaga Sula* tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga mentransformasi cara masyarakat memahami tanggung jawab sosial. Dalam Dua tahun terakhir, sistem ini telah menghasilkan dampak sosial yang signifikan:

- a. Meningkatnya kohesi sosial: warga lebih sering berinteraksi lintas marga dan generasi.
- b. Menurunnya tingkat konsumsi miras dan kekerasan domestik di beberapa desa di Kepulauan Sula.
- c. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat Kepolisian, TNI dan Hansip, yang sebelumnya rendah akibat jarak komunikasi.

Proses ini menunjukkan bahwa keamanan partisipatif tidak hanya mencegah kejahatan, tetapi membangun *civic virtue* kebajikan sosial yang memperkuat demokrasi lokal. Sebagaimana diuraikan oleh Putnam dalam *Making Democracy Work*, keberhasilan pemerintahan lokal sangat bergantung pada modal sosial masyarakatnya, bukan semata struktur kelembagaan.⁸⁵ *Jaga Sula* memperlihatkan bahwa masyarakat dengan modal sosial tinggi dapat melahirkan tata kelola keamanan yang demokratis, efisien, dan bermartabat.

85 R. D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. (New York: Simon & Schuster. 2000), hlm. 167

5. Refleksi Faktual: Jaga Sula sebagai Model Ketahanan Sosial

Dari perspektif akademik, *Jaga Sula* dapat dipandang sebagai model ketahanan sosial yaitu sistem keamanan berbasis nilai, budaya, dan solidaritas komunitas. Model ini memiliki tiga keunggulan konseptual:

- a. Berakar lokal (*local rootedness*) yakni menjadikan adat dan budaya sebagai basis moral keamanan.
- b. Fleksibel struktural atau mampu beradaptasi dengan mekanisme formal negara tanpa kehilangan karakter komunitas.
- c. Sustainable secara sosial karena ditopang oleh nilai, bukan oleh biaya.

Dalam teori *resilience society*, ketahanan sosial didefinisikan sebagai kemampuan suatu sistem untuk bertahan, menyesuaikan diri, dan berkembang setelah mengalami tekanan.⁸⁶ *Jaga Sula* memenuhi ketiga unsur itu: bertahan melalui adat, menyesuaikan diri dengan negara, dan berkembang bersama teknologi.

Dengan demikian, konsep *Jaga Sula* tidak hanya penting bagi Kepulauan Sula, tetapi relevan sebagai model pengembangan keamanan berbasis komunitas di wilayah kepulauan Indonesia yang memiliki kondisi sosial serupa.

86 C. S. Holling, "Understanding the Complexity of Economic, Ecological, and Social Systems." *Ecosystems*, 4(5), (2001), hlm. 364

BAB V

DASAR HUKUM

SISKAMLING JAGA SULA

Keamanan masyarakat merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan sosial, ekonomi, dan budaya suatu wilayah. Sistem keamanan yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kehadiran aparat negara, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keselamatan lingkungan. Di Kepulauan Sula, konsep *SISKAMLING Jaga Sula* muncul sebagai perwujudan nyata dari prinsip keamanan komunitas yang berpijak pada norma hukum nasional, sekaligus berakar pada kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun.

Sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo dalam *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Hukum harus hidup dalam masyarakat; ia tidak berhenti pada pasal, tetapi bekerja di antara manusia yang menghidupkannya.⁸⁷ Pernyataan ini menegaskan bahwa hukum bukan sekadar teks, melainkan panduan moral dan administratif yang menuntun tindakan warga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Sula, hukum menjadi dasar formal bagi masyarakat untuk membangun sistem keamanan partisipatif yang dikenal dengan istilah *Jaga Sula*.

87 Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti 2009). hlm. 45

Keberadaan dasar hukum ini sangat penting, karena memastikan bahwa setiap langkah warga dalam menjaga keamanan tidak bersifat arbitrer atau bertentangan dengan regulasi nasional. Hal ini selaras dengan prinsip *Rule of Law* yang menyatakan bahwa seluruh tindakan warga negara, termasuk kegiatan komunitas dalam keamanan, harus berada dalam kerangka hukum yang jelas.⁸⁸

A. UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1): Fondasi Filosofis dan Konstitusional

Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.⁸⁹ Pasal ini memiliki dua dimensi utama, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Warga tidak hanya berhak untuk dilindungi, tetapi juga memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk turut menjaga keamanan lingkungannya. Dalam terminologi hukum, kewajiban ini bersifat partisipatif dan preventif, yaitu warga aktif terlibat dalam pencegahan gangguan keamanan dan penyelenggaraan ketertiban sosial.⁹⁰

1. Tafsir Konstitusional

Menurut Jimly Asshiddiqie, pasal ini menegaskan pertahanan semesta (*Total Defense Concept*), yang menekankan bahwa

88 P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum: Teori dan Metodologi*. (Jakarta: Kencana. 2017). hlm.102

89 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 30 Ayat 1

90 D. Hendarso, *Hukum dan Keamanan Sosial di Indonesia*. (Jakarta: Kencana. 2018), hlm.74

pertahanan negara bukan hanya tugas TNI atau Polri, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh warga negara.⁹¹ Dengan kata lain, setiap warga negara merupakan elemen penting dalam sistem pertahanan dan keamanan nasional, termasuk pada skala mikro seperti RT/RW atau desa.

Tafsir konstitusional ini memiliki implikasi langsung terhadap praktik SISKAMLING. Ketika warga Kepulauan Sula membentuk pos ronda atau melakukan patroli lingkungan, mereka bukan hanya menjalankan aktivitas sosial, melainkan mengekspresikan kewajiban konstitusional yang dilindungi dan diatur oleh undang-undang. Praktik ini membentuk kesadaran hukum kolektif, di mana warga memahami bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama, bukan monopoli aparat.⁹²

2. Integrasi dengan Nilai Lokal

Dalam konteks Kepulauan Sula, implementasi Pasal 30 ayat (1) tidak terlepas dari sistem nilai lokal, seperti *Maksaira* (musyawarah kampung), *jaga sesama* (solidaritas sosial), dan *saling bantu* dalam situasi krisis. Nilai-nilai ini memperkuat legalitas moral dari partisipasi warga, sehingga SISKAMLING tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sah secara sosial dan budaya.

91 Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*. (Jakarta: Sekretariat Negara. 2010), hlm. 88

92 D. Hendarso, *Hukum dan Keamanan Sosial di Indonesia*. (Jakarta: Kencana. 2018), hlm.77

Nurcholish Madjid menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akar moral komunal, di mana tanggung jawab tidak berhenti pada individu, tetapi melekat pada komunitas.⁹³ Filosofi ini menjadi landasan bagi keberhasilan *SISKAMLING Jaga Sula*, yang menekankan bahwa keamanan bukan sekadar tugas aparat, melainkan kewajiban moral seluruh warga di Kepulauan Sula.

3. Implikasi Praktis

Dari perspektif praktik, Pasal 30 ayat (1) memberikan beberapa implikasi bagi *SISKAMLING Jaga Sula*:

- a. Partisipasi wajib warga: setiap kepala keluarga dan pemuda di sula terlibat dalam jadwal ronda, patroli, atau pengawasan lingkungan.
- b. Koordinasi dengan aparat formal: Bhabinkamtibmas dan Babinsa berperan sebagai pendamping, bukan pengendali utama.
- c. Pencegahan dan mitigasi risiko sosial: warga dilatih untuk mengenali potensi konflik atau gangguan kriminal sejak dini, sehingga tindakan preventif lebih dominan dibanding represif.

Dengan pendekatan ini, *SISKAMLING Jaga Sula* menjadi manifestasi konkret dari pertahanan rakyat semesta (*total people's security*), sesuai amanat konstitusi. Keamanan menjadi bagian dari kehidupan sosial, bukan sekadar prosedur administratif, sehingga membangun masyarakat yang tangguh, disiplin, dan responsif terhadap gangguan sosial.

93 Nurcholish Madjid. *Etika Sosial dan Spiritualitas Nusantara*. (Yogyakarta: LKIS. 2003), hlm. 59

B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan peran Polri sebagai institusi yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang membangun kemitraan dengan komunitas dalam menjaga keamanan. Undang-Undang ini menjadi landasan hukum formal bagi pelaksanaan SISKAMLING di tingkat desa, termasuk di Kepulauan Sula.

1. Fungsi Polri Menurut Undang-Undang 2 Tahun 2002

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menetapkan fungsi Polri secara spesifik:

- a. Pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Penegak hukum,
- c. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Artinya, Polri memiliki peran ganda: menjaga ketertiban sekaligus menjalin hubungan kemitraan dengan warga. Dengan prinsip ini, program SISKAMLING Jaga Sula dapat berjalan optimal karena aparat bukan sekadar pengawas, tetapi fasilitator dan mentor masyarakat.

Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa kepolisian dibantu oleh:

- a. Kepolisian khusus;
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (*community policing*).

Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi warga untuk membentuk pos ronda, FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat), dan sistem patroli lingkungan.

**2. Implementasi Undang-Undang di Kepulauan Sula:
Kolaborasi Aparat dan Komunitas**

Dalam praktiknya, penerapan UU ini di Kepulauan Sula melibatkan beberapa langkah konkret:

Tabel 8
Bentuk, Keterangan dan Contoh Implementasi
UU Nomor 2 Tahun 2002

Bentuk Implementasi	Keterangan	Contoh di Sula
Pendampingan BABINKAM-TIBMAS	Polri memberikan arahan teknis ronda dan koordinasi keamanan	BABINKAMTIBMAS ikut ronda malam bersama warga Desa Falabisahaya
Pelatihan komunikasi darurat	Memberi keterampilan warga menghadapi bencana atau gangguan criminal	Warga Mangoli dilatih cara melaporkan kecelakaan laut menggunakan HT atau WA
Pelaporan gangguan melalui teknologi	Mengoptimalkan sistem komunikasi cepat antar warga	Grup WhatsApp desa untuk laporan pencurian ikan dan gangguan laut

Pendekatan ini merupakan implementasi prinsip *Community Policing* (Polmas), yang menekankan kesetaraan, kemitraan, partisipasi aktif warga, dan transparansi tindakan polisi.⁹⁴

94 R. Arifin, *Model Pemolisian Partisipatif di Wilayah Terpencil Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2021), hlm. 108

3. Nilai Hukum dan Sosial

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menekankan harmoni antara formalitas hukum dan kearifan lokal. Di Kepulauan Sula, hal ini tercermin pada:

- a. Pengaturan jadwal ronda berbasis dusun: menyesuaikan aktivitas petani, nelayan dan pola kehidupan warga.
- b. Mediasi konflik berbasis adat: sebelum membawa kasus ke aparat formal, warga menggunakan mekanisme *Maksaira* atau musyawarah adat.
- c. Partisipasi sukarela: setiap warga yang berusia 17 tahun ke atas terlibat secara aktif, sesuai ketentuan pelaksana SISKAMLING.

Dengan integrasi ini, SISKAMLING Jaga Sula bukan sekadar patuh hukum, tetapi juga memperkuat Integrasi sosial dan nilai moral di Sula, selaras dengan prinsip Polri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat.

4. Implikasi Praktis untuk SISKAMLING Jaga Sula

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberi legitimasi bagi masyarakat untuk mengelola keamanan secara mandiri, dengan dukungan aparat, melalui:

- a. Pembentukan pos jaga di desa pesisir Seperti di Desa Waisakai atau Wailoba
- b. Penyusunan jadwal ronda yang fleksibel dan berbasis gotong royong
- c. Pelaporan rutin ke Polsek atau Babinkamtibmas melalui forum warga (bacarita kampung).

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hukum nasional dapat diinternalisasi secara lokal, menyeimbangkan kepentingan negara dan komunitas, sehingga keamanan menjadi bagian dari budaya partisipatif masyarakat Sula.

C. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING) Sebagaimana telah di Ubah Dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2007 (*Perkap 23/2007*) merupakan landasan teknis-operasional utama bagi pelaksanaan SISKAMLING di seluruh Indonesia namun telah diubah dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa. Dalam Perkap Nomor 4 Tahun 2020 terjadi perubahan nama dari SISKAMLING Menjadi SATKAMLING, namun esensinya sama sehingga tidak membingungkan pembaca terutama petugas teknis SISKAMLING jaga sula maka istilah dan regulasi masih merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING).

Peraturan ini memberi pedoman jelas bagi penyelenggaraan keamanan lingkungan, termasuk di daerah kepulauan seperti Sula, di mana karakter geografis dan sosial memerlukan adaptasi lokal.

1. Tujuan dan Fungsi SISKAMLING

Pasal 2 menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan SISKAMLING adalah:

- a. Menciptakan situasi aman, tertib, dan tentram di lingkungan masing-masing.
- b. Menumbuhkan kesadaran warga untuk ikut menanggulangi setiap potensi gangguan keamanan.

Pasal 4 menjelaskan fungsi SISKAMLING sebagai sarana warga dalam memenuhi kebutuhan rasa aman melalui dua strategi:

- a. Pre-emptif: mengamati gejala awal potensi gangguan dan mengidentifikasi sumber laten masalah (misalnya potensi konflik antarwarga akibat batas tanah).
- b. Preventif: mencegah terjadinya gangguan melalui pengaturan, patroli, rondaan, dan kegiatan sosial lainnya.

Di Kepulauan Sula, konsep ini diterjemahkan dalam praktik:

- a. Pos ronda dibangun di Kantor Desa, Pasar, dan jalan utama di setiap desa, bukan hanya di pusat pemukiman.
- b. Jadwal ronda digilir berdasarkan RT dan manajemen pola aktivitas Masyarakat terutama petani dan nelayan agar tidak mengganggu pekerjaannya.
- c. Warga yang sedang patroli juga memberikan edukasi keamanan kepada masyarakat (misalnya bahaya miras, kekerasan seksual, keselamatan laut dan pencegahan kebakaran rumah kayu).

2. Struktur Organisasi SISKAMLING

Pasal 5 dan 6 Perkap 23/2007 menyebutkan komponen SISKAMLING:

- a. FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat): memfasilitasi kepentingan warga dan membina pelaksanaan SISKAMLING.
- b. Ketua SISKAMLING: memimpin musyawarah warga dan pengaturan jadwal ronda.
- c. Pelaksana SISKAMLING: warga yang melakukan kegiatan pengamanan secara fisik.

Pasal 8 menegaskan bahwa pelaksana SISKAMLING adalah:

- a. Kepala rumah tangga dan warga laki-laki dewasa minimal 17 tahun.
- b. Ditunjuk melalui musyawarah warga.
- c. Tugasnya meliputi penjagaan, patroli, memberikan peringatan dini, membantu warga, koordinasi dengan aparat, dan melaporkan gangguan ke Polri.

Peraturan tersebut jika Implementasi di Kepulauan Sula Maka Contohnya:

- a. Di Desa Fagudu, setiap pos ronda memiliki 6 warga yang bergilir menjaga malam selama 2 minggu, termasuk patroli di pelabuhan maupun taman kota.
- b. Setiap patroli rutin melibatkan Ketua RT, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan minimal satu pemuda dari satu RT.
- c. Warga dilatih menggunakan HT untuk melaporkan kejadian darurat ke Polsek Sanana atau melalui Telepon ke layanan 110.

3. Mekanisme Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 9 Perkap mengatur mekanisme pelaporan dan evaluasi SISKAMLING:

- a. Setiap pelanggaran atau gangguan dilaporkan ke Bhabinkamtibmas dan Babinsa.
- b. Evaluasi dilakukan setiap bulan melalui musyawarah warga yang dipimpin Ketua SISKAMLING dan FKPM.
- c. *Feedback* digunakan untuk memperbaiki jadwal ronda, patroli, dan sistem komunikasi.

Di Kepulauan Sula, mekanisme ini diadaptasi secara kreatif:

- a. Warga menggunakan grup WhatsApp desa untuk laporan cepat atau telepon ke layanan 110 Polres Kepulauan Sula.
- b. Evaluasi rutin dilakukan di kantor desa, sekaligus menggabungkan agenda sosial seperti gotong royong atau pengajian malam, agar keamanan menjadi bagian dari kehidupan sosial.

4. Nilai Sosial dan Moral

SISKAMLING Jaga Sula bukan sekadar kegiatan fisik, tetapi manifestasi nilai sosial dan moral:

- a. Partisipasi aktif warga memperkuat ikatan sosial di Kepulauan Sula.
- b. Ronda malam menjadi ajang transfer pengetahuan antara generasi ke generasi.
- c. Sistem pengawasan kolektif menanamkan rasa memiliki terhadap kampung (*sense of ownership*).

Seperti dijelaskan oleh Heriyanto, Keamanan yang efektif tidak hanya lahir dari penegakan hukum, melainkan dari pendidikan nilai di masyarakat.⁹⁵ Dengan demikian, SISKAMLING di Sula menginternalisasi peraturan formal ke dalam budaya lokal, sehingga warga merasa memiliki tanggung jawab pribadi dan moral terhadap keamanan lingkungan.

D. Perkapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat

Perkapolri Nomor 7 Tahun 2008 (*Perkap 7/2008*) menjadi pelengkap Perkap 23/2007, menegaskan konsep *Polmas* (Pemolisian Masyarakat) yang menekankan kemitraan antara polisi dan masyarakat. Prinsip utama Polmas relevan langsung dengan pelaksanaan SISKAMLING Jaga Sula, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek keamanan.

1. Prinsip Utama Polmas

Pasal 6 Perkap 7/2008 menyebutkan prinsip utama pemolisian masyarakat:

Dalam konteks Jaga Sula, prinsip ini diwujudkan melalui:

- a. Forum Warga Aman Desa (FWAD): Diskusi rutin polisi, aparat desa, tokoh adat, pemuda, dan warga.
- b. Pelatihan Deteksi Dini Konflik: Aparat Desa, Tokoh agama

95 A. Heriyanto, *Pemberdayaan Komunitas dalam Ketahanan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2019), hlm. 102

dan pemuda dilatih mengenali potensi gesekan sosial sebelum membesar.

- c. Program Polisi HADIR: Adalah akronim dari Handal, Disiplin dan Responsif. Aparat ditengah-tengah masyarakat dan siap membantu pada saat diperlukan.

Tabel 9

Prinsip dan Pelaksanaan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat

No	Prinsip	Penjelasan Praktik di Sula
1	Komunikasi Intensif	Polisi dan warga bertatap muka rutin di Forum Warga Aman Desa (FWAD) atau nama lain.
2	Kesetaraan	Musyawarah desa menempatkan aparat dan warga setara, hak dan kewajiban dihormati.
3	Kemitraan	Polisi berkolaborasi dengan aparat desa, tokoh adat, agama, dan pemuda untuk patroli dan edukasi sosial.
4	Transparansi	Setiap laporan gangguan dibuka untuk warga melalui papan pengumuman dan grup WA desa.
5	Akuntabilitas	Polri dan Ketua SISKAMLING melaporkan hasil ronda dan patroli setiap bulan.
6	Partisipasi	Seluruh warga bergiliran ronda malam dan ikut evaluasi kegiatan keamanan.
7	Personalisasi	Polisi membangun hubungan pribadi dengan warga untuk memudahkan komunikasi dan kepercayaan.
8	Desentralisasi	Keputusan patroli dan jadwal ronda dibuat oleh warga setempat.
9	Otonomisasi	Ketua SISKAMLING diberi kewenangan mengatur jadwal dan lokasi ronda.
10	Proaktif	Polisi dan warga melakukan patroli dan pencegahan gangguan tanpa menunggu laporan.
11	Orientasi pada Pemecahan Masalah	Forum FWAD membahas potensi konflik, misalnya sengketa batas tanah antar Desa.
12	Orientasi pada Pelayanan	Polisi membantu masyarakat pesisir dalam keselamatan laut dan keamanan aset nelayan.

Sejalan dengan Arifin dalam *Model Pemolisian Partisipatif di Wilayah Terpencil Indonesia*: Keberhasilan Polmas terletak pada kemampuan masyarakat menginternalisasi nilai keamanan sebagai kebutuhan kolektif, bukan instruksi eksternal.⁹⁶ Jaga Sula bukan sekadar menegakkan aturan, melainkan membangun budaya keamanan partisipatif yang berakar pada kearifan lokal.

E. Surat Edaran Mendagri Nomor 300.1.4/e.1/BAK (3 September 2025)

Surat Edaran Mendagri ini merupakan kebijakan baru untuk memperkuat integrasi SISKAMLING ke dalam sistem pemerintahan daerah. Fokus utama adalah sinergi antara pemerintah daerah dan komunitas lokal, yang sangat penting untuk wilayah kepulauan seperti Sula.

1. Pokok Poin Edaran

Dalam poin (3) huruf (b) disebutkan: Pemerintah daerah wajib mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan SISKAMLING berbasis kearifan lokal sebagai bagian dari upaya pencegahan gangguan ketertiban umum.⁹⁷

Implikasinya bagi Jaga Sula:

- a. Alokasi Dana Desa: Dana desa dapat digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan pos ronda, pengadaan lampu

96 R. Arifin, *Model Pemolisian Partisipatif di Wilayah Terpencil Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kajian Keamanan. 2021), hlm.108

97 Surat Edaran Mendagri Nomor 300.1.4/e.1/BAK, Tanggal 3 September 2025

- penerangan, HT, dan sarana komunikasi.
- b. Integrasi dalam RPJMDes: Indikator keamanan lingkungan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, sehingga keamanan menjadi prioritas pembangunan sosial.
 - c. Sistem Pelaporan Terpadu: Semua laporan gangguan keamanan diintegrasikan dengan Command Center Kabupaten, memudahkan koordinasi antar desa.

2. Relevansi dengan Kepulauan Sula

Karakter kepulauan yang terpisah-pisah menuntut dukungan logistik, koordinasi lintas desa, dan pendanaan berkelanjutan. Dengan surat edaran ini, pemerintah daerah memiliki dasar hukum untuk:

- a. Menyokong kegiatan SISKAMLING dengan sarana fisik dan dana rutin.
- b. Memastikan pelaporan dan patroli terkoordinasi secara digital maupun fisik.
- c. Menginternalisasi kearifan lokal, sehingga keamanan tidak kehilangan identitas sosial dan budaya.

3. Integrasi Hukum dan Budaya Lokal

Surat edaran ini menegaskan sinergi regulasi formal dan praktik komunitas:

- a. Warga tetap menggunakan musyawarah (*Maksaira*) untuk menentukan jadwal ronda dan lokasi pos.
- b. Aparat negara memberikan dukungan, bukan dominasi.

- c. Sistem ini menguatkan keamanan kolektif yang adaptif, sesuai filosofi *Jaga Sula*.

Seperti disimpulkan oleh Budiman Keamanan terbaik adalah yang lahir dari nilai-nilai lokal yang hidup di hati masyarakat.⁹⁸ Dengan demikian, dasar hukum nasional (UUD 1945, UU Polri, Perkap, dan Surat Edaran Mendagri) telah diterjemahkan secara efektif ke dalam praktik SISKAMLING Jaga Sula, membentuk sistem keamanan partisipatif, berkelanjutan, dan berakar pada kearifan local di Kabupaten Kepulauan Sula.

98 S. Budiman, *Keamanan Sosial dan Gotong Royong Masyarakat Nusantara*. Surabaya: Penerbit Nusantara. 2021). hlm. 44

BAB VI

STRATEGI IMPLEMENTASI SISKAMLING JAGA SULA

A. Pembangunan Sistem dan Struktur

1. Pembentukan Pos Keamanan Terpadu

Salah satu langkah strategis dalam mengimplementasikan SISKAMLING *Jaga Sula* adalah membangun pos keamanan terpadu (PKT) di setiap Kecamatan Khususnya Desa. Pos ini bukan hanya tempat berjaga, tetapi pusat koordinasi sosial, informasi, dan tindakan komunitas masyarakat.

Pos keamanan terpadu di Sula dirancang memiliki tiga fungsi utama:

- a. Fungsi pengawasan: tempat ronda malam dan kontrol situasi kampung.
- b. Fungsi komunikasi: pusat informasi bagi warga terkait kejadian sosial, lingkungan, atau bencana.
- c. Fungsi sosial: wadah diskusi, pelatihan keamanan, dan kegiatan pemuda.

Dalam desain sosialnya, pos ini dibangun secara gotong royong, bukan proyek formal. Bangunan sederhana dari beton atau kayu dan atap sudah cukup, asalkan representatif dan berfungsi

secara sosial. Kuncinya bukan megahnya bangunan, tetapi kehadiran manusia di dalamnya yang terasa nyaman.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ritzer dalam *Sociological Theory*, institusi sosial menjadi efektif ketika terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari, bukan ketika hanya menjadi simbol formal.⁹⁹ Dengan semangat itu, pos keamanan di Sula harus hidup dan dinamis, bukan sekadar papan nama di pinggir jalan.

2. Integrasi dengan Sistem Kelurahan/Desa

Agar berkelanjutan, sistem *Jaga Sula* harus diintegrasikan dengan struktur formal pemerintahan desa. Integrasi ini dilakukan melalui tiga jalur:

- a. Administratif: memasukkan kegiatan SISKAMLING dalam *Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)* setiap tahun.
- b. Kelembagaan: menunjuk satu perangkat desa atau kepala dusun sebagai *koordinator keamanan komunitas*.
- c. Regulatif: menetapkan *Peraturan Desa (Perdes) tentang Keamanan dan Ketertiban Sosial* sebagai dasar hukum local di Setiap Desa.

Dengan begitu, *Jaga Sula* bukan sekadar gerakan sosial spontan, tetapi menjadi program resmi yang diakui secara hukum. Menurut Soetomo dalam *Pembangunan Berbasis Komunitas*, keberhasilan program sosial bergantung pada sinkronisasi antara

99 G. Ritzer, *Sociological Theory*. New York: McGraw-Hill. 2010), hlm. 211

inisiatif lokal dan sistem formal.¹⁰⁰ Desa yang kuat adalah desa yang menggabungkan kearifan sosial dengan tata kelola administratif.

B. Pelibatan Warga dan Lembaga Lokal

1. Peran Pemuda, Tokoh Agama, Perempuan, dan Guru

Kekuatan utama SISKAMLING Jaga Sula terletak pada pelibatan semua lapisan masyarakat. Keamanan yang kokoh tidak bisa dibangun oleh aparat semata, tetapi oleh partisipasi lintas peran sosial:

Tabel 10

Kelompok dan Peran Strategis Peran Pemuda, Tokoh Agama, Perempuan, dan Guru

Kelompok	Peran Strategis
Pemuda	Garda depan keamanan sosial; penggerak ronda dan inovator komunikasi digital.
Aparat Desa dan Tokoh Agama	Sumber nilai moral; mengajarkan keamanan sebagai bagian dari ibadah dan akhlak.
Perempuan	Agen sosial yang menjaga ketertiban keluarga dan keamanan lingkungan dan edukasi KDRT serta Kekerasan Seksual.
Guru	Pembentuk kesadaran sejak dini; memasukkan nilai <i>Jaga Sula</i> dalam pendidikan karakter.

100 Soetomo. *Pembangunan Berbasis Komunitas*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 89

Kolaborasi ini menjadikan *Jaga Sula* sebagai gerakan sosial lintas usia dan lintas sektor. Dalam praktiknya, peran perempuan sangat penting. Mereka dapat memimpin program “*Jaga Anak, Jaga Keluarga*” kegiatan pengawasan sosial terhadap perilaku remaja, kesehatan keluarga, dan lingkungan bersih. Hal ini memperkuat teori *social surveillance* dari Foucault, bahwa pengawasan sosial paling efektif justru dilakukan oleh komunitas, bukan oleh otoritas.¹⁰¹

2. Revitalisasi Nilai Gotong Royong dalam Praktik Keamanan

Gotong royong bukan sekadar tradisi, tetapi sistem sosial yang menopang keamanan. Di Kepulauan Sula, nilai ini sudah lama hidup dalam budaya *Wa Lima* atau *baku tolong* dan *Mana Jaga* atau *baku jaga*. Namun, dalam konteks modern, gotong royong perlu direvitalisasi agar relevan dengan tantangan masa kini.¹⁰²

Langkah-langkah revitalisasi meliputi:

- a. Membangun kegiatan sosial berbasis keamanan, seperti “Kerja Bakti Amankan Kampung.”
- b. Menerapkan sistem keamanan kolektif, di mana satu keluarga wajib ikut menjaga pos minimal dua kali sebulan.
- c. Membangun solidaritas antar dusun, misalnya dengan sistem “pinjam tenaga ronda” saat perayaan besar.

101 M.Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings*. (New York: Pantheon. 1980), hlm. 98

102 Koentjaraningrat. *Kebudayaan dan Masyarakat di Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka 2002), hlm. 145

Gotong royong ini bukan hanya cara bekerja, tetapi cara membangun rasa memiliki terhadap keamanan bersama. Sebagaimana ditulis oleh Koentjaraningrat, gotong royong adalah lem sosial bangsa Indonesia yang mengikat keberlanjutan komunitas.

C. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi

1. Aplikasi Laporan Masyarakat Berbasis Digital

Dalam era digital, *Jaga Sula* perlu beradaptasi dengan teknologi informasi sederhana namun efektif. Salah satu inovasi yang dapat diterapkan adalah aplikasi pelaporan masyarakat berbasis pesan singkat (SMS/WhatsApp) atau telepon melalui layanan 110 Polres Kepulauan Sula. Melalui sistem ini, warga dapat melaporkan kejadian mencurigakan, bencana, atau konflik kecil langsung ke koordinator pihak keamanan maupun pos keamanan.

Formatnya sederhana: “Laporan: [Nama Desa] – [Jenis Kejadian] – [Waktu] – [Keterangan singkat].” Data laporan tersebut akan dikompilasi oleh tim keamanan desa dan diteruskan ke pihak terkait. Aplikasi sederhana seperti ini terbukti efektif dalam *community policing* di wilayah pedesaan di Asia Tenggara.¹⁰³

Tujuan bukan hanya kecepatan respon, tetapi juga menumbuhkan partisipasi digital warga. Warga merasa punya saluran formal untuk berkontribusi menjaga keamanan tanpa harus datang langsung ke pos ronda.

103 C. H. Lee, *Community Policing in Rural Asia*. (Singapore: Springer. 2017), hlm. 202

2. Sistem Informasi Keamanan Desa

Selain pelaporan digital, desa juga dapat mengembangkan Sistem Informasi Keamanan Desa (SIKADES) sebuah basis data lokal yang memuat:

- a. Profil warga,
- b. Peta rawan keamanan,
- c. Jadwal ronda,
- d. Data peristiwa sosial,
- e. Statistik tindak kejahatan lokal.

Sistem ini bisa dijalankan dengan komputer sederhana atau laptop desa, dikelola oleh operator lokal. Hasilnya, desa memiliki peta risiko keamanan yang dapat digunakan untuk perencanaan dan evaluasi. Menurut teori *Data-Driven Governance*, kebijakan lokal yang berbasis data lebih adaptif dan efisien.¹⁰⁴ Dengan SIKADES, *Jaga Sula* melangkah ke arah keamanan berbasis pengetahuan lokal (*knowledge-based security*).

D. Pendanaan dan Keberlanjutan Program

1. Skema Dana Sosial, CSR, dan Gotong Royong

Salah satu tantangan utama program keamanan komunitas adalah keberlanjutan pendanaan. Untuk itu, *Jaga Sula* menggunakan model pembiayaan hybrid (campuran):

104 R. Heeks, *Information and Communication Technology for Development (ICT4D): Theories and Practices*. (London: Routledge. 2018), hlm. 34

- a. Dana Sosial Desa dari *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)* untuk kegiatan keamanan.
- b. *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari perusahaan lokal seperti di Desa Falabisahaya, terutama sektor kehutanan, perikanan atau perkebunan.
- c. Gotong Royong Warga, berupa iuran kecil untuk perawatan pos, lampu, dan alat komunikasi.

Skema seperti ini sudah berhasil diimplementasikan di beberapa desa pesisir di Nusa Tenggara, di mana dana sosial dikombinasikan dengan swadaya warga untuk mendukung keberlanjutan pos ronda.¹⁰⁵ Kunci keberhasilan bukan pada jumlah dana, tetapi transparansi dan rasa keadilan dalam pengelolaan.

2. Evaluasi dan Monitoring Berbasis Komunitas

Agar tetap hidup, sistem *Jaga Sula* harus terus dievaluasi. Namun, evaluasi tidak boleh bersifat *top-down*, melainkan partisipatif. Langkah praktisnya:

- a. Setiap tiga bulan, pos keamanan mengadakan *musyawarah evaluasi keamanan*.
- b. Laporan kegiatan dan masalah dicatat dalam *buku jaga kampung*.
- c. Hasil evaluasi disampaikan ke rapat desa untuk tindak lanjut.

105 A. Wibowo, *Inovasi Sosial di Desa Pesisir Indonesia*. (Makassar: LIPI Press. 2020), hlm. 77



Gambar Sambutan Bupati Dalam Pembentukan SISKAMLING di Polres Kepulauan Sula

Model ini mengikuti konsep *Participatory Monitoring and Evaluation (PME)* yang dikembangkan, di mana masyarakat bukan objek evaluasi, tetapi subjek pembelajaran.¹⁰⁶ Dengan model PME, warga Sula tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga belajar dari pengalaman sendiri. Keamanan menjadi proses belajar sosial, bukan sekadar kewajiban administratif.

106 R. Chambers, *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. (London: Intermediate Technology. 1997, hlm. 82

BAB VII

CERITA LAPANGAN

JAGA SULA

Pada bagian ini menyoroti praktik nyata dari semangat SISKAMLING *Jaga Sula* di berbagai wilayah di Kepulauan Sula. Melalui kisah nyata dari warga, pemuda, tokoh adat, dan aparat keamanan, kita dapat melihat bahwa keamanan komunitas bukan hanya konsep administratif, tetapi denyut kehidupan sosial yang dihidupi setiap hari.

Delapan kisah sekaligus napak tilas berikut menggambarkan transformasi kesadaran sosial menuju keamanan kolektif yang berakar pada nilai gotong royong, kearifan lokal, dan solidaritas antarwarga Sulabesi Barat dalam merespon SISKAMLING Jaga Sula.

A. Kisah Pos Kamling di Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat

Desa Ona di Kecamatan Sulabesi Barat dikenal sebagai salah satu desa yang gencar menghidupkan kembali semangat SISKAMLING setelah lama vakum. Siskamli di Desa Ona sudah menjadi tradisi leluhur. Menurut penuturan dari Kepala Desa Ona La Anda Buton bahwa Desa Ona sudah ada Pos Kamling dari saya sendiri masih belum lahir. Oleh keterangan

para tetua kampung, poskamling Desa Ona didirikan atau dibangun pada Tahun 1965.¹⁰⁷



Gambar Rekonstruksi Bangunan Pos SISKAMLING Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat

Sebelumnya, warga hanya mengandalkan aparat desa untuk menanggapi gangguan keamanan seperti pencurian hasil laut atau keributan pemuda. Namun pada Awal Tahun 2025, sekelompok tokoh masyarakat dan pemerintah Desa menggagas untuk mengaktifkan Pos Kamling (yang berarti tempat *penjagaan bersama* dalam bahasa setempat).

Pos ini dibangun di tengah kampung, dengan rancangan sederhana dari bahan beton dan atap seng, dibangun secara gotong royong oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa Ona. Setiap malam, dua regu warga bertugas secara bergantian terdiri dari pemuda, masyarakat, dan perangkat desa.

107 Wawancara Langsung La Anda Buton, Kepala Pemerintahan Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat, Ona 14 November 2025

Namun yang menarik bukan hanya fisiknya, melainkan fungsi sosialnya. Pos Kamling menjadi ruang musyawarah harian: tempat warga membahas keamanan, hasil pertanian, cuaca laut, dan urusan sosial termasuk perkembangan isu-isu lokal, nasional dan internasional.

Dari situ muncul kesepakatan kolektif untuk melarang konsumsi alkohol di tempat umum, mengatur jam malam bagi remaja, dan menjaga kebersihan lingkungan. Hasilnya nyata: menurut keterangan Kepala Desa Ona, angka gangguan keamanan menurun dalam empat bulan terakhir, dan konflik sosial nyaris tidak ada. Lebih dari itu, kepercayaan antarwarga meningkat drastis.¹⁰⁸



Gambar Linmas dan Bhabinkamtibas Desa Ona Melaksanakan apel di Pos SISKAMLING

108 Wawancara Langsung La Anda Buton, Kepala Pemerintahan Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat, Ona 14 November 2025

Dalam catatan lapangan penulis, nelayan Desa Ona berkata: “Dulu *Katong* (kita) jaga diri sendiri, sekarang *Katong* jaga kampung bersama. Kalau orang lewat malam, *Katong* tahu *dong* (mereka) itu siapa. Kalau ada masalah, *Katong* bicarakan di pos ini.”¹⁰⁹

Kisah Desa Ona membuktikan teori “*social capital*” yang dikemukakan oleh Putnam dalam *Bowling Alone*, bahwa keamanan sosial tumbuh ketika masyarakat memiliki ruang untuk berinteraksi secara rutin dan saling percaya.¹¹⁰

B. Gerakan Pemuda “Jaga Laut, Jaga Kampung”

Di Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat, muncul inisiatif unik yang dipelopori oleh kelompok pemuda pesisir bernama “Jaga Laut, Jaga Kampung.” Gerakan ini lahir dari keresahan terhadap meningkatnya aktivitas pencurian ikan oleh nelayan luar daerah dengan menggunakan armada dan jaring pukat harimau yang menghabiskan ikan pada seputaran Desa Ona.¹¹¹

109 Wawancara Langsung Sahram Umamit, Nelayan Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat, Ona 14 November 2025

110 R. D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. (New York: Simon & Schuster. 2000), hlm.22

111 Wawancara Langsung Sahram Umamit, Nelayan Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat, Ona 14 November 2025



Gambar Dialog Tentang Jaga Laut dan jaga Kampung di Desa Ona
Kecamatan Sulabesi Barat

Para pemuda menggabungkan fungsi ronda darat dan laut. Setiap minggu, mereka melakukan patroli laut sederhana dengan perahu kayu sambil mancing ikan, membawa lampu sorot, serta melaporkan aktivitas mencurigakan kepada aparat desa. Mereka tidak bersikap represif, melainkan edukatif.

Selain patroli, mereka juga mengadakan kampanye sosial di sekolah dan masjid tentang pentingnya menjaga laut sebagai sumber hidup. Slogan mereka sederhana namun kuat: *“Kalau laut aman, kampung Tengah tenang.”*¹¹² Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan tokoh agama setempat, yang melihatnya sebagai perluasan makna SISKAMLING bukan hanya menjaga rumah, tetapi juga menjaga ekosistem.

112 Wawancara Langsung Sahram Umamit, Nelayan Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat, Ona 14 November 2025

Menurut penelitian oleh Arifin dalam *Keamanan Sosial Maritim Indonesia*, keterlibatan pemuda dalam patroli sosial maritim dapat meningkatkan deteksi dini terhadap ancaman keamanan ekonomi dan ekologis.¹¹³

Setelah dua bulan berjalan, gerakan ini membawa hasil baik:

- a. Menurunkan pencurian ikan local.
- b. Mengaktifkanpos pantai mini yang dijaga bergantian,
- c. Menumbuhkan rasa tanggung jawab baru di kalangan generasi muda.

Dari informasi lapangan, seorang Kepala Desa Ona berkata: “Kami tidak punya kapal besar, tapi kami punya semangat jaga laut. Kalau laut rusak, kami kehilangan kehidupan.” Gerakan ini menjadi model bahwa SISKAMLING di daerah kepulauan harus adaptif tidak hanya menjaga kampung, tapi juga menjaga ruang hidupnya termasuk laut.¹¹⁴

C. Kearifan Lokal dalam Menyelesaikan Konflik Sosial

Kepulauan Sula memiliki tradisi lama dalam menyelesaikan konflik sosial tanpa kekerasan. Salah satu praktik paling menonjol adalah “*Bau Pia* atau *Baku Bae*” sebuah mekanisme musyawarah yang melibatkan aparat Desa tokoh adat, imam, dan keluarga yang bertikai.

113 M. Arifin, *Keamanan Sosial Maritim Indonesia: Tantangan dan Inovasi di Wilayah Pesisir*. (Jakarta: LIPI Press. 2021), hlm. 133

114 Wawancara Langsung La Anda Buton, Kepala Pemerintahan Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat, Ona 14 November 2025

Misalnya, pada tahun 2021 terjadi perselisihan antar Desa Ona dan Kabau karena perebutan urusan anak muda. Alih-alih melibatkan polisi sejak awal, tokoh adat mengundang kedua pihak ke Kantor Desa, sebuah rumah yang berfungsi sebagai ruang rekonsiliasi.¹¹⁵

Prosesnya unik:

1. Masing-masing pihak diberi kesempatan berbicara tanpa interupsi.
2. Tokoh adat kemudian menimbang dengan bijak berdasarkan nilai *pamanatol do basanohi* (keadilan moral).
3. Akhirnya, kedua pihak diminta bersalaman dan berpelukan bersama, simbol perdamaian dalam budaya Sula.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Ona, dia mengatakan proses ini “lebih menyejukkan daripada sidang resmi, karena yang dijaga bukan hanya hukum, tapi hati.”¹¹⁶ Metode seperti ini sejalan dengan konsep *restorative justice*, di mana penyelesaian konflik menekankan pemulihan hubungan sosial daripada hukuman.¹¹⁷ Hasilnya bukan sekadar perdamaian sementara, melainkan rekonsiliasi jangka panjang.

Kearifan lokal seperti *Baku Bae* memperlihatkan bahwa SISKAMLING *Jaga Sula* sejatinya telah hidup sejak lama hanya perlu dihidupkan kembali dalam konteks modern.

115 Wawancara Langsung La Anda Buton, Kepala Pemerintahan Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat, Ona 14 November 2025

116 Wawancara Langsung La Anda Buton, Kepala Pemerintahan Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat, Ona 14 November 2025

117 H. Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*. (New York: Good Books. 2015), hlm. 47

D. Sinergi Polisi Masyarakat dan Tokoh Adat

1. Polmas dan Tokoh Adat: Dua Sayap Keamanan

Keamanan di Kepulauan Sula tidak mungkin efektif tanpa sinergi antara aparat formal (Polmas) dan struktur sosial adat. Di Sulabesi Barat, inisiatif “*Polmas Adat*” hendak dijalankan sejak pertengahan tahun 2025 melalui kemitraan antara Polsek dan Tokoh Adat.

Skemanya sederhana:

- a. Polisi menjadi fasilitator keamanan formal, menyediakan data, pendampingan hukum, dan pelatihan warga.
- b. Tokoh adat menjadi penyaring sosial, menginterpretasikan norma hukum ke dalam bahasa budaya setempat.

Sinergi ini terbukti efektif menekan gesekan sosial yang dulu sering muncul akibat miskomunikasi antara hukum negara dan adat. Menurut pertimbangan internal Polsek Sulabesi Barat, Dengan adanya *Polmas Adat* kedepan, jumlah kasus sosial yang membutuhkan penanganan hukum bisa ditekan bahkan mayoritas masalah kedepan bisa diselesaikan melalui pendekatan adat terlebih dahulu.

2. Dampak Nyata terhadap Ketertiban dan Solidaritas Sosial

Sinergi tersebut melahirkan efek domino positif:

- a. Keamanan meningkat, karena masyarakat percaya kepada kedua sistem adat dan negara.
- b. Solidaritas sosial tumbuh, karena tokoh adat menjadi jembatan antara warga dan aparat.

- c. Muncul *keamanan moral*, di mana warga menjaga diri bukan karena takut hukum, tetapi karena menghargai norma komunitas.

Teori *dual governance* menjelaskan bahwa kolaborasi antara sistem formal dan informal menghasilkan keamanan berlapis yang lebih adaptif dan berkelanjutan.¹¹⁸ Dan Kepulauan Sula telah membuktikannya di tingkat lokal.

E. SISKAMLING Jaga Sula dan Penekanan Gangguan KAMTIBMAS di Kecamatan Sulabesi Barat

Perjalanan perubahan keamanan di Kecamatan Sulabesi Barat dalam tiga tahun terakhir merupakan salah satu contoh nyata bagaimana sebuah inisiatif keamanan berbasis komunitas dapat mengubah wajah sosial sebuah wilayah. Dalam konteks ini, program Jaga Sula dan pengaktifan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING) menjadi landasan penting bagi rekonstruksi keamanan masyarakat. Penjelasan selanjutnya adalah pendalaman dari testimoni langsung Kapolsek Sulabesi Barat, IPTU Gunawan Ipa, S.H., M.H serta menelaah perubahan sosial yang terjadi sebelum, selama, dan setelah implementasi Jaga Sula.

Sejak diaktifkannya kembali program SISKAMLING dan Jaga Sula di wilayah hukum Kecamatan Sulabesi Barat, dinamika keamanan di daerah ini mengalami perubahan yang sangat signifikan.

118 E. Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. (Cambridge: Cambridge University Press. 2010), hlm. 87

Dalam wawancara mendalam yang dilakukan bersama Kapolsek Sulabesi Barat, IPTU Gunawan Ipa, S.H., M.H., terdapat gambaran yang sangat jelas mengenai bagaimana proses transformasi keamanan ini berlangsung dan apa saja faktor yang membuat penurunan kriminalitas dapat terjadi secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Testimoni beliau memberikan fondasi deskriptif, analitis, dan empiris yang kuat untuk memahami perubahan sosial-keamanan yang terjadi di Kecamatan Sulabesi Barat sebagai salah satu sampel Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula.

IPTU Gunawan Ipa, S.H., M.H. menyampaikan bahwa sebelum SISKAMLING dan program Jaga Sula diaktifkan kembali, masyarakat di Kecamatan Sulabesi Barat belum memiliki pola kepedulian yang kuat terhadap keamanan lingkungannya. Masih banyak peristiwa kecil yang dibiarkan berkembang tanpa penanganan cepat, dan sering kali gesekan sosial berakhir pada perkelahian pemuda, konsumsi minuman keras secara terang-terangan, serta gangguan malam hari di desa-desa tertentu.¹¹⁹ Namun, seluruh pola tersebut mulai berubah ketika program SISKAMLING diaktifkan kembali secara terstruktur dan didukung penuh oleh kepolisian.

119 Wawancara Langsung IPTU Gunawan Ipa, S.H., M.H., Kepala Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) Sulabesi Barat, Kabau 20 November 2025



Gambar Kapolsek Sulabesi Barat IPTU Gunawan Ipa dan Anggota Sambangi Warga di Lokasi Tugas

Dalam penuturannya, IPTU Gunawan Ipa, perubahan seketika mulai terasa ketika Kapolres Kepulauan Sula mencanangkan Program Jaga Sula, yang kemudian diperkuat di tingkat kecamatan melalui Polsek Sulabesi Barat. Menurut IPTU Gunawan Ipa, program ini membawa paradigma baru bagi masyarakat, yakni konsep “Jaga Diri, Jaga Keluarga, Jaga Lingkungan”.¹²⁰

Kapolsek menjelaskan bahwa Jaga Sula tidak hanya mengaktifkan SISKAMLING, tetapi juga menghidupkan kembali kesadaran kolektif masyarakat. Aparat Polsek melakukan pendekatan intensif: sosialisasi, himbuan Kamtibmas, patroli desa siang dan malam, serta penguatan hubungan emosional dengan warga. Dalam proses ini, masyarakat mulai memahami bahwa keamanan bukan hanya persoalan penindakan, tetapi juga pencegahan.

120 Wawancara Langsung IPTU Gunawan Ipa, S.H., M.H., Kepala Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) Sulabesi Barat, Kabau 20 November 2025

Salah satu indikator yang menurut IPTU Gunawan Ipa sangat menonjol adalah tidak adanya satu pun laporan polisi yang masuk dan ditangani oleh Polsek Sulabesi Barat pada tahun 2025. Bagi beliau, hal ini bukan hanya pencapaian administratif, tetapi bukti keberhasilan kolektif seluruh komponen masyarakat yang terlibat dalam SISKAMLING Jaga Sula. Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak mungkin tercapai tanpa perubahan perilaku masyarakat yang semakin peduli dan mau mengambil peran dalam menjaga kampungnya.

Kapolsek IPTU Gunawan Ipa juga menjelaskan bahwa perubahan pola perilaku masyarakat merupakan aspek yang paling menarik dalam perkembangan keamanan ini. Warga yang sebelumnya kurang peka terhadap potensi gangguan, kini mulai aktif melapor ketika melihat hal-hal yang mencurigakan. Mereka juga semakin sering berkoordinasi dengan Linmas dan Bhabinkamtibmas ketika terjadi sesuatu yang berpotensi mengganggu ketertiban. Menurutnya, budaya baru ini bukan muncul secara instan, tetapi melalui penyuluhan, pendekatan persuasif, dan konsistensi patroli yang dilakukan Polsek bersama Bhabinkamtibmas di setiap desa.¹²¹

Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda juga menjadi pilar penting dalam keberhasilan SISKAMLING. IPTU Gunawan Ipa menyampaikan bahwa dukungan moral, sosial, dan spiritual yang diberikan oleh tokoh agama serta tokoh adat membuat masyarakat semakin percaya pada sistem keamanan berbasis komunitas.

121 Wawancara Langsung IPTU Gunawan Ipa, S.H., M.H., Kepala Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) Sulabesi Barat, Kabau 20 November 2025

Pemuda yang sebelumnya rentan terlibat dalam perkelahian kini justru menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan. Kehadiran mereka pada kegiatan ronda malam memberi energi baru, membuat suasana SISKAMLING lebih hidup dan efektif.¹²²

Dampak Sosial dan Penurunan Jenis Gangguan Kamtibmas sangat terasa. Penurunan gangguan Kamtibmas terlihat jelas, terutama pada jenis gangguan yang selama ini menjadi perhatian utama. Berdasarkan keterangan IPTU Gunawan Ipa: di Tahun 2025 pasca pengaktifan SISKAMLING Konsumsi miras terbuka menurun drastis, Perkelahian pemuda hampir tidak terjadi lagi, Pencurian kecil dapat dicegah sejak tahap awal, KDRT dan gangguan rumah tangga berhasil dikendalikan dan Gangguan malam hari semakin jarang dilaporkan.

Bahkan Kapolsek menegaskan bahwa pada tahun 2025, Polsek Sulabesi Barat tidak menangani satu pun laporan polisi terkait tindak kriminal, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan ini bukan sekadar angka, tetapi menunjukkan perubahan budaya. Masyarakat tidak lagi menganggap kekerasan sebagai hal wajar. Mereka makin peka terhadap dampak miras, makin menghargai rasa aman, dan makin sadar bahwa stabilitas sosial membutuhkan kerja sama.

Dalam konteks deteksi dini, Kapolsek IPTU Gunawan Ipa menyoroti dua desa yang menunjukkan perkembangan luar biasa, yaitu Desa Ona dan Desa Waigai. Pada kedua desa tersebut, setiap isu kecil

122 Wawancara Langsung IPTU Gunawan Ipa, S.H., M.H., Kepala Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) Sulabesi Barat, Kabau 20 November 2025

atau tanda-tanda potensi gangguan langsung ditindaklanjuti melalui mekanisme informal yang sudah terbentuk dengan baik. Hubungan kerja sama antara Linmas, pemerintah desa, dan Bhabinkamtibmas di desa-desa ini menjadi contoh ideal bagaimana SISKAMLING dapat bekerja sebagai sistem sosial yang adaptif dan responsif.

Selain gangguan Kamtibmas, IPTU Gunawan Ipa juga memberikan perhatian pada penurunan kasus konsumsi miras terbuka dan perkelahian pemuda pada acara pesta ronggeng. Menurutnya, penurunan ini terjadi bukan semata karena adanya patroli, tetapi juga karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dampak destruktif dari kebiasaan tersebut. Warga kini lebih peduli terhadap keharmonisan kampung, menjaga suasana kondusif, dan memastikan bahwa kegiatan sosial tidak menimbulkan masalah.¹²³

Namun demikian, beliau tetap realistis terhadap beberapa kendala teknis yang masih dihadapi dalam pelaksanaan SISKAMLING. Ada beberapa pos ronda yang belum aktif setiap malam, dan sebagian masyarakat belum memiliki jadwal ronda bergilir yang konsisten. Sarana penunjang seperti HT dan lampu ronda juga belum tersedia secara merata. Meski begitu, menurut Kapolsek, antusiasme masyarakat justru menjadi kekuatan utama yang mampu menutupi kekurangan fasilitas tersebut. Selama masyarakat tetap terlibat dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, kegiatan SISKAMLING akan tetap berjalan dengan baik.

123 Wawancara Langsung IPTU Gunawan Ipa, S.H., M.H., Kepala Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) Sulabesi Barat, Kabau 20 November 2025

Koordinasi antara aparat Polsek, Linmas, dan Bhabinkamtibmas menjadi hal penting yang juga ditekankan oleh IPTU Gunawan Ipa. Beliau menilai bahwa koordinasi tersebut kini berada pada tingkat yang sangat baik. Informasi mengalir cepat, respons terhadap laporan masyarakat menjadi lebih singkat, dan setiap potensi konflik dapat ditangani sebelum berkembang.¹²⁴ Inilah yang menurutnya menjadi kunci utama terjaganya stabilitas Kamtibmas di Kecamatan Sulabesi Barat.

Dalam perspektif jangka panjang, IPTU Gunawan Ipa meyakini bahwa keberhasilan SISKAMLING Jaga Sula dapat terus bertahan apabila seluruh pihak terus menjaga dinamika kolaborasi tersebut. Ia menegaskan bahwa keamanan yang dibangun melalui gotong royong jauh lebih tahan lama dibandingkan keamanan yang hanya mengandalkan keberadaan aparat. Untuk itu, beliau berharap agar pemerintah desa dan kecamatan di Sulabesi Barat semakin memperkuat dukungan, terutama dalam menyediakan sarana prasarana SISKAMLING yang lebih lengkap.

Di akhir keterangannya, IPTU Gunawan Ipa menyatakan bahwa indikator paling menonjol dari keberhasilan SISKAMLING adalah menurunnya tindakan kriminalitas yang dilaporkan dan meningkatnya rasa aman masyarakat. Ia menambahkan bahwa masyarakat kini tidak hanya merasa aman, tetapi juga merasa bangga karena mampu menjaga kampungnya sendiri. SISKAMLING Jaga Sula telah mengubah pola pikir warga, memperkuat ikatan sosial,

124 Wawancara Langsung IPTU Gunawan Ipa, S.H., M.H., Kepala Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) Sulabesi Barat, Kabau 20 November 2025

dan menghadirkan stabilitas Kamtibmas yang nyata.¹²⁵

Dengan uraian seperti ini, tampak jelas bahwa keterangan Kapolsek Sulabesi Barat, Gunawan Ipa, menjadi landasan kuat bagi mengenai efektivitas sistem keamanan berbasis komunitas. Beliau menunjukkan bahwa keamanan adalah hasil dari kerja kolektif, kesadaran bersama, dan kolaborasi berkelanjutan. SISKAMLING Jaga Sula telah membuktikan bahwa ketika masyarakat bergerak bersama, perubahan sosial yang besar dapat terwujud bahkan tanpa biaya besar atau perangkat teknologi canggih. Inilah model keamanan masa depan yang lahir dari kearifan lokal, gotong royong, dan nilai kebersamaan.

Dengan demikian, walau semua keadaan pada setiap polsek dikepulauan sula berbeda-beda, namun dengan sampel polsek Sulabesi Barat dapatlah ditarik benang merahnya bahwa SISKAMLING Jaga Sula berhasil menciptakan perubahan besar dalam keamanan wilayah. Perubahan perilaku masyarakat adalah komponen terpenting keberhasilan program, berikut Deteksi dini dan koordinasi cepat merupakan faktor pencegahan kriminal paling efektif serta Budaya gotong royong dan keterlibatan tokoh masyarakat memperkuat fondasi keamanan. Keberhasilan tahun 2025 tanpa satu pun laporan Kriminal menjadi bukti nyata bahwa keamanan dapat dicapai bahkan tanpa teknologi mahal, selama masyarakat bersatu.

125 Wawancara Langsung IPTU Gunawan Ipa, S.H., M.H., Kepala Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) Sulabesi Barat, Kabau 20 November 2025

F. Membangun Rasa Aman Bersama: Kisah Inspiratif SISKAMLING Jaga Sula di Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara

Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan atau SISKAMLING “Jaga Sula” di Desa Falabisahaya bukan sekadar sebuah kegiatan rutin untuk berjaga malam, melainkan momentum kebangkitan kesadaran kolektif masyarakat dalam menata ulang hubungan sosial, keamanan lingkungan, serta arah pembangunan desa. Peresmian yang berlangsung pada 29 Oktober 2025 itu dilakukan secara meriah dimulai dari penjemputan tamu dari Polres Kepulauan Sula dengan tarian lokal hingga dilakukan acara seremonial dengan menghadirkan tamu penting seperti Kapolres Kepulauan Sula, Ketua STAI Babussalam Sula, Koramil, Sahabandar, Kementerian Agama, Pimpinan Perusahaan Kayu, Pemerintah Kecamatan, Tokoh Pendidikan, Tokoh agama dan lainnya. Sambutan langsung dari Kepala Desa Falabisahaya, Bapak Samsul Pauwah, S.Pd, menghadirkan nuansa emosional yang kuat, sebuah pengakuan jujur tentang keterbatasan anggaran, disertai tekad bulat untuk tidak membiarkan alasan administratif menghalangi upaya menjaga ketertiban dan keselamatan bersama.

Dalam sambutannya, Kepala Desa menyampaikan bahwa pembangunan pos kamling dan pengaktifan ronda malam sejatinya belum terakomodasi dalam Anggaran Dana Desa (ADD).¹²⁶ Namun, ketiadaan anggaran tidak otomatis berarti ketiadaan tindakan. Justru

126 Sambutan Samsul Pauwah, S.Pd Kepala Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara pada Acara Peresmian SISKAMLING, Falabisahaya 29 Oktober 2025

dari ruang kekurangan itulah muncul gambaran tentang karakter asli masyarakat Falabisahaya, masyarakat yang tidak menunggu bantuan datang, tetapi bergerak secara mandiri, penuh kesadaran, dan berani mengambil keputusan meski dengan konsekuensi finansial tertentu. Keadaan tersebut juga menunjukkan sikap kepemimpinan seolah kepala Desa Falabisahaya yang Visioner, berani mengambil Langkah Diskresi dengan menempatkan keselamatan warga diatas segalanya.



Gambar Sambutan Kepala Desa Falabisahaya Dalam Kegiatan Peresmian SISKAMLING di Kecamatan Mangoli Utara

Kepala Desa menyampaikan bahwa pemerintah desa bahkan bersedia melakukan pinjaman (menghutang) demi memastikan program vital ini tetap berjalan.¹²⁷ Tindakan ini menghadirkan dua

127 Sambutan Samsul Pauwah, S.Pd Kepala Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara pada Acara Peresmian SISKAMLING, Falabisahaya 29 Oktober 2025

pesan penting, pertama, bahwa keamanan masyarakat adalah prioritas yang tidak boleh ditunda dan kedua, bahwa sebuah kebijakan yang benar-benar menyentuh kepentingan publik akan selalu menemukan jalannya, meski sumber daya terbatas, seharusnya menjadi inspirasi bagi desa lainnya di kepulauan sula.

Inilah titik krusial yang jarang muncul dalam banyak pembahasan tentang kebijakan desa, keberanian moral untuk mendahulukan keselamatan warga daripada kenyamanan regulatif. Kepala Desa Falabisahaya menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal mengatur anggaran, tetapi tentang kemampuan membaca kebutuhan masyarakat secara jernih. Dengan mengesampingkan hambatan administratif, ia memberikan teladan bahwa pembangunan keamanan adalah urusan bersama, bahwa pos kamling bukan sekadar bangunan kecil di pinggir jalan, melainkan benteng sosial yang menjaga ritme kehidupan masyarakat agar tetap tertib, aman, dan harmonis.

Selain itu, sambutan Kepala Desa juga memberikan makna baru mengenai relasi desa dengan kepolisian. Dalam kesempatan tersebut, beliau mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Kapolres Kepulauan Sula yang hadir dalam kegiatan peresmian SISKAMLING se-Kecamatan Mangoli Utara dengan Falabisahaya sebagai desa percontohan. Kehadiran Kapolres bukan hanya seremonial, melainkan memperkuat pesan bahwa keamanan desa adalah bagian dari sistem keamanan nasional.¹²⁸

128 Sambutan Samsul Pauwah, S.Pd Kepala Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara pada Acara Peresmian SISKAMLING, Falabisahaya 29 Oktober 2025

Ketika pemerintah desa dan kepolisian Kabupaten Kepulauan Sula saling menguatkan, lahirlah sinergi yang membuat masyarakat semakin yakin bahwa mereka tidak dibiarkan mengatasi masalah keamanan seorang diri. Doa Kepala Desa agar seluruh jajaran kepolisian selalu dalam lindungan Allah Swt. juga memperlihatkan betapa hubungan emosional antara masyarakat dan aparat keamanan telah terbangun secara sehat dan saling mendukung.

Dimensi yang lebih menarik lagi muncul ketika Kepala Desa menggambarkan kondisi sosial Falabisahaya sebagai desa multikultural. Desa ini dihuni oleh penduduk dari latar agama, bahasa, dan kebudayaan yang beragam. Tidak hanya itu, keberadaan dua perusahaan kayu besar yakni PT Sampoerna Kayoe dan PT Mangole Timber Producers menjadikan Falabisahaya wilayah yang kehidupan sosialnya selalu beririsan dengan aktivitas ratusan bahkan ribuan karyawan dari berbagai daerah di Indonesia.¹²⁹ Dalam situasi seperti ini, peluang gesekan sosial tentu tidak dapat dihindari. Kompleksitas keragaman ini menuntut kehadiran sistem keamanan yang mampu mengelola interaksi masyarakat agar tetap harmonis dan kondusif.

Di sinilah pengaktifan SISKAMLING Jaga Sula mendapatkan konteks yang lebih luas. SISKAMLING tidak hanya berperan menjaga keamanan permukiman warga, tetapi juga menjadi sistem yang merawat stabilitas iklim usaha. Dengan adanya ronda yang teratur, aktivitas perusahaan dapat berjalan tanpa kekhawatiran

129 Sambutan Samsul Pauwah, S.Pd Kepala Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara pada Acara Peresmian SISKAMLING, Falabisahaya 29 Oktober 2025

gangguan keamanan, baik dari konflik antarpekerja, perselisihan sosial, maupun tindak kriminal umum seperti pencurian atau perkelahian. Falabisahaya, melalui pengaktifan SISKAMLING ini, sedang menata dirinya sebagai role model Kamtibmas, bukan hanya untuk desa-desa tetangga, tetapi juga bagi kawasan industri yang ingin memastikan bahwa operasional perusahaan selaras dengan keamanan masyarakat sekitar.

Lebih jauh lagi, pengaktifan SISKAMLING Jaga Sula di Falabisahaya mengandung pesan simbolik bahwa keamanan adalah tanggung jawab moral yang tidak boleh diserahkan kepada aparat semata. Warga yang ikut ronda bukan sekadar “melakukan tugas malam”, tetapi sedang meneguhkan identitas mereka sebagai bagian dari komunitas yang saling menjaga. Di tengah perubahan sosial dan arus masuk pekerja dari luar daerah, ronda malam menjadi ruang dialog sosial antargenerasi, memperluas jejaring kepercayaan, dan menata kembali pola komunikasi masyarakat. Ketika warga mengenal satu sama lain, ketika wajah-wajah baru pun mulai dikenal, maka ruang sosial menjadi lebih aman karena pengawasan berjalan secara alami.

Sikap Kepala Desa yang mendorong dan merestui partisipasi aktif warga, bahkan melakukan pinjaman demi kelancaran program, menunjukkan bahwa SISKAMLING Jaga Sula bukan program formalitas, melainkan gerakan sosial yang hidup. Keamanan bukanlah hasil dari penempatan kamera CCTV, pagar tinggi, atau patroli aparat. Keamanan tumbuh dari kesadaran kolektif bahwa keberlangsungan hidup masyarakat hanya bisa dijaga bersama.

Oleh karena itu, pengaktifan SISKAMLING Jaga Sula di Falabisahaya layak dipandang sebagai salah satu contoh terbaik ketangguhan sosial masyarakat desa. Keputusan-keputusan berani pemerintah desa, dukungan moral Kapolres, kondisi sosial yang multikultural, serta komitmen warga dalam mendukung program ini memperlihatkan bahwa keamanan bukan sekadar kondisi bebas kriminalitas, tetapi suasana kehidupan yang membuat masyarakat merasa dilindungi, dihargai, dan dilibatkan.

Ke depan, Falabisahaya berpotensi menjadi laboratorium sosial keamanan komunitas yang mampu menginspirasi desa-desa lain di Mangoli Utara bahkan di seluruh Kepulauan Sula. Dari desa ini, kita belajar bahwa keamanan bukan hanya tentang mencegah kejahatan, tetapi bagaimana membangun masyarakat yang saling percaya, berinisiatif, dan bersedia berkorban demi kebaikan bersama. Dengan semangat itu, SISKAMLING Jaga Sula bukan lagi sekadar program, melainkan bagian dari identitas Desa Falabisahaya dalam menjaga masa depannya.

Terpisah, Dalam sambutannya, Sekretaris Kecamatan Mangoli Utara, Bapak Jainudin Buamona, memberikan gambaran yang sangat kuat tentang bagaimana kehadiran program SISKAMLING ini telah mengubah pola hubungan antara warga, pemerintah kecamatan, dan pihak kepolisian. Melalui pandangannya, tersingkap pemahaman baru bahwa keamanan bukan hanya hasil dari tindakan aparat, tetapi buah dari sinergi yang terbentuk melalui kehadiran, keterlibatan, dan kebersamaan.



Gambar Sambutan Sekretaris Camat Mangoli Utara dalam Kegiatan Peresmian SISKAMLING di Desa Falabisahaya

Sekretaris Kecamatan membuka sambutannya dengan sebuah pengakuan yang sarat makna bahwa Pemerintah Kecamatan Mangoli Utara sangat mengapresiasi inisiatif dan gebrakan dari Kapolres Kepulauan Sula, terutama karena kehadiran Kapolres pada peresmian SISKAMLING kali ini merupakan kunjungan perdana ke wilayah Mangoli Utara yang secara geografis berada jauh dari pusat kabupaten. Pernyataan ini secara tidak langsung menegaskan betapa pentingnya momen tersebut bagi ribuan warga Mangoli Utara, yang selama ini merindukan perhatian langsung dari institusi keamanan tingkat kabupaten. Jarak geografis yang jauh seringkali menimbulkan kesan seolah wilayah Mangoli Utara berada di pinggiran prioritas. Karena itu, kunjungan Kapolres memiliki nilai

simbolik yang besar, membangun kepercayaan, menghapus jarak psikologis antara masyarakat dan aparat, serta memperlihatkan bahwa negara hadir untuk semua, termasuk daerah terjauh.¹³⁰

Kehadiran Kapolres dalam peresmian SISKAMLING di Falabisahaya juga memberikan optimisme baru. Dalam narasi Sekretaris Kecamatan, jelas tergambar bahwa masyarakat Mangoli Utara memandang kehadiran itu sebagai sinyal bahwa mereka tidak dibiarkan mengelola keamanan seorang diri. Di sinilah makna pengaktifan SISKAMLING bertambah luas, bukan sekadar kegiatan ronda malam, tetapi sebuah hubungan baru antara warga dan aparat, di mana keduanya saling menguatkan. Sekretaris Kecamatan dengan tegas menyampaikan bahwa masyarakat sangat bersyukur atas gebrakan luar biasa ini dan berharap sinergi yang terbentuk dapat terus berlanjut dalam waktu-waktu mendatang.¹³¹

Selain aspek simbolik, sambutan Sekcam Mangoli Utara menekankan dinamika sinergi lintas lembaga setelah pengaktifan SISKAMLING. Menurut beliau, pemerintah kecamatan, Polsek, Koramil, dan seluruh pemerintah desa kini lebih sering bergerak bersama dalam menjaga keamanan lingkungan. Bahkan beliau sendiri mengakui telah turun langsung dalam kegiatan ronda malam beberapa kali.¹³² Pengakuan pribadi ini penting ditonjolkan karena merefleksikan budaya kepemimpinan yang partisipatif. Seorang

130 Sambutan Jainudin Buamona Sekretaris Pemerintahan Kecamatan Mangoli Utara pada Acara Peresmian SISKAMLING, Falabisahaya 29 Oktober 2025

131 Sambutan Jainudin Buamona Sekretaris Pemerintahan Kecamatan Mangoli Utara pada Acara Peresmian SISKAMLING, Falabisahaya 29 Oktober 2025

132 Sambutan Jainudin Buamona Sekretaris Pemerintahan Kecamatan Mangoli Utara pada Acara Peresmian SISKAMLING, Falabisahaya 29 Oktober 2025

pejabat kecamatan yang ikut jaga malam menunjukkan bahwa SISKAMLING tidak dianggap sebagai kegiatan masyarakat kelas bawah, tetapi aktivitas yang mencerminkan kesetaraan tanggung jawab antara pemerintah dan warga.

Melalui penegasan itu, Sekretaris Kecamatan menggarisbawahi bahwa SISKAMLING adalah pilar keamanan yang berakar dari masyarakat. Makna “berakar” dalam konteks ini bukan sekadar bahasa simbolik, melainkan realitas sosial bahwa keamanan yang efektif tidak lahir dari kebijakan top-down, tetapi dari partisipasi kolektif. Ketika pemerintah kecamatan, aparat TNI-Polri, pemerintah desa, dan warga berada dalam satu barisan, maka program keamanan tidak lagi bersifat sporadis, tetapi menjadi gerakan komunitas. Inilah yang membuat SISKAMLING di Mangoli Utara menjadi lebih daripada sekadar pos kamling yang berdiri secara fisik; ia menjadi sarana membangun hubungan sosial, membentuk rasa memiliki, dan meneguhkan identitas masyarakat sebagai penjaga kampungnya sendiri.¹³³

Sambutan Sekretaris Kecamatan juga memberikan pesan strategis terkait keberlanjutan program. Ia menghimbau seluruh kepala desa di wilayah Mangoli Utara untuk terus memantau, mengawal, dan menjaga pengembangan SISKAMLING di desa masing-masing. Himbauan ini menunjukkan bahwa keberhasilan SISKAMLING bukan ditentukan oleh seremoni peresmian, tetapi oleh bagaimana kepala desa mengelola partisipasi warga

133 Sambutan Jainudin Buamona Sekretaris Pemerintahan Kecamatan Mangoli Utara pada Acara Peresmian SISKAMLING, Falabisahaya 29 Oktober 2025

dalam jangka panjang. Di sinilah muncul makna penting lainnya: SISKAMLING bukan proyek sekali jadi, melainkan sistem sosial yang harus dipupuk, dipelihara, dan dikembangkan.

Tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan SISKAMLING juga ditegaskan melalui komitmen Sekretaris Kecamatan yang menyatakan bahwa pemerintah kecamatan siap terlibat secara kelembagaan maupun pribadi. Pernyataan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi mengandung pesan emosional bahwa jabatan adalah bentuk pengabdian, bukan sekadar posisi administratif.¹³⁴ Dengan menekankan kalimat “karena ini tugas pengabdian”, Sekcam ingin memperlihatkan bahwa keamanan masyarakat adalah amanah yang melekat pada dirinya sebagai pelayan publik. Sebuah amanah yang tidak bisa dikerjakan dari balik meja kantor, melainkan dengan hadir, melihat langsung kondisi masyarakat, dan ikut berproses bersama mereka dalam membangun keamanan dari bawah.

Makna pengaktifan SISKAMLING Jaga Sula melalui sudut pandang Sekretaris Kecamatan menjadi semakin dalam ketika kita melihat konteks sosial Falabisahaya sebagai desa multikultur dan sebagai wilayah yang bersentuhan langsung dengan perusahaan kayu besar. Program SISKAMLING dalam kondisi seperti ini bukan hanya menjaga rumah-rumah penduduk, tetapi juga menjadi instrumen stabilitas bagi interaksi sosial antarpekerja, aktivitas perusahaan, dan dinamika penduduk lokal. Dengan keterlibatan lintas lembaga sebagaimana disebutkan Sekcam, SISKAMLING

134 Sambutan Jainudin Buamona Sekretaris Pemerintahan Kecamatan Mangoli Utara pada Acara Peresmian SISKAMLING, Falabisahaya 29 Oktober 2025

menjadi sarana yang efektif dalam mencegah gesekan sosial yang mungkin muncul dari keragaman tersebut.

Pada akhirnya, pengaktifan SISKAMLING Jaga Sula di Falabisahaya, sebagaimana dijelaskan oleh Sekretaris Kecamatan Mangoli Utara, memberikan pelajaran penting bahwa keamanan adalah hasil dari kehadiran, kolaborasi, dan komitmen. Ketika seluruh pemangku kepentingan merasa memiliki peran dan tanggung jawab yang sama, maka stabilitas bukan hanya bisa dicapai, tetapi dapat dipertahankan dalam jangka panjang. SISKAMLING menjadi gambaran kecil tentang bagaimana negara, masyarakat, dan aparat bekerja dalam satu harmoni yang saling melengkapi. Ia mengajarkan bahwa keamanan bukan dilakukan oleh satu pihak untuk pihak lain, tetapi dilakukan oleh seluruh pihak demi kebaikan bersama.

Dengan pandangan seperti itu, jelas bahwa pengaktifan SISKAMLING di Falabisahaya bukan hanya program keamanan, melainkan fondasi sosial yang membangun rasa percaya, solidaritas, dan kesiapsiagaan masyarakat Mangoli Utara. Dan selama semangat itu terus dipertahankan, Falabisahaya akan tetap menjadi contoh bagaimana keamanan dibangun bukan dari kekuatan, tetapi dari kebersamaan.

G. Jaga Sula sebagai Model Keamanan Daerah:

Perspektif Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula

Keamanan merupakan fondasi utama dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi wilayah kepulauan seperti Kabupaten

Kepulauan Sula yang memiliki karakter geografis terpencar, akses terbatas, serta dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan akan sistem keamanan yang tidak hanya mengandalkan aparat, tetapi juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat, menjadi semakin mendesak. Ketika rasa aman tercipta, masyarakat dapat beraktivitas tanpa rasa khawatir petani dapat turun ke ladang, nelayan melaut, pedagang menjalankan usaha, dan roda pemerintahan bergerak dengan stabil.

Program SISKAMLING Jaga Sula hadir sebagai jawaban atas tantangan tersebut. Ia tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ronda malam, tetapi menjelma menjadi gerakan sosial berbasis kearifan lokal, yang menghidupkan kembali nilai-nilai lama seperti *Lom Pua Hoi*, *Mana Wa Lima*, *gotong royong*, *baku jaga*, hingga *maksaira*. Di saat yang sama, program ini mengintegrasikan teknologi komunikasi modern, prosedur operasional, dan pendekatan keamanan adaptif yang relevan dengan era sekarang.

Pendekatan baru ini semakin kuat ketika pemerintah daerah, akademisi, aparat keamanan, dan masyarakat desa bergerak bersama membentuk sistem keamanan partisipatif. Narasi, data, dan temuan dalam uraian ini disusun melalui hasil wawancara lapangan dengan Asisten III Administrasi Umum Pemerintah Daerah Kepulauan Sula, yang memberikan gambaran menyeluruh tentang dampak, tantangan, dan masa depan Jaga Sula sebagai model keamanan kolaboratif di wilayah kepulauan.



Gambar Wawancara Langsung H. Zaidun, S.Pd., M.Pd, Asisten III Bagian Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Sula, di Kediannya

Wawancara dengan Asisten III Bidang Administrasi Umum Kabupaten Kepulauan Sula, H. Zaidun, S.Pd., M.Pd, membuka pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana pemerintah daerah memaknai kehadiran *SISKAMLING Jaga Sula* sebagai sebuah gerakan sosial sekaligus sistem keamanan modern yang memiliki akar kuat dalam tradisi masyarakat. Beliau memulai dengan menggambarkan kondisi masyarakat Sula sebelum adanya program *SISKAMLING*. Menurutnya, seluruh masyarakat mulai dari petani, nelayan, pengusaha, pegawai, hingga pemerintah desa pada dasarnya memiliki kebutuhan yang sama: rasa aman dan nyaman. Tanpa rasa aman, seluruh aktivitas sosial dan ekonomi berjalan tersendat. Namun yang terjadi selama bertahun-tahun adalah masyarakat Sula cenderung menyerahkan seluruh urusan

keamanan kepada pihak kepolisian. Setiap persoalan, sekecil apa pun, harus diselesaikan melalui aparat keamanan. Hampir tidak ada upaya penyelesaian masalah di tingkat desa. “Sebelum adanya penerapan SISKAMLING, masyarakat masih menyerahkan keamanan sepenuhnya berada di tangan pihak kepolisian¹³⁵,” jelasnya, menandakan betapa tingginya ketergantungan masyarakat kepada negara untuk urusan keamanan sehari-hari.

Dalam situasi seperti itu, aparat kepolisian bekerja hampir tanpa dukungan masyarakat. Hal ini diperparah oleh kondisi geografis Kepulauan Sula yang luas dan terpencar. Keterbatasan personel membuat respons terhadap laporan masyarakat, terutama dari desa-desa terpencil seperti Ona atau Keramat Titdoi, sering kali terlambat. Menurut H. Zaidun, kondisi ini terus berlangsung hingga munculnya inisiatif baru di masa kepemimpinan Kapolres saat ini, yang ia sebut sebagai “inisiatif yang sangat menyentuh kebutuhan masyarakat desa-desa.” Program inilah yang kemudian dikenal sebagai SISKAMLING Jaga Sula.¹³⁶

135 Wawancara Langsung H. Zaidun, S.Pd., M.Pd, Asisten III Bagian Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Sula, Waihama 10 Desember 2025

136 Wawancara Langsung H. Zaidun, S.Pd., M.Pd, Asisten III Bagian Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Sula, Waihama 10 Desember 2025



Gambar Wawancara Langsung H. Zaidun, S.Pd., M.Pd, Asisten III Bagian Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Sula, di Kediamaanya

Beliau memberikan contoh perubahan nyata yang langsung dirasakan masyarakat setelah program ini berjalan. Misalnya, kegiatan pesta ronggeng yang selama puluhan tahun selalu berlangsung hingga pagi hari yang kerap memicu keributan, konsumsi miras berlebih, dan gangguan malam lainnya kini dibatasi hanya sampai pukul 01.00 WIT. Perubahan budaya ini tidak mungkin tercapai tanpa adanya kesadaran kolektif, koordinasi warga, serta keterlibatan pihak desa, TNI–Polri, dan pemuda. Tidak hanya itu, ia juga menyinggung Pilkada Kepulauan Sula yang baru berlangsung. “Pilkada kemarin merupakan pilkada teraman dalam sejarah demokrasi Sula,”¹³⁷ ujarnya, menandakan adanya jurang

137 Wawancara Langsung H. Zaidun, S.Pd., M.Pd, Asisten III Bagian Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Sula, Waihama 10 Desember 2025

perbedaan besar dalam situasi keamanan sebelum dan sesudah Jaga Sula diaktifkan.

Ketika ditanya mengenai alasan mendasar mengapa SISKAMLING begitu urgen diterapkan di daerah kepulauan seperti Sula, H. Zaidun menjelaskan bahwa secara historis konsep jaga kampung bukanlah hal baru. Sistem keamanan berbasis komunitas ini pernah hidup kuat sebagai bagian dari budaya lokal, namun mulai memudar sejak reformasi. Dalam skala nasional, banyak kabupaten/kota juga mengaktifkan kembali SISKAMLING pasca peningkatan tensi sosial dan politik beberapa tahun terakhir. Namun bagi Sula, urgensinya berlipat karena struktur geografis kepulauan menuntut adanya sistem pengawasan yang tidak bisa hanya diserahkan kepada aparat negara. Tanpa peran aktif masyarakat, aparat tidak mungkin bekerja efektif mengawasi wilayah yang luas dan terpencar.¹³⁸

Ia kemudian menjelaskan bahwa Jaga Sula bukan hanya program keamanan. Menurutnya, Jaga Sula justru menjadi gerakan sosial yang menghidupkan kembali budaya *baku tolong*, gotong royong, *maksaira*, dan solidaritas warga. Ia menggambarkan bagaimana warga bergiliran memperhatikan lingkungan, membangun pos-pos ronda permanen, melakukan patroli gabungan bersama TNI–Polri, hingga memastikan bahwa setiap orang memiliki rasa tanggung jawab terhadap keamanan kampungnya. “Ini seperti kampung kembali menjadi keluarga besar,” ujarnya sambil menekankan bahwa pendekatan ini membuat keamanan

138 Wawancara Langsung H. Zaidun, S.Pd., M.Pd, Asisten III Bagian Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Sula, Waihamu 10 Desember 2025

terasa lebih hangat, bukan represif. Sistem ini juga terbukti mampu menangkal potensi kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, peredaran miras, tawuran antarkampung, dan berbagai kerawanan lain secara preventif.¹³⁹

Ketika berbicara mengenai manfaat program Jaga Sula, ia menguraikan dengan cukup rinci. Bagi pemerintah daerah, manfaat paling nyata adalah turunnya beberapa jenis kriminalitas kecil seperti pencurian, keributan malam, dan gangguan lain di desa-desa percontohan seperti Ona, Waibau, Fagudu, Fallabisahaya, dan Kramat Titdoi. Ia menekankan bahwa SISKAMLING memberikan warga ruang untuk terlibat langsung menjaga keamanan, sehingga pelaku kriminal menjadi enggan beraksi. Warga pun merasa lebih aman untuk beraktivitas pada malam hari. Lebih jauh, program ini mempercepat penanganan kasus karena informasi lapangan kini mengalir lebih cepat ke aparat. Jika sebelumnya polisi harus mengandalkan patroli terbatas dengan wilayah tugas yang luas, kini laporan datang dari warga secara real-time melalui pos ronda. Aparat bisa fokus melakukan penyelidikan dan tindakan hukum, sementara pengawasan dasar diambil alih masyarakat. Menurutnya, inilah bentuk keamanan yang ideal berbasis partisipasi tetapi tetap berada dalam kerangka hukum dan koordinasi formal.¹⁴⁰

Program ini juga memberi dampak signifikan pada efisiensi anggaran pemerintah daerah. Di tengah pemotongan APBD dan

139 Wawancara Langsung H. Zaidun, S.Pd., M.Pd, Asisten III Bagian Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Sula, Waihama 10 Desember 2025

140 Wawancara Langsung H. Zaidun, S.Pd., M.Pd, Asisten III Bagian Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Sula, Waihama 10 Desember 2025

kebutuhan efisiensi nasional, Jaga Sula justru memanfaatkan gotong royong tanpa menambah beban anggaran. H. Zaidun menegaskan bahwa pemerintah tidak perlu membayar tenaga keamanan atau menambah biaya operasional patroli aparat, karena masyarakat mengambil peran ini secara sukarela. Anggaran dapat dialihkan ke sektor lain yang lebih membutuhkan.¹⁴¹ Dengan demikian, keamanan yang stabil bukan hanya memberikan rasa aman, tetapi juga membantu pemerintah mengelola anggaran secara lebih bijak.

Dalam wawancara tersebut, salah satu bagian paling menarik adalah bagaimana ia memaknai perpaduan antara kearifan lokal dan pendekatan modern yang digunakan dalam Jaga Sula. Menurutny, nilai-nilai seperti *Lom Pua Hoi*, *Mana Wa Lima*, gotong royong, dan *maksaira* bukan sekadar simbol budaya, tetapi fondasi moral yang membuat Jaga Sula berbeda dari sistem keamanan di daerah lain. Nilai-nilai ini kemudian diintegrasikan dengan teknologi seperti HT, SOP ronda, dan layanan 110. Ia menjelaskan bahwa teknologi tidak menghapus budaya lokal, tetapi justru memperkuatnya. Jika dulu sistem keamanan hanya berjalan berdasarkan kepercayaan dan komunikasi lisan, kini semua laporan tercatat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Modernisasi membuat nilai lokal tersebut menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Zaidun berencana berkomunikasi dengan instansi terkait untuk memperluas penggunaan HT ke seluruh pos SISKAMLING, termasuk di kecamatan terpencil, dengan dukungan Diskominfo Kepulauan Sula. Hal ini menunjukkan

141 Wawancara Langsung H. Zaidun, S.Pd., M.Pd, Asisten III Bagian Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Sula, Waihama 10 Desember 2025

adanya komitmen serius untuk menguatkan infrastruktur keamanan desa hingga ke wilayah paling jauh.¹⁴²

Terkait pola kemitraan, ia menjelaskan bahwa Jaga Sula adalah kolaborasi multi-aktor yang melibatkan Pemda, Polres, Dandim, Kepala desa, Pemuda, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Pemda menyediakan kebijakan dan pos keamanan permanen, Polres menyusun SOP dan pengawasan profesional, sementara masyarakat menjadi pelaksana utama di lapangan. Dengan pola ini, keamanan tidak lagi menjadi tanggung jawab aparat semata, tetapi menjadi tugas kolektif seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi seperti ini membuat laporan warga dapat ditindaklanjuti dengan cepat, sehingga stabilitas di tingkat desa hingga antar-pulau seperti Sulabesi dan Mangoli lebih terjaga.¹⁴³

Namun keberhasilan ini tidak berarti tanpa tantangan. Ia mengakui bahwa wilayah Mangoli, terutama bagian timur dan selatan, menjadi tantangan terbesar. Medan terjal, jalan rusak, sungai musiman, serta keterbatasan transportasi membuat distribusi peralatan dan supervisi menjadi sulit. Selain itu, rendahnya SDM desa, terutama kurangnya pemuda yang bisa terlibat secara konsisten, menjadi hambatan serius. Banyak pemuda harus bekerja malam untuk mencari nafkah sehingga sulit berpartisipasi dalam ronda. Kepala desa pun kesulitan mengkoordinasikan jadwal ronda tanpa dukungan logistik memadai.

142 Wawancara Langsung H. Zaidun, S.Pd., M.Pd, Asisten III Bagian Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Sula, Waihama 10 Desember 2025

143 Wawancara Langsung H. Zaidun, S.Pd., M.Pd, Asisten III Bagian Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Sula, Waihama 10 Desember 2025

Dalam menghadapi tantangan sosial akibat modernisasi, polres mengambil langkah strategis yang cukup unik yakni mengintegrasikan teknologi digital ke dalam pola ronda. Warga diajak memanfaatkan jaringan internet, bahkan melalui Starlink yang kini mulai diakses beberapa desa terpencil, untuk mendukung pelaporan cepat melalui aplikasi atau grup WhatsApp desa. Dengan cara ini, partisipasi masyarakat tidak menurun, tetapi justru ditingkatkan melalui pendekatan *hybrid* sebagian tatap muka, sebagian berbasis digital.¹⁴⁴ Teknologi tidak dimaknai sebagai ancaman terhadap partisipasi, tetapi sebagai alat untuk memperkuat gotong royong.

Menutup wawancara, H. Zaidun memberikan pesan yang sangat kuat kepada masyarakat dan generasi muda. Ia menegaskan bahwa keamanan bukanlah instruksi pemerintah, melainkan bagian dari jati diri budaya Sula. Ia menyebut bahwa nilai-nilai seperti *Lom Pua Hoi* dan *Mana Wa Lima* telah mengajarkan bahwa menjaga kampung sama dengan menjaga keluarga sendiri. Karena itu, ronda bukan dilakukan karena paksaan pemerintah, tetapi lahir dari kesadaran bahwa keamanan adalah identitas kolektif. Untuk generasi muda, ia berharap mereka tidak meninggalkan jati diri tersebut. “Jadilah pelopor yang membuktikan bahwa smartphone dapat memperkuat patroli malam, bukan menggantikannya,”¹⁴⁵ pesannya. Ia ingin generasi muda menghidupkan kembali semangat leluhur dalam bentuk baru yang relevan dengan arus modernisasi.

144 Wawancara Langsung H. Zaidun, S.Pd., M.Pd, Asisten III Bagian Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Sula, Waihama 10 Desember 2025

145 Wawancara Langsung H. Zaidun, S.Pd., M.Pd, Asisten III Bagian Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Sula, Waihama 10 Desember 2025

Dengan cara ini, Sula tidak hanya akan aman untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang.

H. Apa Kata Penerima Manfaat dari Hadirnya SISKAMLING Jaga Sula

Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING) Jaga Sula merupakan salah satu bentuk praktik keamanan berbasis masyarakat yang kembali menguat dalam beberapa tahun terakhir. Keberadaannya bukan hanya sekadar rutinitas ronda malam, melainkan bagian dari rekonstruksi budaya kolektif yang menempatkan keamanan sebagai tanggung jawab bersama. Keamanan tidak lagi dipahami sebagai urusan kepolisian semata, tetapi melekat pada relasi sosial antarmasyarakat, nilai kepercayaan, dan pengawasan partisipatif yang berkelanjutan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto, keamanan sosial merupakan “proses integratif yang menempatkan masyarakat sebagai subyek sekaligus obyek dari ketertiban publik”.¹⁴⁶ Teori ini memberi dasar bahwa kehadiran SISKAMLING Jaga Sula secara otomatis memunculkan manfaat pada berbagai lapisan, baik individu, keluarga, kelompok dan pemerintahan lokal. Untuk memperkuat argumentasi ini, penulis kemudian melakukan wawancara lapangan dengan beberapa narasumber di tiga desa yakni desa Ona, Waiipa dan Waibau. Wawancara dibuat dalam format etnografis agar memberikan gambaran yang jelas mengenai penerima manfaat dan dampak kehadiran sistem keamanan tersebut.

146 Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 112

a. Masyarakat Umum sebagai Penerima Manfaat Utama

Dalam sesi wawancara di Desa Ona, saya berjumpa dengan seorang warga yang saya sebut dengan nama Halik Buton. Ia bercerita bahwa sejak adanya SISKAMLING Jaga Sula, warga merasa jauh lebih tenang terutama ketika meninggalkan rumah pada malam hari. Bahkan, menurutnya, kasus kehilangan barang seperti mesin air dan ternak menurun signifikan.

Ia berkata dengan nada pelan namun mantap “Kalau dulu mau tidur saja rasa cemas. Tapi sekarang, tiap malam ada yang jaga, kita bisa tidur nyenyak.”¹⁴⁷ Pernyataan ini memperjelas bahwa masyarakat umum baik laki-laki, perempuan, maupun lansia merupakan kelompok pertama yang merasakan manfaat konkret berupa rasa aman, kepastian sosial, serta kenyamanan tinggal.

Keamanan bukan hanya soal tidak adanya kriminalitas, tetapi juga hadirnya *psychological safety* atau kenyamanan batin. Hal ini sejalan dengan pendapat Maslow dalam teori hierarki kebutuhan, bahwa rasa aman merupakan kebutuhan fundamental setelah kebutuhan fisik terpenuhi.¹⁴⁸ Dengan demikian, SISKAMLING Jaga Sula tidak sekadar menghalau gangguan keamanan, tetapi mengisi ruang kebutuhan psikologis warga.

147 Wawancara Langsung Halik Buton, Guru ASN Pada Madrasah Tsanawiyah Al’Maruf Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat, Ona 4 Desember 2025

148 Maslow, Abraham. *Motivation and Personality*. (New York: Harper & Row, 2017), hlm. 89

b. Generasi Muda Mendapat Pelajaran Sosial dan Kedisiplinan

Di Desa Waiipa, saya mendapati pengalaman menarik bersama seorang pemuda yang nama Atang Embisa. Ia menyampaikan bahwa SISKAMLING membuatnya belajar tanggung jawab, menghargai waktu, dan belajar berinteraksi dengan warga lintas usia. Dalam bahasa sederhananya ia berkata “Kalau tidak ronda, kita malu sama yang lain. Jadi mau tidak mau kita belajar disiplin.”¹⁴⁹

Generasi muda pada akhirnya memperoleh manfaat berupa pembentukan karakter dan etika sosial. Hal ini relevan dengan gagasan Suyanto yang menyatakan bahwa keterlibatan pemuda dalam program keamanan merupakan media pembelajaran *civic responsibility* atau tanggung jawab kewargaan.¹⁵⁰

Dengan adanya SISKAMLING, pemuda tidak sekadar diposisikan sebagai penonton sosial. Mereka terlibat langsung, diperhitungkan, dan memiliki peran yang jelas. Ini berarti SISKAMLING melahirkan pendidikan karakter berbasis pengalaman, bukan sekadar ceramah verbal.

149 Wawancara Langsung Atang Embisa, Pemuda Sekaligus Anggota Linmas Desa Waiipa Kecamatan Sanana, Waiipa 6 Desember 2025

150 Suyanto, Bagong. *Masyarakat dan Tanggung Jawab Sosial*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 244

c. Kaum Perempuan Mendapat Perlindungan Sosial dan Ketenangan

Tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan sering menjadi kelompok yang sangat sensitif terhadap ancaman keamanan terutama di malam hari. Dalam kunjungan saya di Desa Waibau, seorang Wanita bernama Amelia Amir yang bekerja setiap saat meninggalkan rumah baik siang dan malam untuk melaksanakan tugas di Kampus STAI Babussalam Sula Maluku Utara menuturkan pengalaman emosionalnya, “Dulu Kalau Papa atau Kaka di luar kampung, saya tidak berani kemana-mana karena takut rumah tidak aman, tapi sejak adanya SISKAMLING di Desa Waibau saya keluar rumah tanpa ragu tidur karena tahu ada orang yang jaga.”¹⁵¹

Pernyataan tersebut menunjukkan manfaat langsung berupa penurunan kecemasan dan meningkatnya *quality of sleep* bagi para perempuan. Lebih jauh lagi, program SISKAMLING Jaga Sula juga membantu perempuan yang harus keluar malam untuk kebutuhan mendesak misalnya ke puskesmas, membeli obat, atau menemani keluarga sakit. Mereka merasa punya “mata yang melihat” dan “tangan yang siap menolong”.

Dalam kajian sosiologi gender, keamanan sosial adalah salah satu bentuk pemenuhan *gender protection right*. Artinya, kehadiran SISKAMLING bagi perempuan bukan hanya fungsi keamanan,

151 Wawancara Langsung Amalia Amir, S.Pd, Warga Desa Waibau Kecamatan Sanana, Waibau 7 Desember 2025

tetapi *advokasi kultural* terhadap hak mereka untuk merasa aman.¹⁵²

d. Anak-Anak Mendapat Dampak Tak Langsung Melalui Lingkungan Aman

Salah satu indikator keberhasilan sistem keamanan lingkungan adalah ruang tumbuh anak menjadi sehat dan bebas dari rasa takut. Ketika lingkungan terkendali, anak-anak dapat bermain di halaman rumah hingga sore hari, berangkat mengaji tanpa didampingi berlebihan, serta tumbuh di tengah atmosfer sosial yang stabil.

Di Desa Ona, seorang anak usia sekolah dasar nama Alif Fikram berkata singkat namun penuh makna bahwa “Kalau malam sunyi tapi tidak (seng) seram.”¹⁵³ Kalimat sederhana itu membuktikan bahwa keamanan tidak hanya milik orang dewasa. Anak-anak adalah penerima manfaat ekologis yang mungkin tidak disadari. Lingkungan yang aman adalah fondasi pembentukan mental dan sosial yang positif sebagaimana dinyatakan oleh Hurlock bahwa rasa aman di masa kecil mempengaruhi struktur kepribadian di masa depan.¹⁵⁴ Dengan demikian, SISKAMLING berjasa dalam menciptakan lanskap sosial yang ramah tumbuh kembang.

152 Nursyahbani, R. *Perempuan dan Hak Perlindungan Sosial*. (Makassar: Pustaka Timur, 2018), hlm. 61

153 Wawancara Langsung Alif fikram, Siswa SD Negeri Ona Kecamatan Sulabesi Barat, Ona 4 Desember 2025

154 Hurlock, Elizabeth. *Perkembangan Anak*, (edisi ke-4. Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 17

e. Kelompok Rentan (Lansia) dan Linmas

Warga lanjut usia namun masih giat mencari nafkah merupakan kelompok yang sering kali tidak memiliki kemampuan fisik untuk menjaga diri sendiri. Di Desa Ona saya berbincang dengan seorang lansia bernama Bapak Ismail Basai. Dengan senyum tipis ia mengatakan: “Biar umur tua, rasa aman itu mahal. Dan sekarang (*Katong*) kami dapat rasa itu benar-benar terjadi di Desa Ona.”¹⁵⁵

Ucapan tersebut memberi penegasan bahwa SISKAMLING menjadi instrumen solidaritas sosial. Kelompok rentan merasa dihargai, diperhatikan dan tidak terabaikan. SISKAMLING bagi mereka bukan hanya penjagaan, tetapi simbol kepedulian sosial. Hal ini sejalan dengan konsep *social safety net* yang dikemukakan Gunawan, bahwa keamanan berbasis masyarakat menjadi penopang kesejahteraan kelompok rentan.¹⁵⁶

Tidak banyak disadari bahwa pemerintah desa serta aparat keamanan juga merupakan pihak yang menerima manfaat signifikan. Mereka terbantu dalam menekan angka kriminalitas, mengurangi beban patroli, serta memperoleh data lapangan melalui laporan warga.

Di Desa Ona saya mewawancarai seorang petugas Linmas Bernama Bapak Mahyudin Tidore Ia menyatakan “Kalau warga sudah sadar keamanan, kami tinggal koordinasi. Kerja jadi lebih

155 Wawancara Langsung Ismail Basai, Pekerja Tukang Kayu Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat, Ona 4 Desember 2025

156 Gunawan, S. *Jaringan Perlindungan Sosial dalam Struktur Desa*. (Surabaya: Airlangga Press, 2020), hlm. 53

ringan.”¹⁵⁷ Ini membuktikan bahwa SISKAMLING menjadi mitra strategis pemerintah desa. Bukan menggantikan peran keamanan formal, melainkan memperkuat struktur kewaspadaan. Dalam perspektif teori *governance*, keamanan terbaik adalah kolaboratif bukan sentralistik.

Selain manfaat psikologis dan keamanan langsung, SISKAMLING Jaga Sula juga berpotensi menciptakan keseimbangan ekonomi mikro. Lingkungan aman membuat masyarakat lebih berani membuka usaha di malam hari, menjual hasil kebun atau membangun kios kecil.

157 Wawancara Langsung Mahyudin Tidore, Linmas Pada SISKAMLING Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat, Ona 4 Desember 2025

BAB VIII

REFLEKSI DAN ARAH MASA DEPAN

Keamanan tidak pernah bersifat statis. Ia adalah proses sosial yang terus tumbuh mengikuti dinamika masyarakat. Dalam konteks Kepulauan Sula, perjalanan SISKAMLING *Jaga Sula* telah menunjukkan bahwa keamanan sejati tidak hanya dibangun dengan pagar besi atau patroli malam, tetapi dengan kepercayaan, solidaritas, dan tanggung jawab bersama.

Bab ini menjadi refleksi penulis terhadap pelajaran berharga sebagai Koordinator tim perumus *Jaga Sula*, sekaligus merumuskan arah masa depan yang berkelanjutan dalam membangun keamanan berbasis nilai lokal.

A. Pelajaran Penting dari Kegiatan Jaga Sula

1. Kekuatan Masyarakat dalam Membangun Keamanan Sendiri

Salah satu pelajaran paling penting dari perjalanan SISKAMLING *Jaga Sula* adalah bahwa masyarakat bukan hanya objek keamanan, tetapi subjek utama. Dalam banyak kasus di lapangan, ketika aparat formal terbatas jangkauannya baik karena geografis, sumber daya, atau birokrasi justru inisiatif warga menjadi garda pertama menjaga ketertiban.

Warga Desa Ona yang membangun Pos Kamling, pemuda Desa Ona dengan gerakan “Jaga Laut, Jaga Kampung”, atau tokoh adat yang menghidupkan kembali *Maksaira*, semuanya menunjukkan hal yang sama: keamanan berawal dari kesadaran kolektif seluruh Lapisan Masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Robert Putnam dalam *Bowling Alone*, bahwa masyarakat yang memiliki jaringan sosial kuat dan kepercayaan horizontal cenderung lebih stabil dan aman.¹⁵⁸ Keamanan di Kepulauan Sula tidak tumbuh dari instruksi, tetapi dari interaksi.

Berdasarkan observasi di Desa Ona Kecamatan Sulabesi barat pada awal Bulan November 2025 pasca pengaktifan SISKAMLING, “Masyarakat yang percaya satu sama lain akan lebih cepat mengatasi ketakutan bersama daripada masyarakat yang hanya menunggu perlindungan dari atas. Maka, pelajaran penting bahwa keamanan adalah hasil dari kepercayaan sosial, bukan semata pengawasan struktural.

2. Sinergi antara Tradisi dan Modernitas

Pelajaran kedua adalah pentingnya menyatukan nilai lama dengan cara baru. Tradisi seperti *Maksaira*, gotong royong, dan ronda malam telah menjadi fondasi sosial yang kokoh. Namun tanpa inovasi, tradisi ini bisa kehilangan daya hidup di tengah perubahan zaman.

158 R. D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. (New York: Simon & Schuster. 2000), hlm. 22

SISKAMLING Jaga Sula berhasil mengubah nilai tradisional menjadi sistem yang modern dengan tetap menghormati akar budayanya. Misalnya, pengawasan lingkungan kini dilengkapi dengan teknologi komunikasi sederhana seperti grup WhatsApp atau aplikasi pelaporan masyarakat, namun nilai-nilainya tetap: *Baku Jaga (Mana jaga), baku rasa (Kalesang), dan baku sayang (Mana Wak)*.

Menurut Nasution dalam *Sosiologi Keamanan Lokal di Era Digital*, keberhasilan model keamanan komunitas di masa depan bergantung pada kemampuan menggabungkan nilai lokal dengan perangkat teknologi.¹⁵⁹

Kepulauan Sula telah menunjukkan bentuk sinergi itu menjaga tradisi, sambil membuka diri pada modernitas.

B. Tantangan dan Adaptasi Masa Depan

1. Mobilitas Masyarakat, Digitalisasi, dan Globalisasi

Kepulauan Sula kini menghadapi tantangan baru, mobilitas sosial dan digitalisasi. Masyarakat yang dulu hidup dalam komunitas homogen kini mengalami arus keluar masuk penduduk, migrasi kerja, dan pertukaran budaya yang semakin intens. Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi integrasi sosial.

Di sisi lain, digitalisasi menghadirkan paradoks. Di satu sisi, teknologi mempercepat komunikasi dan pelaporan keamanan.

159 M. Nasution, *Sosiologi Keamanan Lokal di Era Digital*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2021), hlm. 103

Namun di sisi lain, media sosial juga bisa memicu disinformasi, konflik digital, atau perundungan daring.

Karenanya, adaptasi masa depan harus mencakup:

- a. Literasi digital warga, terutama pemuda dan perangkat desa, agar teknologi mendukung keamanan, bukan sebaliknya.
- b. Pemantauan sosial berbasis komunitas daring, seperti grup keamanan lingkungan digital dengan moderasi yang bijak.
- c. Pelatihan keamanan siber lokal, misalnya bagaimana melindungi data warga dan mencegah penyebaran hoaks.

Menurut Surbakti dalam bukunya *Keamanan Sosial di Era Globalisasi*, mengungkapkan bahwa keamanan lokal kini harus memperluas medan pengawasan dari jalan kampung hingga ruang digital.¹⁶⁰

2. Perlunya Regenerasi Kader Keamanan Sosial

Tantangan lain adalah regenerasi kader SISKAMLING. Banyak pos keamanan tradisional bergantung pada tokoh tua, sementara partisipasi pemuda kadang menurun karena orientasi hidup yang berubah. Jika tidak ada regenerasi, SISKAMLING *Jaga Sula* berisiko kehilangan energi sosialnya.

Solusinya harus sistemik yang perlu dilakukan di setiap desa di Kepulauan Sula:

- a. Pelatihan kader keamanan muda di tingkat desa memadukan kepemimpinan, komunikasi, dan literasi keamanan berbasis digital.

160 R. Surbakti, *Keamanan Sosial di Era Globalisasi*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2020), hlm. 144

- b. Integrasi program Jaga Sula ke dalam kurikulum local pada Tingkat SMA sederajat, misalnya muatan pelajaran sekolah tentang partisipasi sosial dan tanggung jawab lingkungan pada Mata Pelajaran PKN atau Muatan Lokal.
- c. Pemberdayaan pemuda desa melalui kegiatan kreatif seperti lomba desain pos kamling digital, konten edukatif keamanan, dan kampanye “Pemuda Jaga Sula”.

Dari pengalaman lapangan, generasi muda lebih mudah terlibat jika keamanan dikemas bukan sebagai tugas formal, tetapi ekspresi identitas sosial.

C. Menuju Model Keamanan Berkelanjutan

1. Blueprint SISKAMLING Berbasis Nilai Lokal

Untuk menjaga keberlanjutan SISKAMLING *Jaga Sula*, diperlukan blueprint atau cetak biru keamanan sosial yang berpijak pada nilai-nilai lokal. Blueprint ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan panduan praktis bagi setiap desa di Kepulauan Sula dalam mengatur keamanan secara mandiri.

Blueprint tersebut dapat mencakup:

- a. Struktur organisasi keamanan desa (terpadu antara aparat, pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat).
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) ronda dan mediasi sosial berbasis adat.
- c. Sistem pelaporan digital sederhana (aplikasi, grup komunikasi warga, layanan 110 Polres Kepulauan Sula).

- d. Program evaluasi dan pelatihan rutin, disesuaikan dengan konteks sosial dan geografi Sula.

Seperti dijelaskan oleh Ostrom dalam *Governing the Commons*, model tata kelola komunitas yang berhasil selalu memiliki aturan bersama yang fleksibel dan dipahami secara lokal.¹⁶¹ Dengan demikian, keamanan di Sula tidak menjadi beban, tetapi kesadaran kolektif yang terjaga lintas generasi ke generasi.

2. Potensi Sula sebagai Contoh Nasional

Apa yang terjadi di Kepulauan Sula tidak hanya penting bagi daerah itu sendiri, tetapi juga berpotensi menjadi contoh nasional. Model *Jaga Sula* menawarkan alternatif baru dalam kebijakan keamanan nasional yang selama ini terlalu sentralistik.

Sula menunjukkan bahwa keamanan berbasis komunitas dapat tumbuh dari bawah dengan menggabungkan adat, agama, pemuda, dan aparat negara dalam satu visi: menjaga kehidupan bersama. Pendekatan ini dapat diadaptasi oleh wilayah lain, terutama daerah kepulauan dan perbatasan yang memiliki karakter sosial serupa.

Menurut riset oleh Santosa dalam *Keamanan Partisipatif di Wilayah Terpencil Indonesia*, model seperti Jaga Sula menjadi representasi nyata konsep *community policing* yang relevan dengan konteks budaya lokal Indonesia.¹⁶²

161 E. Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), hlm. 85

162 A. Santosa, *Keamanan Partisipatif di Wilayah Terpencil Indonesia*. (Bandung: Unpad Press. 2022), hlm. 58

Dengan memperkuat model ini melalui kebijakan nasional, Sula bukan hanya menjaga dirinya sendiri tetapi ikut menjaga wajah Indonesia yang aman, berdaulat, dan berakar pada nilai gotong royong.

SULA YANG AMAN, SULA YANG BERSATU

Tidak ada pembangunan yang bermakna tanpa keamanan. Tidak ada keamanan yang kokoh tanpa kebersamaan. Melalui perjalanan panjang buku ini, kita belajar bahwa SISKAMLING Jaga Sula bukan sekadar program keamanan lingkungan, tetapi gerakan moral, sosial, dan kultural lintas generasi yang tumbuh dari hati masyarakat Sula sendiri.

Dalam masyarakat kepulauan yang plural seperti Sula, saling terhubung oleh laut dan nilai-nilai kebersamaan, keamanan tidak dapat dipaksakan dari luar. Ia harus ditumbuhkan dari dalam dari kesadaran warga untuk menjaga satu sama lain. bagian penutup ini menjadi ruang refleksi atas nilai-nilai utama, harapan masa depan, dan seruan bersama untuk membangun Sula yang aman dan bersatu.

A. Ringkasan Nilai-Nilai Utama

Setelah menelusuri Delapan bab sebelumnya, kita menemukan bahwa *Jaga Sula* bukanlah sekadar slogan, melainkan konsep hidup yang mengandung nilai-nilai universal: tanggung jawab, kebersamaan, dan cinta tanah kelahiran.

1. Nilai Tanggung Jawab Sosial

Keamanan dimulai dari kesadaran pribadi bahwa setiap individu adalah penjaga bagi lingkungannya. Dalam konteks Jaga Sula, “jaga” bukan hanya tentang ronda malam, tetapi komitmen moral untuk melindungi sesama dan menegakkan harmoni.

Seperti dikemukakan oleh Bauman dalam *Liquid Modernity*, masyarakat modern menghadapi risiko kehilangan makna tanggung jawab sosial akibat individualisme.¹⁶³ Namun, praktik *Jaga Sula* menjadi contoh bagaimana tanggung jawab kolektif dapat hidup kembali di tengah era modern.

2. Nilai Kebersamaan dan Gotong Royong

Nilai *baku jaga* (*Mana Jaga*) dan *baku rasa* (*Kalesang*) mencerminkan akar budaya Sula yakni gotong royong atau dalam Bahasa lokal sula dikenal dengan istilah *Mana Wa Lima* untuk menjaga kehidupan bersama. Inilah bentuk nyata dari *social capital* kepercayaan dan solidaritas yang memperkuat hubungan antarwarga.¹⁶⁴ Pos Kamling yang dibangun bersama, pertemuan malam warga, dan kegiatan ronda bukan sekadar aktivitas fisik, tetapi manifestasi persaudaraan sosial.

163 Z. Bauman, *Liquid Modernity*. (Cambridge: Polity Press. 2007), hlm. 45

164 R. D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. (New York: Simon & Schuster. 2000), hlm 22

3. Nilai Kemandirian dan Kearifan Lokal

SISKAMLING Jaga Sula lahir dari kemandirian warga. Mereka tidak menunggu bantuan, tetapi bergerak bersama. Prinsip ini selaras dengan pandangan Elinor Ostrom bahwa komunitas yang memiliki kemampuan mengatur dirinya sendiri secara kolektif akan lebih berhasil menjaga sumber daya dan ketertiban sosialnya.¹⁶⁵ Dengan kearifan lokal, masyarakat Sula menciptakan sistem keamanan yang unik berbasis adat, berjiwa gotong royong, dan berpandangan ke depan secara turun temurun.

B. Harapan terhadap Pembaca dan Pembuat Kebijakan

Buku ini tidak hanya ditulis untuk dibaca, tetapi untuk ditindaklanjuti. Jaga Sula adalah model yang hidup, dan ia membutuhkan partisipasi semua pihak warga, pemerintah, aparat, akademisi, dan generasi muda.

1. Untuk Pembaca Umum

Semoga setiap pembaca menyadari bahwa keamanan adalah urusan bersama. Tidak perlu menunggu perintah atau program dari luar; cukup dengan mulai dari hal sederhana, menyapa tetangga, menjaga fasilitas umum, berpartisipasi dalam forum kampung (*maksaira*), atau melaporkan potensi gangguan sosial secara bijak.

¹⁶⁵ R. D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. (New York: Simon & Schuster. 2000), hlm. 88

Nilai-nilai *Jaga Sula* dapat diterapkan di mana saja, di lingkungan perkotaan yang anonim maupun di desa yang masih erat hubungan sosialnya. Jika setiap komunitas memiliki semangat yang sama, maka Indonesia akan menjadi negara yang aman karena rakyatnya saling menjaga.

2. Untuk Pembuat Kebijakan dan Aparat Pemerintah

Harapannya, para pengambil keputusan tidak memandang keamanan hanya dari sisi institusional atau aparat, tetapi sebagai gerakan sosial berbasis nilai. Pendekatan partisipatif seperti *Jaga Sula* perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional maupun lokal melalui Pemerintah Daerah Kepulauan Sula melalui:

- a. Program *community policing* berbasis budaya lokal.
- b. Dukungan anggaran untuk pos keamanan terpadu di desa.
- c. Pendidikan kewargaan yang menumbuhkan tanggung jawab sosial sejak dini.

Seperti diungkapkan oleh Bayley dalam *Changing the Guard: Developing Democratic Police Abroad*, keamanan yang berkelanjutan hanya mungkin jika polisi dan masyarakat bekerja sebagai mitra, bukan sebagai pihak yang terpisah.¹⁶⁶ Dalam konteks ini, SISKAMLING *Jaga Sula* adalah laboratorium sosial tentang bagaimana kemitraan itu dapat diwujudkan secara nyata.

166 D. Bayley, *Changing the Guard: Developing Democratic Police Abroad*. (Oxford: Oxford University Press. 2006), hlm. 97

C. Seruan untuk Membangun “Sula yang Aman, Sula yang Bersatu”

Sula adalah cermin Indonesia dalam bentuk kecil kaya budaya, beragam etnis, namun diikat oleh nilai gotong royong. Keamanan bukan tujuan akhir, tetapi jalan menuju kehidupan yang damai dan produktif, kolaboratif dan partisipatif yang tertanam kokoh dalam setiap denyut nadi rakyat.

Oleh karena itu, penulis mengajak seluruh elemen masyarakat Kepulauan Sula, dari Seluruh pulau Sulabesi hingga Mangoli, untuk menjaga api kebersamaan dan solidaritas. Satu gangguan kecil terhadap rasa percaya dapat berakibat besar terhadap stabilitas sosial. Namun sebaliknya, satu tindakan kecil dalam menjaga tetangga dapat memperkuat fondasi perdamaian terhadap sesama.

Seruan moral ini sederhana: “Jaga Sula bukan tugas sebagian orang, melainkan panggilan bagi setiap warga. Jaga Dirimu, Jaga Keluarga dari pengaruh Minuman Keras, Kekerasan seksual dan KDRT, Tertib Lalu Lintas, Konflik antara kampung, Jaga lautmu dari *illegal Fishing*, jaga kampungmu, jaga sesamamu. Karena di sanalah terletak masa depan Sula.

Keamanan sejati tidak dapat dibeli atau dipaksakan; ia tumbuh melalui kesadaran, cinta, dan komitmen. Jika masyarakat Sula mampu menjaganya dengan sepenuh hati, maka Sula tidak hanya aman, tetapi juga bersatu dan berdaya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Fitri, & R. Hasan, *Keamanan Partisipatif di Indonesia Timur: Studi Kasus Wilayah Kepulauan*. Jakarta: Pustaka Nusantara, 2022
- A. Heriyanto, *Pemberdayaan Komunitas dalam Ketahanan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2019
- A. Santosa, *Keamanan Partisipatif di Wilayah Terpencil Indonesia*. Bandung: Unpad Press. 2022
- A. Wibowo, *Inovasi Sosial di Desa Pesisir Indonesia*. Makassar: LIPI Press. 2020
- A. Widodo, *Keamanan Digital dan Partisipasi Sosial Masyarakat Desa*. Surabaya: Airlangga University Press. 2021
- B. Suroso, *Keamanan Sosial di Wilayah Kepulauan Indonesia*. Surabaya: Humaniora Press. 2020
- C. H. Lee, *Community Policing in Rural Asia*. (Singapore: Springer. 2017
- C. S. Holling, “*Understanding the Complexity of Economic, Ecological, and Social Systems.*” *Ecosystems*, 4(5), 2001

Clifford Geertz, *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*. Berkeley: University of California Press, 1962

D. Bayley, *Changing the Guard: Developing Democratic Police Abroad*. Oxford: Oxford University Press. 2006)

D. Hendarso, *Hukum dan Keamanan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2018

D. Heriyanto, *Pemberdayaan Komunitas dalam Ketahanan Sosial*. Bandung: Humaniora. 2019

D. Rachman, *Keamanan Komunitas di Era Disrupsi Sosial*. Bandung: Alfabeta 2021

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2025-2045

E. Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press. 2010

Elinor Ostrom. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press. 2009

Emile Durkheim, *The Division of Labour in Society*. New York: Free Press, 1893

F. Fukuyama, *Social Capital and Civil Society*. Washington DC: IMF Institute 2000

F. H. Norris, *Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy*. American Journal of Community Psychology, 2008

Franz Magnis Soseno, *Filsafat Sebagai ilmu Kritis*, Yogyakarta, Kanisius, 1992

G. Ritzer, *Sociological Theory*. New York: McGraw-Hill. 2010

H. Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books. 2015

Haryono Widodo, “Revitalisasi Nilai Gotong Royong dalam Masyarakat Modern.” *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 8, No. 2 2020

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Negara. 2010

Jurgen Habermas, *Moral Consciousness and Communicative Action*. Cambridge Massachusetts: The MIT Press. 1990

Kabupaten Kepulauan Sula Dalam Angka 2025, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula, Vol.18, 2025

Kadir, M *Transformasi Sosial di Wilayah Pesisir dan Kepulauan Indonesia*. Makassar: Lembaga Maritim Indonesia. 2022

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Data Statistik Wilayah dan Keamanan Desa Kepulauan*. Jakarta: Pusat Data Kemendagri, 2023

Koentjaraningrat. *Kebudayaan dan Masyarakat di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka 2002

L. Schirch, *The Little Book of Strategic Peacebuilding*. Pennsylvania: Good Books. 2015

M. Abdullah, *Adat dan Ketertiban Sosial di Indonesia Timur*. Makassar: Pustaka Timur Nusantara. 2018

M. Arifin, *Keamanan Sosial Maritim Indonesia: Tantangan dan Inovasi di Wilayah Pesisir*. Jakarta: LIPI Press. 2021

M. Granovetter, "Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness." *American Journal of Sociology*, 91(3), 1985

M. Latif, *Modal Sosial dan Keamanan Komunitas di Wilayah Timur Indonesia*. Makassar: LIPI Press. 2020

- M. Nasution, *Sosiologi Keamanan Lokal di Era Digital*. Jakarta: Rajawali Pers. 2021
- M.Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings*. New York: Pantheon. 1980
- Mahmud, R. *Sosiologi Komunitas Kepulauan: Modal Sosial dan Identitas Lokal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2019
- Nurcholish Madjid. *Etika Sosial dan Spiritualitas Nusantara*. Yogyakarta: LKIS. 2003
- P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum: Teori dan Metodologi*. Jakarta: Kencana. 2017
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 23 tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

- Putnam, Robert D. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press, 1993
- R. Arifin, *Model Pemolisian Partisipatif di Wilayah Terpencil Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2021
- R. Chambers, *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology. 1997
- R. D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster. 2000
- R. Heeks, *Information and Communication Technology for Development (ICT4D): Theories and Practices*. London: Routledge. 2018
- R. Mahmud, *Sosiologi Komunitas Kepulauan: Modal Sosial dan Identitas Lokal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2019
- R. Robertson, *Glocalization: Time–Space and Homogeneity–Heterogeneity*. London: Sage. 1995
- R. Surbakti, *Keamanan Sosial di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2020
- S. Budiman, *Keamanan Sosial dan Gotong Royong Masyarakat Nusantara*. (Jakarta: Komunika Press, 2021

Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Bandung: Citra Aditya Bakti 2009

Soetomo. *Pembangunan Berbasis Komunitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015

Surat Edaran Bersama Bupati Kepulauan Sula, Kapolres Kepulauan Sula dan Dandim 1510 Kepulauan Sula Nomor: 100.3.4.2/118/SETDA-KS/V/2025 Tentang Pemberitahuan Menjaga Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula

Surat Edaran Mendagri Nomor 300.1.4/e.1/BAK, Tanggal 3 September 2025

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 300.1.4/e.1/BAK tertanggal 3 september 2025

U. Tjandrasasmita, *Budaya Bahari dan Identitas Kepulauan Indonesia*. Yogyakarta: Ombak Press. 2018

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

WG Skogan, *Police and Community in Chicago*, Chicago: Oxford University Press, 2006

Z. Bauman, *Liquid Modernity*. Cambridge: Polity Press. 2007

Z. Nasution, *Sejarah Sosial Keamanan Indonesia*. Jakarta: LP3ES. 1998

Zygmunt Bauman, *Liquid Modernity*. Cambridge: Polity Press, 2001

SUMBER LAIN

Sambutan Samsul Pauwah, S.Pd Kepala Desa Falabisahaya
Kecamatan Mangoli Utara pada Acara Peresmian Siskamling,
Falabisahaya 29 Oktober 2025

Sambutan Jainudin Buamona Sekretaris Pemerintahan Kecamatan
Mangoli Utara pada Acara Peresmian Siskamling,
Falabisahaya 29 Oktober 2025

Wawancara Langsung La Anda Buton, Kepala Pemerintahan Desa
Ona Kecamatan Sulabesi Barat, Ona 14 November 2025

Wawancara Langsung Sahram Umamit, Nelayan Desa Ona
Kecamatan Sulabesi Barat, Ona 15 November 2025

Wawancara Langsung AKBP, Kodrat Muh. Hartanto, S.I.K,
Kapolres Kepulauan Sula, Fatcey 16 November 2025

Wawancara Langsung IPTU Gunawan Ipa, S.H., M.H., Kepala
Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) Sulabesi Barat, Kabau 20
November 2025

DAFTAR ISTILAH

Dalam penulisan buku Siskamling Jaga Sula, terdapat beberapa istilah local dan singkatan. Berikut maksud dan penjelasan dari Istilah dan singkatan dalam penulisan buku ini.

1. Bahal Umasoa (Memiliki Rasa Malu Sosial)

“Bahal Umasoa” adalah sebuah konsep etika lokal di Kepulauan Sula yang menggambarkan *rasa malu yang berasal dari kesadaran sosial*, bukan hanya dari diri sendiri. Malu di sini bukan sekadar perasaan tidak nyaman saat berbuat salah, melainkan *mekanisme moral* yang membuat seseorang mempertimbangkan dampak perilakunya terhadap keluarga, soa, atau komunitas adat. Rasa malu sosial ini berfungsi sebagai alat kontrol sosial tradisional. Masyarakat yang memiliki “Bahal Umasoa” akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang bisa mencemarkan nama baik kelompoknya. Dalam konteks keamanan komunitas, nilai ini sangat berpengaruh dalam mendorong masyarakat tetap menjaga norma, tidak melakukan kekerasan, serta aktif dalam kegiatan jaga kampung, karena mereka tidak ingin dipandang buruk oleh lingkungan sosialnya.

2. Bau Pia (Baku Bae)

“Baku bae” berarti *saling memperbaiki, saling memaafkan, dan memulihkan hubungan sosial*. Nilai ini menekankan bahwa

konflik bukan tujuan akhir, melainkan sesuatu yang harus segera dibereskan demi keberlanjutan harmoni. Dalam banyak tradisi Maluku Utara, nilai ini menjadi fondasi rekonsiliasi sosial, mengajak orang menyelesaikan masalah dengan hati dingin, mengedepankan dialog, dan menghindari dendam. “Bau Pia” adalah proses aktif di mana dua pihak yang sebelumnya bermasalah dipersatukan kembali melalui musyawarah, konsumsi bersama, atau ritual adat tertentu.

3. Dong (Mereka)

Dalam dialek keseharian, “Dong” digunakan untuk menyebut pihak ketiga atau sekelompok orang yang sedang dibicarakan. Namun secara sosial, istilah ini sering dipakai bukan hanya sebagai kata ganti, tetapi sebagai penanda *kelompok sosial tertentu* dalam struktur masyarakat.

4. Katong (Kita)

“Katong” adalah kata yang sangat inklusif menandakan kebersamaan, kesetaraan, dan kesadaran kolektif. Ketika seseorang berkata “Katong jaga kampung”, itu mengandung makna bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama, tidak bergantung pada aparat saja.

5. Kia Kub (Makan Bersama)

Makan bersama bukan hanya aktivitas fisik, melainkan ritus sosial yang mengikat masyarakat. “Kia Kub” menandakan momen

persaudaraan, di mana sekat sosial dilebur dan hubungan emosional diperkuat melalui kebersamaan dalam satu hidangan.

6. Kit Mua-Mua Tabasanohi (Kita Semua Bersaudara)

Ungkapan ini merupakan prinsip moral dan etika kolektif bahwa seluruh warga dalam komunitas adalah bagian dari satu keluarga besar. Ia meruntuhkan batas-batas sosial seperti perbedaan marga, agama, atau kampung. Sebagai nilai budaya, prinsip ini berperan besar dalam merawat harmoni sosial. Dalam konteks Siskamling, nilai ini menjadi basis bahwa setiap warga harus saling menjaga, karena pada dasarnya mereka bersaudara.

7. Lia Pante (Pengawasan Laut dan Pesisir Pantai)

“Lia Pante” adalah tradisi penjagaan wilayah pesisir, yang dahulu dilakukan untuk memantau ancaman dari laut baik pencurian ikan, masuknya kapal asing, maupun potensi gangguan dari luar desa. Tradisi ini kini terintegrasi ke dalam konsep keamanan modern melalui patroli pantai, pengawasan aktivitas ilegal, hingga upaya menjaga kelestarian pesisir. “Lia Pante” menegaskan bahwa keamanan bukan hanya di daratan, melainkan mencakup ruang laut yang menjadi sumber kehidupan masyarakat pesisir.

8. Maksaira (Bermusyawarah)

“Maksaira” menunjukkan praktik musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan penting. Musyawarah ini biasanya dilakukan di rumah yang di tunjuk atau kantor desa dengan melibatkan tokoh-

tokoh penting. Nilai utamanya adalah: Mendengarkan semua pihak, Tidak tergesa-gesa mengambil Keputusan, Menjaga agar keputusan bersifat adil dan diterima luas.

9. Malom Kub (Kumpul Bersama)

Maknanya mirip dengan makan bersama, tetapi lebih luas: mencakup pertemuan, pertemanan, diskusi santai, atau perkumpulan adat. Dalam pertemuan ini informasi komunitas mengalir, termasuk isu keamanan, rencana kegiatan, atau kabar warga. Kebiasaan “Malom Kub” menjaga agar komunikasi antarwarga tetap terbuka, sehingga potensi konflik bisa cepat diidentifikasi dan diselesaikan.

10. Mana Jaga (Saling Menjaga)

Ini adalah inti dari seluruh sistem keamanan masyarakat. “Mana Jaga” tidak hanya berarti menjaga rumah atau lingkungan, tetapi juga menjaga: nama baik keluarga, keselamatan sesame, harmoni sosial, hak milik dan harta benda. Nilai ini mendorong masyarakat untuk tidak bersikap individualistik, dan memahami bahwa setiap orang adalah penjaga bagi orang lain.

11. Mana Wak (Baku Sayang)

“Baku sayang” adalah hubungan kasih sayang dan perhatian antarsesama warga. Nilai ini menjadi fondasi toleransi, gotong royong, serta solidaritas sosial.

12. Matapia Neka Nau Mata do Pia

Istilah dari Bahasa sula yang memiliki arti (Manusia itu tahu aturan hidup dan ingat pertanggungjawaban setelah meninggal dunia). Ungkapan ini sarat nilai moral religius. Ia menekankan bahwa manusia harus hidup berdasarkan aturan baik aturan adat, hukum negara, maupun aturan agama karena setiap tindakan kelak akan dipertanggungjawabkan. Kalimat ini membentuk kesadaran moral yang kuat dalam masyarakat, sehingga pelanggaran hukum, kekacauan, atau tindakan merugikan orang lain dianggap tidak hanya salah secara sosial, tetapi juga secara spiritual.

13. Soa (Marga Besar)

“Soa” adalah unit kekerabatan besar yang terdiri atas beberapa marga kecil. Ia berfungsi sebagai struktur sosial dan politik lokal yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan adat. Dalam keamanan komunitas, peran soa sering muncul dalam koordinasi jaga, penyelesaian konflik, atau penguatan solidaritas antarwarga.

14. Tahlilan (Baca Doa Tahlilan)

Tahlilan adalah ritual keagamaan yang berisi pembacaan doa bersama untuk orang yang telah meninggal. Tradisi ini menumbuhkan nilai kebersamaan, saling dukung dalam duka, dan solidaritas spiritual. Secara sosial, kegiatan tahlilan memperkuat jaringan kekerabatan antarwarga, sehingga hubungan sosial dalam komunitas tetap harmonis.

15. Tolak Bala (Membaca Doa Selamat)

“Tolak Bala” biasanya dilakukan untuk memohon perlindungan dari marabahaya, penyakit, konflik, atau hal-hal buruk lainnya. Maknanya sangat kuat dalam menciptakan rasa aman kolektif. Tradisi ini juga memperkuat kepercayaan bahwa perlindungan adalah kombinasi usaha manusia dan spiritualitas.

16. Wa Lima (Gotong Royong)

“Wa Lima” adalah etos gotong royong dalam masyarakat Kepulauan Sula. Aktivitasnya bisa berupa membersihkan kampung, memperbaiki jalan, menjaga lingkungan, hingga membantu warga yang mengalami kesulitan.

17. Yana Kamapung (Jaga Desa)

Ini adalah istilah tradisi menjaga desa secara bersama-sama. Sistemnya bisa berupa ronda teratur, patroli lintas kelompok umur, atau kerja keamanan berbasis adat. Yana Kamapung menjadi model lokal yang kemudian banyak diadaptasi dalam praktik Siskamling modern.

18. PKT (Pos Keamanan Terpadu)

PKT adalah pos tempat berkumpulnya petugas jaga atau warga dalam sistem keamanan kampung. Fungsinya meliputi: pusat informasi keamanan, tempat koordinasi ronda dan tempat menyimpan alat pendukung keamanan. PKT merupakan bentuk modernisasi dari tradisi jaga kampung yang sudah ada sejak dahulu.

19. POLMAS (Pemolisian Masyarakat)

Polmas adalah pendekatan polisi yang mengutamakan kemitraan dengan masyarakat. Intinya adalah polisi bukan sekadar aparat penindak, tetapi rekan warga dalam menciptakan keamanan. Tujuan Polmas: membangun kepercayaan warga terhadap polisi, meningkatkan partisipasi Masyarakat, mendorong penyelesaian masalah secara dialogis.

20. RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa)

RKPDes adalah dokumen perencanaan strategis tahunan yang disusun oleh pemerintah desa, termasuk perencanaan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Membangun Dasar Operasional

“Jaga Sula” yang Terukur dan Berkelanjutan

Lampiran ini berfungsi sebagai bagian integral dari keseluruhan buku SISKAMLING *Jaga Sula*, yang tidak hanya menutup pembahasan, tetapi juga memperkuatnya melalui data, model struktural, serta pedoman lapangan yang dapat langsung diterapkan oleh masyarakat, pemerintah desa, maupun lembaga keamanan. Lampiran ini mencakup beberapa bagian diantaranya:

A. Lampiran Peta Wilayah Geografis Kepulauan Sula

Kepulauan Sula merupakan gugusan pulau di bagian selatan Provinsi Maluku Utara, terdiri atas dua pulau besar Pulau Sulabesi dan Pulau Mangoli serta pulau kecil lainnya. Kabupaten ini terdiri dua pulau besar yang tersebar di dalamnya 12 Kecamatan dan 80 Desa dimana 2 Desa diantaranya masih sementara menunggu pemekaran yakni Desa Umaga dan Desa Rawamangoli.

Secara geografis, wilayah ini berbatasan dengan:

1. Utara: Laut Maluku
2. Selatan: Laut Banda
3. Barat: Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Timur: Kabupaten Halmahera Selatan

Tabel Luas Wilayah Per Kecamatan

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
Sulawesi Barat	Kabau Darat	9.147,1	5,1
Sulawesi Selatan	Fuata	9.006,0	5,1
Sanana	Waihama	11.670,4	6,6
Sulawesi Tengah	Waiboga	7.528,7	4,2
Sulawesi Timur	Baleha	8.183,7	4,6
Sanana Utara	Pohea	7.706,3	4,3
Mangoli Timur	Waitina	20.584,6	11,6
Mangoli Tengah	Mangoli	25.516,2	14,3
Mangoli Utara Timur	Waisakai	15.980,3	9,0
Mangoli Barat	Dofa	15.249,2	8,6
Mangoli Utara	Falabisahaya	25.976,7	14,6
Mangoli Selatan	Buya	21.602,0	12,1
Kepulauan Sula		178.151,0	100

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Sula, 2023

Kondisi geografis yang tersebar menjadikan tantangan utama dalam menjaga keamanan, yaitu:

1. Akses antarwilayah yang terbatas – beberapa desa hanya dapat dijangkau melalui laut, sehingga respon terhadap situasi darurat sering tertunda.
2. Distribusi sumber daya aparat dan fasilitas keamanan yang tidak merata antara daerah pesisir dan pedalaman.
3. Keragaman sosial budaya antar-pulau yang membutuhkan pendekatan keamanan berbasis lokalitas dan adat.

Oleh karena itu, *Jaga Sula* mengadaptasi sistem keamanan dengan struktur pos terpadu desa dan koordinasi lintas-pulau, menjadikan keamanan berbasis solidaritas, bukan sekadar patroli formal.

B. Lampiran Struktur Organisasi SISKAMLING Jaga Sula

Struktur organisasi *Jaga Sula* dirancang dengan prinsip partisipatif, non-hierarkis, dan berbasis komunitas. Tujuannya bukan menciptakan struktur formal yang kaku, melainkan sistem koordinasi yang efektif dan mudah dijalankan di tingkat desa.

Berikut adalah model struktur dasar:

1. Dewan Pengarah (Pemerintahan Desa dan Tokoh Adat)

- a. Ketua: Kepala Desa / Lurah
- b. Wakil Ketua: Ketua Dewan Adat
- c. Penasehat: Tokoh agama, tokoh perempuan, Tokoh Pendidikan dan tokoh pemuda

Tugas:

- a. Menetapkan kebijakan umum keamanan lingkungan.
- b. Mengintegrasikan nilai adat ke dalam praktik keamanan.
- c. Menjadi mediator antara aparat dan masyarakat.

2. Koordinator Lapangan

- a. Koordinator Umum: Ketua RT atau RW
- b. Anggota: Ketua Pemuda, Babinsa/Babinkamtibmas, perwakilan warga

Tugas:

- a. Menyusun jadwal ronda.
- b. Melaporkan situasi keamanan mingguan.
- c. Mengatur pelatihan kesiapsiagaan masyarakat.

3. Tim Pelaksana SISKAMLING

- a. Petugas Ronda Malam (2–4 orang per shift)
- b. Petugas Administrasi & Dokumentasi
- c. Petugas Komunikasi dan Media Sosial Desa

Tugas:

- a. Melaksanakan ronda malam dan patroli lingkungan.
- b. Mengelola laporan gangguan keamanan.
- c. Menyebarkan informasi melalui sistem komunikasi lokal (HT desa, grup WhatsApp komunitas, papan pengumuman).

Model ini mengikuti pendekatan *community-based policing* (CBP). Keamanan berbasis masyarakat efektif karena mengembalikan fungsi kontrol sosial ke tangan warga tanpa menafikan peran aparat.”

C. Lampiran SOP (*Standard Operating Procedure*) Tentang PROGRAM SISKAMLING “JAGA SULA” DI WILAYAH POLRES KEPULAUAN SULA

1. PENDAHULUAN

2. UMUM

- a. Presisi merupakan akronim dari prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Jargon “Polri Presisi” merupakan program unggulan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Dalam program ini Kapolri bertekad untuk melakukan transformasi kepolisian menuju polisi yang presisi,

yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan diharapkan agar wajah Polri berubah menjadi lebih humanis, melayani, akuntabel, dan mengedepankan keadilan restoratif.

- a. Polisi prediktif artinya kepolisian bertransformasi menjadi aparat yang berorientasi pada pencegahan atau prediksi situasi dan kondisi. Dengan begitu, potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dianalisis dengan memanfaatkan data dan informasi yang didukung kemajuan teknologi.
 - b. Adapun, responsibilitas dimaknai sebagai rasa tanggung jawab dan responsif dalam bertugas, yakni menjamin keamanan masyarakat. Selanjutnya, transparansi berkeadilan, artinya polisi merealisasikan prinsip dan cara berpikir yang terbuka, akuntabel, dan humanis sehingga pelaksanaan tugas-tugas kepolisian menjamin rasa keadilan masyarakat.
 - c. Langkah perubahan Polri Presisi diejawantahkannya dalam empat langkah transformasi. Melingkupi transformasi organisasi (*transforming organization*), transformasi operasional (*transforming operation*), transformasi pelayanan publik (*transforming public service*), dan transformasi pengawasan (*transforming supervision*).
- b. Selain itu, arah kebijakan Kapolri juga fokus pada Revitalisasi Polri menuju Pelayanan Prima guna meningkatkan kepercayaan masyarakat, dimana salah satunya yang termasuk dalam kerangka Revitalisasi adalah agar Polri yang berada

diwilayah dapat membuat Terobosan Kreatif (Creative Breaktrough) dalam memelihara dan menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap guna menunjang lancarnya Pembangunan Nasional, mencakup masalah yang sangat luas dan kompleks yang perlu diwaspadai dan diatasi;

- c. Terkait dengan Terobosan Kreatif (Creative Breaktrough) yang sekaligus merupakan komitmen Revitalisasi, maka Polres Kepulauan Sula berupaya membuat suatu Terobosan Kreatif dengan Program “JAGA SULA” Dimana salah satu sub programnya ialah melaksanakan kegiatan SISKAMLING untuk menghadapi masalah - masalah Kamtibmas yang luas dan kompleks di lingkungan Masyarakat. Untuk itu, dihadapkan dengan keterbatasan - keterbatasan yang ada di aparaturnya Kamtibmas dimana Polri sebagai pilar utama dalam menjaga situasi Kamtibmas juga memerlukan peran serta masyarakat dan berperan aktif mengatasi masalah - masalah gangguan Kamtibmas, bahkan diharapkan agar masyarakat mampu untuk mengamankan diri dan lingkungannya sendiri dari gangguan Kamtibmas (Kamtibmas Swakarsa);
- d. Adanya kolaborasi antara Polres Kepulauan Sula dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula untuk mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif sehingga peran masyarakat dalam mengamankan diri dan lingkungan perlu dibimbing, digerakkan, didorong dan diarahkan agar potensi masyarakat tersebut secara maksimal dapat

dimanfaatkan untuk menunjang penanggulangan masalah - masalah Kamtibmas.

3. DASAR

- a. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan;
- c. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

4. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud untuk memberikan arahan umum tentang pelaksanaan program SISKAMLING “JAGA SULA”.
- b. Tujuan penyelenggaraan SISKAMLING “JAGA SULA” adalah tercapainya kondisi lingkungan pemukiman yang kondusif dan kemantapan ketahanan lingkungan pemukiman di bidang Kamtibmas yang ditandai ciri-ciri:
 - a. Norma-norma Agama, hukum dan adat dihayati serta ditaati dan diamalkan dengan baik oleh masyarakat;
 - b. Adanya mentalitas masyarakat yang mampu menjadi daya tangkal terhadap setiap ancaman, gangguan dan hambatan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c. Kepekaan masyarakat terhadap masalah-masalah Kamtibmas yang terjadi di lingkungan disertai Response Profesional sesuai norma-norma yang berlaku;

- d. Masyarakat dapat menikmati rasa bebas dari gangguan maupun ancaman, rasa dilindungi dan rasa ketentraman fisik maupun psikologis sehingga masyarakat dapat melaksanakan segala kegiatan usahanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
- e. Masyarakat dapat berperan aktif sesuai peran dan fungsinya masing-masing dalam mengimplementasikan sistem Kamtibmas Swakarsa di lingkungannya yang mencakup informasi maupun mengidentifikasi masalah-masalah Kamtibmas yang terjadi di lingkungannya dan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menyelesaikan melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat maupun kegiatan - kegiatan Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING).

A. PELAKSANAAN PROGRAM SISKAMLING “JAGA SULA”

1. PENGERTIAN-PENGERTIAN

- a. Pembinaan terpadu sistem keamanan lingkungan selanjutnya disingkat BinSISKAMLING adalah segala usaha dan kegiatan secara bersama antara aparat keamanan, aparat Pemerintahan lainnya, unsur - unsur swasta dan dengan warga masyarakat pada umumnya, yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian serta pedoman bagi penyelenggaraan SISKAMLING yang

- diarahkan pada terwujudnya keadaan yang Aman, Tertib dan Tentram dalam suatu lingkungan;
- b. Lingkungan Pemukiman adalah kawasan dimana sekelompok atau golongan warga masyarakat menetapkan dan atau bertempat tinggal.

2. PEMBINAAN PROGRAM SISKAMLING “JAGA SULA”

a. Sasaran yang ingin dicapai

Agar tujuan penyelenggaraan pengamanan lingkungan pemukiman tersebut tercapai, maka perlu diadakan upaya-upaya pembinaan dengan sasaran :

- 1) Agar setiap anggota Masyarakat (sebagai individu) selalu mawas diri dan waspada untuk tidak melanggar hukum (pelaku) atau tidak menjadi korban kejahatan;
- 2) Agar anggota masyarakat (sebagai keluarga) dapat mengamankan keluarga dan rumah (tempat tinggalnya) masing-masing;
- 3) Agar masyarakat secara teroganisir dapat mengamankan lingkungan pemukiman sendiri.

Oleh sebab itu dalam rangka SISKAMLING Pemukiman, masyarakat (baik sebagai Individu, Keluarga dan masyarakat lingkungan Pemukiman) diharapkan memiliki kemampuan – kemampuan :

- 1) Keamanan untuk mendeteksi kerawanan - kerawanan sosial di lingkungannya sebagai sumber utama penyebab gangguan Kamtibmas;
- 2) Kemampuan untuk mengambil langkah-langkah guna meniadakan kerawanan – kerawanan sosial tersebut agar tidak berkembang menjadi keresahan dan ketegangan sosial dilingkungannya;
- 3) Kemampuan untuk mencegah secara fisik terjadinya pertama gangguan Kamtibmas di lingkungannya (Ronda Kampung);
- 4) Kemampuan untuk melakukan tindakan pertama terhadap kasus tertangkap tangan yang terjadi dilingkungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan segera menyerahkan kepada Polri;
- 5) Kemampuan membantu Polri dalam Pengamanan TKP, melaporkan setiap kejadian, mau menjadi saksi dan mau membantu Polri dalam pelacakan Pelaku dan Barang Bukti;
- 6) Kemampuan untuk merehabilitasi ketentraman masyarakat yang terganggu akibat konflik - konflik sosial, kecelakaan dan bencana alam yang terjadi di lingkungannya.

b. Cara Pembinaan

Menggunakan teknik-teknik Bimbingan Masyarakat.

c. Cara Pengamanan lingkungan Pemukiman Secara Fisik :

- 1) Keberhasilan Pengamanan fisik lingkungan pemukiman dipengaruhi oleh kepekaan dan rasa gotong royong/goro (kebersamaan) antar sesama warga masyarakat.

- 2) Mengaktifkan pelaksanaan Ronda Kampung, Penjagaan tempat-tempat tertentu, misalnya: Gudang, Bangunan-bangunan serta selalu berupaya meningkatkan kemampuan dan ketrampilan warga masyarakat dalam bidang Kamtibmas.

d. Cara-cara pendekatan kepada masyarakat.

Cara-cara pendekatan kepada masyarakat dalam rangka menanamkan pengertian, kesadaran kemampuan untuk melakukan SISKAMLING, dilakukan sebagai berikut :

- 1) Kenalkan diri dan tugas kita secara lengkap dan jelas menurut tata krama yang berlaku pada masyarakat.
- 2) Berikan informasi yang jelas dan jujur tentang arti, makna, maksud dan tujuan SISKAMLING (Pos Kamling) dan kemungkinan yang terjadi apabila sistem pengamanan lingkungan tidak dilaksanakan secara baik.
- 3) Berikan dorongan kepada warga masyarakat dengan contoh teladan yang baik dan bangkitkan harapan - harapannya agar dapat masyarakat mau, mengamankan kepentingannya sendiri dan kepentingan orang lain dalam rangka kepentingan bersama bagi suatu kehidupan yang aman, tertib dan sejahtera.
- 4) Sadarkan masyarakat agar mereka mau melakukan hal-hal yang baik dan positif bagi kepentingan keamanan dan ketertiban dirinya dan lingkungan sosialnya.
- 5) Berikan bimbingan dan penyuluhan secara teratur kepada warga masyarakat tentang cara - cara mereka menanggulangi permasalahan yang dihadapinya, tentang cara - cara membina kerukunan hidup bermasyarakat, tentang cara -

cara menghindari dan mengambil tindakan-tindakan pertama terhadap kasus-kasus kejahatan.

- 6) Didik dan latih masyarakat agar memperoleh penghayatan, pengetahuan yang lebih luas dan kemampuan atau keterampilan yang memadai untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan serta gangguan Kamtibmas lainnya terhadap dirinya dan lingkungannya.
- 7) Lakukan pengaturan dengan cara-cara yang baik apabila hal itu diperlukan sebagai kelanjutan dari cara-cara pendekatan yang disebutkan diatas.

e. Koordinasi Pelaksanaan

- 1) Kepolisian setempat (Bhabinkamtibmas Polsek) merupakan inti pembinaan dan karenanya berkewajiban untuk mengkoordinasikan semua pejabat dan tokoh - tokoh Masyarakat formal dan non formal bagi penyelenggaraan SISKAMLING.
- 2) Kedalam Kesatuan Polri, atas nama Kapolsek, mengkoordinasikan peran-peran Intelkam, Sabhara, dan Reskrim dalam rangka pembinaan kemampuan dan pengawasan serta pengendalian pelaksanaan SISKAMLING yang dilakukan oleh Masyarakat.
- 3) Aparat Pemerintah Daerah yang bersangkutan yang sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku berkewajiban membantu kelancaran penyerahan kekuatan warga masyarakat, pembiayaan dan pengadaan Sarana/ Prasarana bagi penyelenggaraan SISKAMLING;

- 4) Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) berperan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang bersifat khusus pada lingkungan Desa yang bersangkutan, sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan SISKAMLING, meliputi:
- a) Penentuan cara-cara pengamanan yang tepat;
 - b) Pendanaan;
 - c) Pengadaan Sarana dan Prasarana;
 - d) Mekanisme pembinaan;
 - e) Pengawasan dan Pengendalian;
 - f) Penyelesaian administrasi.
- (1) Penyempurnaan administrasi kependudukan sebagai bahan untuk pengaturan pengarahan kekuatan masyarakat untuk melakukan tugas SISKAMLING dan penentuan objek-objek khusus pengamanan.
 - (2) Pendataan tentang jumlah menurut kondisinya untuk pengaturan objek-objek pengamanan.
 - (3) Penyempurnaan Administrasi keluar masuk tamu sebagai bahan pengawasan.
 - (4) Penyempurnaan administrasi penyelenggaraan SISKAMLING.
 - (a) Buku Penjagaan;
 - (b) Daftar Jaga / daftar petugas ronda;
 - (c) Daftar perlengkapan Inventaris / ditempelkan pada dinding bagian dalam tiap Pos Kamling;
 - (5) Peta dan lokasi kerawanan lingkungan yang bersangkutan.

f. Tahapan pembentukan SISKAMLING

a) Konsultasi dengan Masyarakat:

Kegiatan SISKAMLING dimulai dengan konsultasi dengan masyarakat, dihadiri oleh 3 (tiga) pilar Desa yakni Kades, Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Hal ini penting untuk mendapatkan dukungan dan kesepakatan dari warga.

b) Pembentukan Struktur Kepengurusan SISKAMLING:

Setelah ada kesepakatan, dibentuk struktur kepengurusan SISKAMLING yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.

c) Pemilihan Pengurus di Setiap Tingkat RT/Lingkungan:

Pengurus SISKAMLING juga dipilih di setiap RT atau lingkungan untuk memastikan keterwakilan dan partisipasi masyarakat.

d) Penetapan Jadwal Piket:

Jadwal piket SISKAMLING perlu ditetapkan untuk memastikan keamanan lingkungan secara berkelanjutan.

e) Pelatihan Anggota SISKAMLING:

Anggota SISKAMLING perlu dilatih tentang prosedur keamanan, tata cara pengawasan, dan cara berkomunikasi dengan aparat keamanan.

f) Penempatan Pos Kamling:

Pos kamling ditempatkan di lokasi-lokasi strategis untuk memantau aktivitas di lingkungan dan sebagai tempat pertemuan bagi anggota SISKAMLING.

g) Pengawasan dan Pengendalian:

SISKAMLING secara rutin melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap lingkungan untuk mencegah kejahatan dan gangguan keamanan.

h) Koordinasi dengan Aparat Keamanan:

SISKAMLING harus melakukan koordinasi dengan aparat keamanan (Polri) khususnya Bahbinkamtibmas dan Babinsa untuk melaporkan setiap gangguan keamanan dan meminta bantuan jika diperlukan.

i) Partisipasi Masyarakat:

Seluruh warga diharapkan aktif berpartisipasi dalam kegiatan SISKAMLING, seperti ronda malam, patroli, dan memberikan informasi tentang potensi gangguan keamanan.

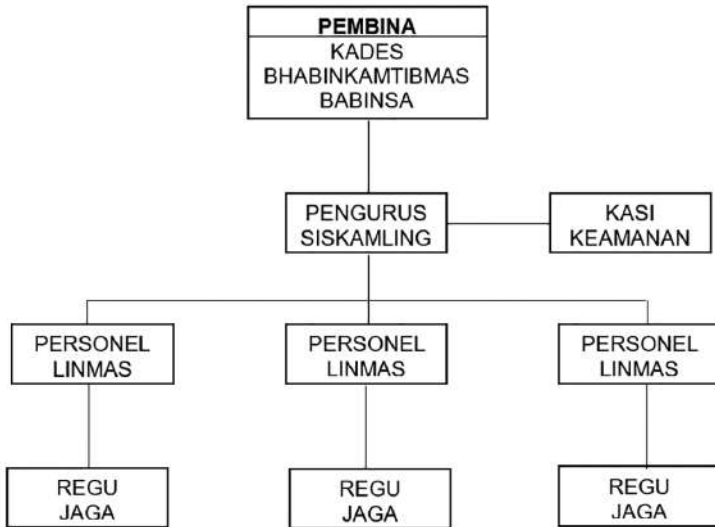
j) Penyuluhan dan Edukasi:

Masyarakat juga perlu terus disulaui dan dididik tentang pentingnya keamanan dan ketertiban lingkungan agar mereka lebih sadar akan bahaya kejahatan dan pentingnya peran aktif mereka dalam menjaga keamanan.

k) Penilaian dan Evaluasi:

SISKAMLING juga perlu dinilai dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

g. **Struktur Operasional SISKAMLING**



PENUTUP

Demikianlah Standart Operasional Prosedur (SOP) SISKAMLING “JAGA SULA” dibuat sebagai standar pelaksanaan kegiatan dilapangan serta untuk diketahui bagi seluruh *stakeholder* terkait diwilayah Kabupaten Kepulauan Sula.

D. Contoh SOP (*Standard Operating Procedure*) Ronda Malam

SOP ini disusun berdasarkan praktik lapangan dan hasil wawancara dengan para penggerak SISKAMLING di misalnya di Desa Ona dan Falabisahaya.

1. Tujuan

Menjamin pelaksanaan ronda malam berjalan teratur, aman, dan produktif untuk mencegah tindak kriminal, kebakaran, dan gangguan sosial lainnya.

2. Waktu Pelaksanaan

- a. Shift 1: 22.00 – 02.00
- b. Shift 2: 02.00 – 05.00

Minimal dua orang bertugas per shift.

3. Langkah-Langkah Operasional

- a. Apel Malam di pos jaga, dipimpin oleh Koordinator Ronda.
- b. Pemeriksaan alat keamanan: peluit, senter, HT/ponsel, dan buku laporan.
- c. Patroli keliling wilayah ronda:
 - 1) Menyapa warga yang masih beraktivitas.
 - 2) Memeriksa kondisi rumah kosong dan fasilitas umum.
- d. Laporan kejadian dicatat dalam Buku Log Keamanan Harian.
- e. Penutupan ronda dengan doa bersama dan evaluasi singkat.

4. Prinsip Etika Ronda

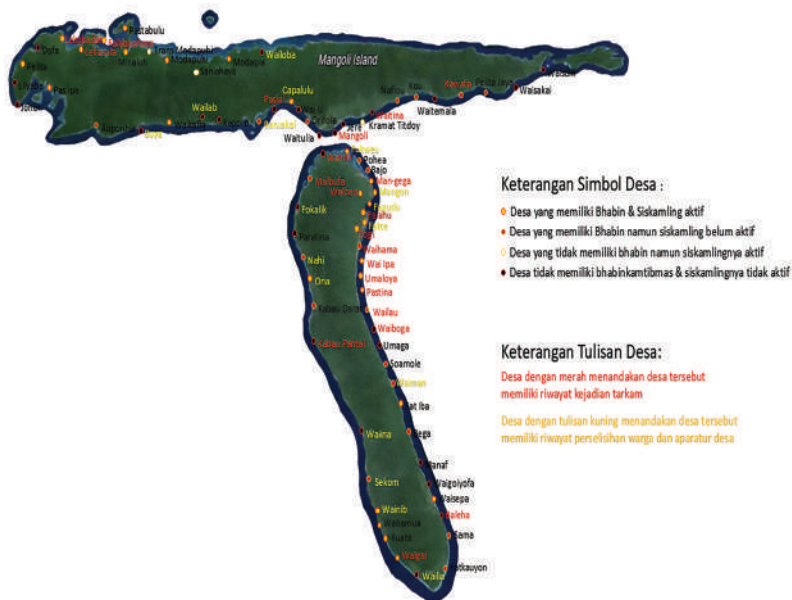
- a. Tidak membawa senjata tajam atau benda berbahaya.
- b. Menjaga sopan santun dan menghindari tindakan represif.
- c. Mengutamakan mediasi bila terjadi konflik kecil.
- d. Menjalin hubungan baik dengan aparat resmi.

5. Evaluasi dan Penghargaan

- Evaluasi dilakukan setiap akhir bulan oleh Dewan Pengarah.
- Warga aktif diberikan apresiasi berupa sertifikat atau bantuan sembako dari dana sosial desa.

Kedisiplinan dan penghargaan sosial menjadi dua pilar yang menjaga keberlanjutan ronda malam.

E. Lampiran Peta Sebaran SISKAMLING & Bhabinkamtibmas Polres Kepulauan Sula



DATA SISKAMLING & BHABINKAMTIBMAS
POLRES KEPULAUAN SULA TAHUN 2025

KESATUAN : POLRES KEPULAUAN SULA
JUMLAH KEC. & DESA : 12 KEC / 78 DESA

NO	POLSEK	KECAMATAN / JMLH DESA	DESA	AKTIF	BLM AKTIF	JUMLAH LINMAS	BHABINKAMTIBMAS
1.	SANANA	1). SANANA = 11 DESA	1. DS MANGON	√		6 LINMAS	TERISI
			2. DS. FAGUDU	√		4 LINMAS	TERISI
			3. DS. WAIBAU	√		6 LINMAS	TERISI
			4. DS.FALAHU	√		5 LINMAS	TERISI
			5. DS.FATCE	√		6 LINMAS	TERISI
			6. DS. FOGI	√		14 LINMAS	TERISI
			7. DS.WAIHAMA		√	6 LINMAS	TERISI
			8. DS.WAI IPA	√		8 LINMAS	TERISI
			9. DS.UMALOYA	√		8 LINMAS	TERISI
			10. DS.PASTINA	√		3 LINMAS	TERISI
			11. DS.WAILAU		√	3 LINMAS	TERISI
		2). SANANA UTARA = 7 DESA	1. DS MANGEGA	√		6 LINMAS	TERISI
			2. DS.BAJO		√	3 LINMAS	TERISI

NO	POLSEK	KECAMATAN / JMLH DESA	DESA	AKTIF	BLM AKTIF	JUMLAH LINMAS	BHABINKAMTIBMAS
			3. DS. POHEA		√	5 LINMAS	TERISI
			4. DS. FUKWEU	√		4 LINMAS	TERISI
			5. DS. WAININ		√	5 LINMAS	BELUM TERISI
			6. DS. MALBUFA		√	6 LINMAS	TERISI
			7. DS. FOKALIK		√	4 LINMAS	BELUM TERISI
		3) SULABESI TENGAH = 6 DESA	1. DS. WAIBOGA		√	4 LINMAS	BELUM TERISI
			2. DS. UMAGA		√	-	BELUM TERISI
			3. DS. SOAMOLE		√	4 LINMAS	TERISI
			3. DS. WAIMAN		√	4 LINMAS	TERISI
			4. DS. FAT IBA	√		5 LINMAS	TERISI
			5. DS. BEGA		√	-	TERISI
			6. DS. MANAF		√	-	BELUM TERISI
		4) SULABESI TIMUR = 6 DESA	1. DS. WAIGOYOFA		√	4 LINMAS	BELUM TERISI
			2. DS. WAISEPA	√		2 LINMAS	TERISI
			3. DS. BALEHA		√	3 LINMAS	BELUM TERISI
			4. DS. SAMA		√	3 LINMAS	TERISI
			5. DS. FATKAUYON		√	4 LINMAS	TERISI
			6. DS. WALIA		√	4 LINMAS	BELUM TERISI
2.	SULBAR	5) SULABESI SLTN = 5 DESA	1. DS. WAIGAY	√		10 LINMAS	TERISI
			2. DS. FUATA	√		5 LINMAS	TERISI
			3. DS. WAITAMUA	√		5 LINMAS	TERISI

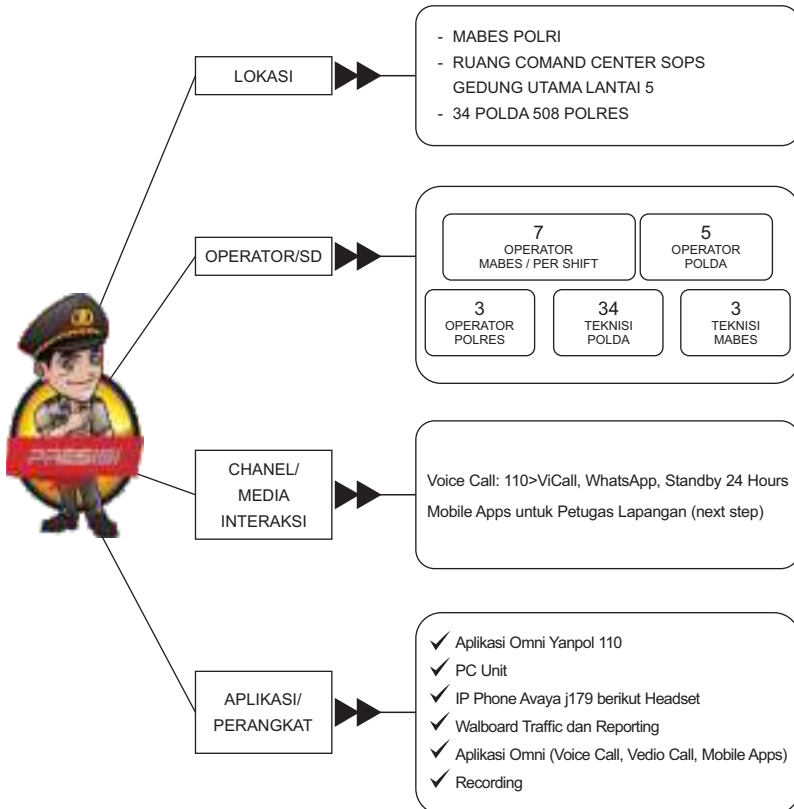
NO	POLSEK	KECAMATAN / JMLH DESA	DESA	AKTIF	BLM AKTIF	JUMLAH LINMAS	BHABINKAMTIBMAS
			4. DS WAINIB	√		5 LINMAS	TERISI
			5. DS SEKOM		√	7 LINMAS	TERISI
		6) SULABESI BARAT = 6 DESA	1. DS WAINA		√	-	BELUM TERISI
			2. DS KABAU PANTAI		√	5 LINMAS	BELUM TERISI
			3. DS KABAU DARAT		√	3 LINMAS	TERISI
			4. DS ONA	√		4 LINMAS	TERISI
			5. DS NAHI		√	6 LINMAS	TERISI
			6. DS PARATINA		√	6 LINMAS	BELUM TERISI
3.	MANGTIM	7) MANGOLI UTARA TIMUR = 4 DESA	1. DS WAISUM		√	-	BELUM TERISI
			2. DS WAISAKAI		√	-	BELUM TERISI
			3. DS PELITA JAYA		√	3 LINMAS	TERISI
			4. DS KAWATA		√	4 ORANG	TERISI
		8) MANGOLI TIMUR = 5 DESA	1. DS WAITAMELA		√	7 LINMAS	BELUM TERISI
			2. DS KOU		√	6 LINMAS	TERISI
			3. DS NAFLOU	√		2 LINMAS	TERISI
			4. DS WAITINA		√	-	BELUM TERISI
			5. DS KRAMAT TITDOY	√		3 LINMAS	BELUM TERISI
		9) MANGOLI TENGAH = 9 DESA	1. DS JERE		√	-	BELUM TERISI

NO	POLSEK	KECAMATAN / JMLH DESA	DESA	AKTIF	BLM AKTIF	JUMLAH LINMAS	BHABINKAMTIBMAS
			2. DS.MANGOLI		√	-	BELUM TERISI
			3. DS.WAITULIA		√	-	BELUM TERISI
			4. DS.ORIFOLA		√	2 LINMAS	TERISI
			5. DS.WAI"U		√	-	BELUM TERISI
			6. DS.CAPALULU	√		5 LINMAS	TERISI
			7. DS.PASLAL		√	3 LINMAS	BELUM TERISI
			8. DS.BARUAKOL		√	4 LINMAS	TERISI
			9. DS.WAILOBA		√	-	BELUM TERISI
4.	MANGBAR	10).MANGOLI SELATAN = 5 DESA	1. DS.KAPORO		√	-	BELUM TERISI
			2. DS. WAILAB			-	BELUM TERISI
			3. DS.WAIKAFIA	√		-	TERISI
			4. DS.BUYA		√	-	BELUM TERISI
			5. DS.AUPONHIA		√	-	TERISI
		11).MANGOLI BARAT = 7 DESA	1. DS.PAS IPA	√		6 LINMAS	TERISI
			2. DS.JOHOR		√	-	BELUM TERISI
			3. DS.LILIABA		√	-	BELUM TERISI
			4. DS.PELITA	√		3 LINMAS	TERISI
			5. DS.DOFA		√	-	BELUM TERISI
			6. DS.LEKOKADAI	√		5 LINMAS	TERISI
			7. DS.LEKOSULA	√		4 LINMAS	TERISI
			7. DS.LEKOSULA	√		4 LINMAS	TERISI

NO	POLSEK	KECAMATAN / JMLH DESA	DESA	AKTIF	BLM AKTIF	JUMLAH LINMAS	BHABINKAMTIBMAS
		12)MANGOLI UTARA = 8 DESA	1. DS.FALABISAHAYA	√		4 LINMAS	TERISI
			2. DS.PASTABULU	√		4 LINMAS	TERISI
			3. DS. TRANS MODAPUHI	√		2 LINMAS	BELUM TERISI
			4. DS.MINALULI	√		2 LINMAS	TERISI
			5. DS.SANIAHAYA	√		2 LINMAS	BELUM TERISI
			6. DS.MODAPUHI	√		3 LINMAS	TERISI
			7. DS.MODAPIA	√		5 LINMAS	TERISI
JUMLAH		12 KECAMATAN	78	33 DESA AKTIF	45 DESA BLM AKTIF	266 LINMAS	46 DESA = SUDAH TERISI 32 DESA = BELUM TERISI

01 GAMBARAN UMUM

OVERVIEW 110

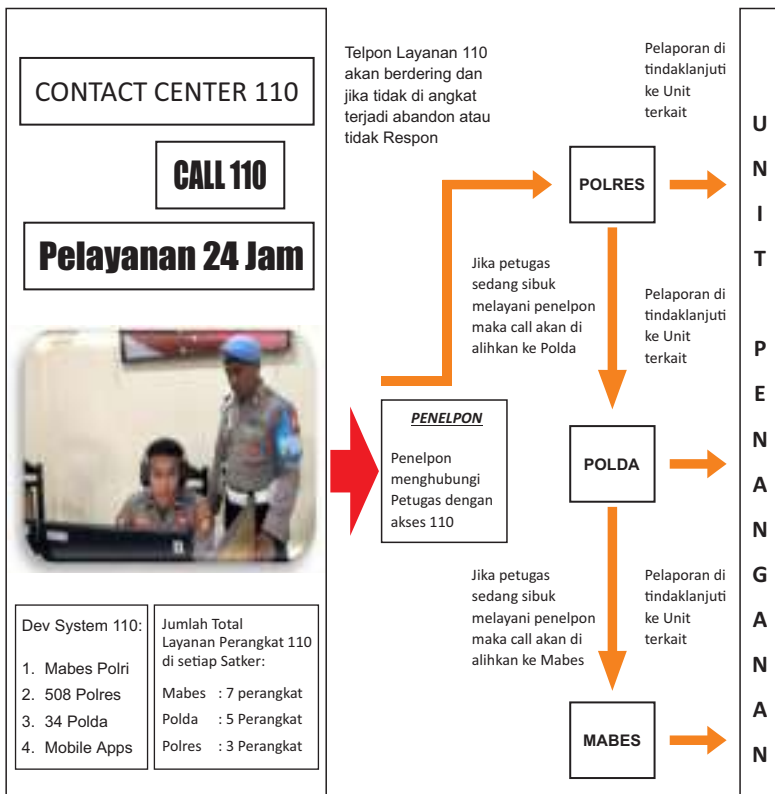


FOLLOW PROSES 110 ***Alur Pelaporan***

LAYANAN POLISI

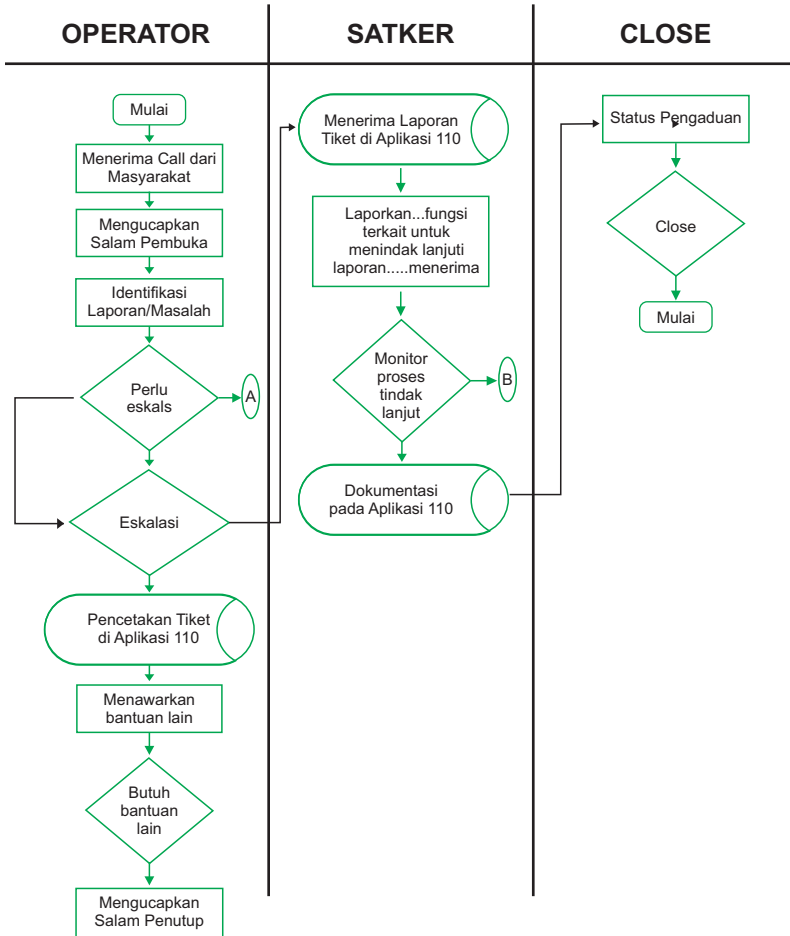


Konsep Desentralisasi Call Centered di Polres, Polda dan Mabes



Proses Pelaporan dan Penanganan CALL 110 dari Polres, Polda dan Mabes

FLOW PROSES

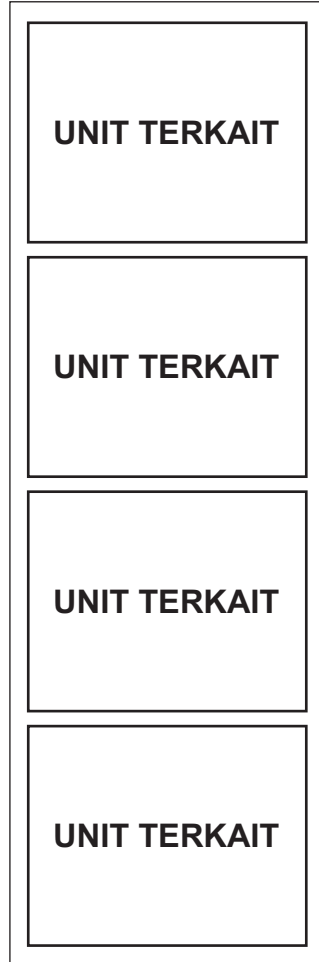


CALL 110
Pelayanan 24 Jam

PENELPON



**Pelaporan
ditindak lanjuti
ke unit terkait**



LANGKAH-LANGKAH MENGGUNAKAN LAYANAN 110:

1. Hubungi nomor 110: Panggil nomor 110 dari ponsel atau telepon rumah kapan saja. Layanan ini gratis dan dapat diakses 24 jam.
2. Jelaskan situasi: Saat petugas menjawab, sampaikan permasalahan yang Anda hadapi dengan jelas dan singkat.
3. Berikan informasi penting: Sebutkan lokasi Anda, nama, dan detail lain yang relevan mengenai kejadian. Contoh informasi yang bisa dilaporkan meliputi kecelakaan, bencana, kerusakan, kejahatan, atau tindak kekerasan.
4. Ikuti instruksi: Patuhi semua arahan yang diberikan oleh petugas untuk mempercepat proses penanganan.
5. Penting: Layanan ini hanya untuk situasi darurat. Penyalahgunaan layanan ini untuk laporan palsu akan dilacak dan dapat ditindak



Sanana, 08 Mei 2025

K e p a d a
Yth, Para Kepala Desa Sekabupaten
Kepulauan Sula
Masing – masing
Di_ _____
Tempat

SURAT EDARAN BERSAMA

Nomor : 100.3.4.2/118/SETDA-KS/V/2025

Nomor : B/54/V/2025

Nomor : B/251/V/2025

TENTANG PEMBERITAHUAN MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Dasar .

1. Undang – undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab undang undang hukun pidana
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2009 tentang pengendalian Pengawasan minuman beralkohol
5. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2009 tentang system Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Memperhatikan : hasil rapat bersama pada tanggal 2 mei tahun 2025 antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Kapolres Kepulauan Sula dan DANDIM 1510 /Sula.

Maka dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, agar tetap dalam kondisi yang kondusif dan aman, mengingat pentingnya kenyamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat khususnya di wilayah desa masing- masing, maka perlu dilaksanakan Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Maka di sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula wajib menjaga keamanan di lingkungan masing masing dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Sistem Keamanan Lingkungan (siskamling).
2. Pemerintah desa mengaktifkan siskamling untuk menjaga keamanan lingkungan dan berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas.
3. Kepala desa, Bhabinkamtibmas dan Babinsa menyusun, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan siskamling di wilayahnya.
4. Pelaksanaan siskamling meliputi kegiatan bersama, mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di tingkat desa.
5. Personil siskamling agar tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, peraturan dan norma.

Demikian surat edaran ini di sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.


BUPATI KEPULAUAN SULA,
Hj. FIFIAN ADENINGSI MUS, SH

KAPOLRES KEPULAUAN SULA,

AKBP. KODRAT MUH HARTANTO, S.I.K

DANDIM 1510/SULA,

LETKOL INF. EFRAN TRI HERNOWO, S.I.P

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN SISKAMLING JAGA SULA



**Peresmian SISKAMLING Jaga Sula Desa Ona
Kecamatan Sulabesi Barat**



**Peresmian SISKAMLING Jaga Sula Desa Keramat Titdoi
Kecamatan Mangoli Timur**



**Peresmian SISKAMLING Jaga Sula Desa Waibau
Kecamatan Sanana**



**Peresmian SISKAMLING Jaga Sula Desa Fagudu
Kecamatan Sanana**



**Peresmian SISKAMLING Jaga Sula Desa Fukweu
Kecamatan Sanana Utara**



**Peresmian SISKAMLING Jaga Sula Desa Falabisahaya Kecamatan
Mangoli Utara**



**Pelantikan dan Bimtek Relawan Jaga Sula
di Aula POLRES Kepulauan Sula**





**Penyerahan Plakat Jaga Sula
dari Kapolres Kepulauan Sula kepada Bapak Wakapolri**

